

JURNAL STUDI INOVASI

Vol 3 No 1 Januari 2023



Inovbook Publications



**Jurnal
Studi Inovasi**

<https://jurnal.studiinovasi.id>



PEMIMPIN REDAKSI

Wanda Tifani Arantika
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Airlangga
wandatifany@gmail.com

BAGIAN EDITOR

Wanda Tifani Arantika
wandatifany@gmail.com

Siti Muntamah
sitim080@gmail.com

GRAFIS

Ali Mujahidin

ASOSIASI EDITOR

Karina Idria Setyawati
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Airlangga

Devita Ramadhani
Kurniasari
Fakultas Teknologi Industri,
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember

Wahidah Mumtahanah
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Airlangga

Fauziah Putri Indi
Rahmawati
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas
Pembangunan Nasional
Veteran Surabaya

Amadea Fitri Syaharani
Fakultas Sains dan
Teknologi, Universitas
Airlangga

MITRA BESTARI

Leope Pinnega
Badan Kepegawaian dan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tulungagung

Farid Pribadi
Universitas Negeri Surabaya

Iman Iskandar
Badan Sumber Daya
Manusia Kementerian Dalam
Negeri

Heri Wahyudianto
Badan Penelitian dan
Pengembangan Provinsi
Papua

Agustinus Hartopo
Badan Penelitian dan
Pengembangan Provinsi
Papua

Tedi Gunawan
Ritsumeikan University

Adi Asmariadi Budi
Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Provinsi Lampung

Ambar Rosidhah Qoonitah
Badan Pengawas Pemilu

Adi Suhendra
Kementerian Dalam Negeri

Firdaus Sany Lewenussa
The University of Sheffield,
Inggris



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan-Nya kami dapat menerbitkan Jurnal Studi Inovasi (JSI) Volume 3 Nomor 1, Januari 2023.

Seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta sumberdaya manusia maka hasil-hasil penelitian maupun sanggahan ilmiah inovasi perlu dipublikasikan dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pembaca.

Dalam edisi ini disajikan 6 (enam) makalah yang meliputi: (1) Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokrasi Lokal (Studi tentang Demokrasi Lokal di Desa Kimak), (2) Penerapan Pembelajaran Model Discovery Learning sebagai Inovasi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kimia, (3) Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, (4) Peran Social Enterprise sebagai Inovasi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, (5) Inovasi Sosial : Tipologi Ekonomi Politik Berbasis Etnis pada Masyarakat di Kelurahan Sungai Selan Bangka Tengah, (6) Inovasi Politik : Kiprah Legislator PKS di Parlemen Kota Pangkalpinang Periode 2019-2024.

Terima kasih kami sampaikan kepada para peneliti dan para fungsional lain yang telah ikut berpartisipasi mengirimkan makalah untuk kelangsungan jurnal ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari yang telah membantu sehingga jurnal ini dapat diterbitkan.

Kami mengharapkan masukan saran dan kritik demi penyempurnaan terbitan selanjutnya, serta semoga kerjasama yang telah berjalan dapat ditingkatkan.

Bandung, Januari 2023

Redaksi



DAFTAR ISI

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokrasi Lokal (Studi tentang Demokrasi Lokal di Desa Kimak) Panji Rizki Wardhana, Ibrahim, Ranto	1-13
Penerapan Pembelajaran Model Discovery Learning sebagai Inovasi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kimia Noormaliana	14-20
Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Ragil Fitri Rahayu, Ibrahim	21-30
Peran Social Enterprise sebagai Inovasi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Rafi Afa Mawardi, Muhammad Rizki Pratama	31-42
Inovasi Sosial : Tipologi Ekonomi Politik Berbasis Etnis pada Masyarakat di Kelurahan Sungai Selan Bangka Tengah Eka Mawar Hartati, Bustami Rahman, Ibrahim	43-50
Inovasi Politik : Kiprah Legislator PKS di Parlemen Kota Pangkalpinang Periode 2019-2024 Dimas Ali Sopin, Ranto	51-65



HALAMAN INTISARI

e-ISSN : 2775-0922

Date of Issue: Januari 2023

Halaman ini dapat direproduksi atau disalin tanpa izin dari editor dan penulis

Panji Rizki Wardhana, Ibrahim, Ranto (Universitas Bangka Belitung, Balunijuk, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172)

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokrasi Lokal (Studi tentang Demokrasi Lokal di Desa Kimak)

JURNAL STUDI INNOVASI, Januari 2023, vol 3, no 1, hal. 1-13, 3 g, 1 tab, 24 ref

Peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kimak Kecamatan Merawang sangat diharapkan oleh masyarakat dalam upaya memperkuat demokrasi lokal di pedesaan. Di Desa Kimak masyarakat desa kurang menyadari dan kurang ikut serta berpartisipasi dalam demokrasi dan memajukan desanya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana peran BPD dalam Pembangunan Desa di Desa Kimak dan (2) Apakah faktor pendukung dan penghambat BPD dalam upaya memperkuat demokrasi lokal tingkat Desa di Desa Kimak. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan Desa di Desa Kimak dan untuk menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat BPD dalam memperkuat Demokrasi di Desa Kimak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kimak telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melaksanakan pengawasan dengan baik. (2) Faktor pendukung BPD dalam pembangunan Desa kerjasama semua elemen masyarakat dan pemerintahan Desa. Kemudian faktor penghambat

BPD dalam menjalankan perannya yakni secara internal dan eksternal. Secara internal diantaranya sarana dan prasarana, hambatan finansial, waktu yang terbatas. Sedangkan untuk faktor eksternalnya adalah partisipasi dari masyarakat yang kurang dan ketidakpahaman masyarakat terkait BPD. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran yang telah dilaksanakan BPD selama ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku.

(author)

Kata Kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Demokrasi Lokal, APBDes, Pembangunan Desa

Noormaliana (MAN 3 Kota Banjarmasin, Jl. Batu Benawa Raya No.32, Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70115)

Penerapan Pembelajaran Model Discovery Learning sebagai Inovasi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kimia

JURNAL STUDI INNOVASI, Januari 2023, vol 3, no 1, hal. 14-20, 1 g, 0 tab, 13 ref

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar kimia siswa menggunakan model Discovery Learning dalam bentuk tercapainya tujuan pembelajaran pada materi Kesetimbangan Kimia dan Pergeseran Kesetimbangan. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan dua siklus dan dua pertemuan di tiap siklusnya. Aktivitas yang dilakukan di tiap siklus adalah perencanaan, implementasi tindakan, observasi dan interpretasi, analisis dan refleksi. Partisipan penelitian ini merupakan siswa kelas XII IPA 3 MAN 3 Kota Banjarmasin yang berjumlah 33 orang. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan model Discovery Learning mampu meningkatkan hasil belajar pelajaran Kimia. Peningkatan hasil belajar tersebut bisa dilihat dari peningkatan nilai rata-rata Pretest dan Posttest dari 66,7 menjadi 72,1. Di siklus 2 juga terjadi peningkatan nilai rata-rata dari 78,5 menjadi 88,8. Dari perbandingan nilai rata-rata posttest di siklus 1 dan 2, terdapat peningkatan

-an hasil rata-rata yang sangat signifikan dengan jumlah 16,7 poin. Dengan begitu, model Discovery Learning bisa digunakan oleh guru dengan cara menyiapkan diri untuk pandai memotivasi, membimbing dan mengarahkan siswa dalam menyelesaikan pembelajaran.

(author)

Kata Kunci: Pembelajaran, Model Discovery Learning, Inovasi, Hasil Belajar, Kimia

Ragil Fitri Rahayu, Ibrahim (Universitas Bangka Belitung, Balunijuk, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172)

Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka

JURNAL STUDI INNOVASI, Januari 2023, vol 3, no 1, hal. 21-30, 0 g, 0 tab, 12 ref

Penelitian ini membahas mengenai implementasi dari inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka. Merespon INPRES NO. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, Kabupaten Bangka terus meningkatkan inovasi pelayanan. Namun dalam implementasinya terdapat masalah yang cukup kompleks terkait masalah kependudukan. Dalam hal ini baik masyarakat maupun aparatur pegawai dituntut agar mampu beradaptasi dengan situasi seperti sekarang ini, adapun permasalahan yang kerap terjadi ialah banyaknya dokumen yang dilampirkan oleh masyarakat tidak jelas sehingga hal ini menjadi persoalan. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori Divusi Inovasi Everett M. Rogers, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sementara teknik pengumpulan data dalam penelitian ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu E-Government dimaknai memberi kemudahan belum terbukti, Dukcapil Kabupaten Bangka belum siap sehingga E-Government tidak terkelola dengan baik. Terdapat tiga inovasi berbasis digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka yakni, BANGMUDA (Bangka Mudah Dapat Akta), Gerbang Terindak dan Matras Bangka. Implementasi daripada inovasi pelayanan berbasis E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka masih belum optimal. Terdapat beberapa point yang mempengaruhi implementasi E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka, baik secara kekurangan maupun kelebihan, diantaranya ialah: (1) terciptanya pemerintahan yang baik (2) Praktik korupsi berkurang, (3) Tercipta efisiensi skala ruang dan waktu. (4) Masih ada masyarakat yang belum memiliki perangkat teknologi dan informasi, (5) Ketidaktahuan masyarakat, (6) people culture dan (7) jaring internet.

(author)

Kata Kunci: E-Government; Implementasi; Inovasi; Kebijakan Publik; Pelayanan Publik

Rafi Aufa Mawardi, Muhammad Rizki Pratama (Universitas Airlangga | Jl. Dharmawangsa Dalam, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60286)

Peran Social Enterprise sebagai Inovasi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

JURNAL STUDI INNOVASI, Januari 2023, vol 3, no 1, hal. 31-42, 0 g, 0 tab, 33 ref

Social enterprise merupakan suatu inovasi di bidang bisnis yang ikut berperan dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan. Artikel ini mengkaji mengenai peran social enterprise dalam mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan teori keberfungsian sosial sebagai kerangka analisis. Studi ini menemukan bahwa ada empat wajah kemiskinan di Indonesia yang cukup fundamental, yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi, eskalasi tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Peneliti menganalisis bahwa social enterprise hadir sebagai pihak eksternal yang berperan membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal ini terlihat dari beberapa peran fungsionalnya, seperti melakukan pemberdayaan masyarakat, memberikan layanan jasa keuangan mikro, dan menyediakan pendidikan gratis.

(author)

Kata Kunci : Social Enterprise, Pengentasan Kemiskinan, Inovasi, Keberfungsian Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

Eka Mawar Hartati, Bustami Rahman, Ibrahim (Universitas Bangka Belitung, Balunijuk, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172)

Inovasi Sosial : Tipologi Ekonomi Politik Berbasis Etnis pada Masyarakat di Kelurahan Sungai Selan Bangka Tengah

JURNAL STUDI INNOVASI, Januari 2023, vol 3, no 1, hal. 43-50, 0 g, 0 tab, 26 ref

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perekonomian masyarakat Sungai Selan dapat di katagorikan cukup baik dan sudah mengalami kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini, kemajuan perekonomian masyarakat Sungai Selan sendiri didukung oleh berbagai macam jenis mata pencaharian serta melimpahnya potensi sumber daya alam. Sumber pertama mata pencaharian masyarakat Sungai Selan yang notabene sebagai petani dan nelayan, mereka juga bekerja sebagai pedagang, menjadi tukang, dan masih banyak lagi pekerjaan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui tipologi ekonomi politik berbasis etnis ; (2) untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembentukan tipologi ekonomi politik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dilakukan secara alamiah. Dimana pada metode kualitatif

dilakukan berdasarkan teknik pengumpulan data, analisis data yang bersifat induktif serta dilakukan melalui pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena tersebut. Studi ini dianalisis menggunakan teori Need For Achievement (kebutuhan akan prestasi) yang di kemukakan oleh David McClelland dan teori pilihan rasional di kemukakan oleh James Coleman. Hasil temuan penelitian ini adalah di Kelurahan Sungai Selan masih terdapat berabagai macam etnis dan beragam jenis mata pencaharian, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembentukkan ekonomi politik di Kelurahan Sungai Selan seperti, faktor kondisi geografis, faktor lingkungan dan alam, faktor kepentingan, dan faktor daerah asal. Terdapat juga beberapa inovasi kebijakan yang peneliti sajikan.

(author)

Kata Kunci: Ekonomi Politik; Etnis; Inovasi Kebijakan; Mata Pencaharian; Tipologi

Dimas Ali Sopin, Ranto (Universitas Bangka Belitung, Balunujuk, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172)

Inovasi Politik : Kiprah Legislator PKS di Parlemen Kota Pangkalpinang Periode 2019-2024

JURNAL STUDI INNOVASI, Januari 2023, vol 3, no 1, p.51-60, 2g, 0 tab, 26 ref

Kiprah dalam parlemen menjadi bagian penting yang tidak luput dari penglihatan partai politik. Kader sebagai utusan dari partai politik yang menduduki kursi parlemen diharapkan mampu berkiprah dalam perealisasi aspirasi masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih dinamis. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menganalisis kiprah legislator PKS di parlemen Kota Pangkalpinang; dan, 2) Menganalisis faktor yang mempengaruhi kiprah legislator PKS di parlemen Kota Pangkalpinang. Penelitian ini dilakukan di Parlemen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kota Pangkalpinang pada 2022 dengan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dari Ketua, Pengurus, dan Kader dari Partai Keadilan Sejahtera Kota Pangkalpinang yang dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dan penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Partai Keadilan Sejahtera melakukan pengoptimalan kiprah legislator melalui fraksi di DPRD Kota Pangkalpinang dengan melakukan penguatan fungsi di parlemen melalui peningkatan kuantitas dan kualitas kader di pemerintahan yang dibuktikan dengan peningkatan perolehan kursi dari 2 kursi pada 2014 sampai 2019 menjadi 3 kursi pada 2019-2024; dan, 2) Partai Keadilan Sejahtera melakukan berbagai strategi untuk merealisasikan aspirasi yang menjadi faktor berpengaruh terhadap kiprah, antara lain proses penyampaian detail aspirasi yang menyakinkan pada rapat paripurna, negosiasi terhadap beberapa partai

dengan menggunakan hubungan timbal-balik, dan evaluasi internal secara berkala. Namun, realisasi aspirasi ini menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan anggaran dan kepentingan politik dengan orang tertentu.

(author)

Kata Kunci: Pemerintah Kiprah Legislator, kader, Parlemen, dan Faktor



Korespondensi

Email : panjiriskiwardhana24@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM DEMOKRASI LOKAL (Studi tentang Demokrasi Lokal di Desa Kimak)

Panji Rizki Wardhana^{1*}, Ibrahim^{2*}, Ranto^{3*}

^{1,2,3} Universitas Bangka Belitung | Gang IV No. 1, Balunijuk,
Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

Disetujui: 13 Januari 2023

Abstract

The role of the Village Consultative Body (BPD) in Kimak Village, Merawang District is highly expected by the community in an effort to strengthen local democracy in the countryside. In Kimak Village, the village community is less aware of and less involved in participating in democracy and developing their village. The problems studied in this study are: (1) what is the role of the BPD in Village Development in Kimak Village and (2) What are the supporting and inhibiting factors of the BPD in an effort to strengthen village-level local democracy in Kimak Village. The purpose of this study is to describe the role of the Village Consultative Body (BPD) in village development in Kimak Village and to analyze the factors that support and inhibit BPD in strengthening democracy in Kimak Village.

This study uses qualitative methods with data analysis techniques used, namely descriptive qualitative. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used were interviews and documentation. The results of this study indicate that: (1) The Village Consultative Body (BPD) in Kimak Village has carried out its main duties and functions, namely establishing Village Regulations with the Village Head, accommodating and channeling community aspirations, and carrying out supervision properly. (2) BPD supporting factors in Village development in collaboration with all elements of society and Village administration. Then the inhibiting factors of BPD in carrying out its role are internally and externally. Internally including facilities and infrastructure, financial constraints, limited time. As for the external factors, there is lack of community participation and lack of understanding of the community regarding BPD. The conclusion of this study is that the role that has been carried out by the BPD so far has been going well and in accordance with the applicable procedures.

Keywords: Role, Village Consultative Body (BPD), Local Democracy, APBDes, Village Development

Abstrak

Peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kimak Kecamatan Merawang sangat diharapkan oleh masyarakat dalam upaya memperkuat demokrasi lokal di pedesaan. Di Desa Kimak masyarakat desa kurang menyadari dan kurang ikut serta berpartisipasi dalam demokrasi dan memajukan desanya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana peran BPD dalam Pembangunan Desa di Desa Kimak dan (2) Apakah faktor pendukung dan penghambat BPD dalam upaya memperkuat demokrasi lokal tingkat Desa di Desa Kimak. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan Desa di Desa Kimak dan untuk menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat BPD dalam memperkuat Demokrasi di Desa Kimak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kimak telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melaksanakan pengawasan dengan baik. (2) Faktor pendukung BPD dalam pembangunan Desa kerjasama semua elemen masyarakat dan pemerintahan Desa. Kemudian faktor penghambat BPD dalam menjalankan perannya yakni secara internal dan eksternal. Secara internal diantaranya sarana dan prasarana, hambatan finansial, waktu yang terbatas. Sedangkan untuk faktor eksternalnya adalah partisipasi dari masyarakat yang kurang dan ketidakpahaman masyarakat terkait BPD. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran yang telah dilaksanakan BPD selama ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku.

Kata Kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Demokrasi Lokal, APBDes, Pembangunan Desa

I. PENDAHULUAN

Selama ini tatanan politik lebih bersifat sentralistik sehingga kurang memperhatikan potensi-potensi politik lokal sebagai salah satu komponen penguatan demokrasi. Pada hakikatnya politik lokal jelas berpacu pada sistem demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat, atau suatu pemerintahan dimana rakyat memegang kedaulatan tertinggi atau rakyat di ikutsertakan dalam pemerintahan negara (Noviati, 2013: 334).

Demokrasi dapat diartikan bahwa pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan). Sehingga rakyat yang menjadi peran utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Istilah demokrasi lokal bermakna banyak, tergantung ruang dan tempat, dan memang tidak ada satu pun konsep atau model yang bisa dianggap sebagai perwujudan terbaik dari demokrasi (Sisk,

2002:14). Jadi demokrasi lokal yang dimaksud peneliti adalah demokrasi yang terjadi di level lebih bawah dari hirarki pemerintahan suatu Negara.

Nilai demokrasi akan memberi ruang yang lebih leluasa kepada warga masyarakat dalam menentukan pilihan dan mengekspresikan diri secara rasional. Pergeseran politik desentralisasi membawa pengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kehadiran lembaga-lembaga lokal ditingkat desa dimana salah satu adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat yang dianggap sebagai parlemennya desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan pada dasarnya pemerintahan desa bukan hanya sebagai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi terendah langsung. Akan tetapi pemerintahan desa juga merupakan pembina, pengayom, dan juga pelayan bagi masyarakat Desa. Hal ini menjadi dasar adanya pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat di Desa, sebagai mitra kerja Kepala Desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tergantung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi demokrasi perwakilan Desa. BPD adalah badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa. Bagian Ketujuh Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan

kinerja Kepala Desa (**Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pemerintahan di Desa memiliki peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan BPD ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah kabupaten atau kota dibentuk pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga pembahasan mengenai BPD dalam pasal 209 dinyatakan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (**Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislasi di tingkat Desa sekaligus wakil dari masyarakat Desa di beri kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, BPD diharapkan mampu menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di desa (**Nurhakiki, 2016:3**).

Penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan demokratis serta diharapkan BPD sebagai lembaga legislasi dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagaimana yang sudah ditetapkan, sehingga tidak adanya tumpang tindih antara legislatif dan eksekutif. Sebab lembaga politik akan berfungsi melakukan kontrol terhadap pemerintahan desa dan bertanggung jawaban kepada masyarakat.

Ditinjau kembali dengan penjelasan mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah dipaparkan ternyata memiliki kaitan erat pelaksanaannya dengan Bangka Belitung khususnya pada fokus demokrasi di Desa, khususnya Desa Kimak yang dimana dianggap masih relevan untuk dikaji, dikarenakan Desa Kimak memiliki peranan penuh dalam pembangunan di Desa Kimak dan juga BPD Desa Kimak termasuk BPD yang produktif dalam proses Demokrasi Lokal di tingkat Desa dengan beberapa contoh pelaksanaan Demokrasi yang dipaparkan di Bab Pembahasan. Kemudian, Desa Kimak menjadi fokus peneliti dalam melakukan penelitian

dikarenakan Desa Kimak Memiliki Jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan jumlah Rp. 2.772.805.000 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah) angka tersebut menjadi angka terbesar se Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2021 (**Profil Desa Kimak 2021**).

Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kimak menjadi peran aktif dalam pembangunan Desa dilihat dari jumlah anggaran PADes yang cukup besar tersebut. Hadirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislasi di tingkat Desa sekaligus wakil dari masyarakat Desa diberi kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta BPD diharapkan mampu menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di desa (**Nurhakiki, 2016: 3**).

Dalam konteks pemerintahan Desa, proses terjadinya *check and balance* antara lembaga Eksekutif Kepala Desa dan lembaga Legislatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mutlak diperlukan. Artinya dalam melaksanakan pemerintahan desa diperlukan keseimbangan kekuatan antara kedua lembaga tersebut. Kedua lembaga tersebut tidak boleh ada yang terlalu kuat dan terlalu lemah. Karena jika itu terjadi proses penyelenggaraan pemerintahan desa akan berjalan tidak efektif sehingga sulit untuk mencapai demokratisasi desa yang baik.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kimak akan tersusun dan terarah jika diberbagai lapisan masyarakat Desa untuk diikutsertakan dalam proses perencanaan melalui musyawarah yang disampaikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga Perwakilan sehingga masyarakat akan merasa terwakili kepentingan dan aspirasinya untuk menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta bebas dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) demi kesejahteraan masyarakat Desa.

Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan dalam pemerintahan desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam regulasi. Sesuai pengamatan awal yang didapatkan informasi

bahwa peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa relatif belum melaksanakan dengan sebaiknya.

Sehingga hal tersebut menjadi dasar acuan peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran BPD Dalam Demokrasi Lokal (Studi Tentang Demokrasi Lokal di Desa Kimak)” terkait bagaimana proses dan kendala peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan Demokrasi lokal tingkat Desa.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desain penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sukmadinata dalam Rahman dan Ibrahim (2009:44) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian deskriptif kualitatif ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan secara jelas dan faktual tentang implementasi politik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tatanan demokrasi pada pembangunan desa.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dari bulan Mei hingga Juni 2020, Lokus dari penelitian ini berlokasi di Desa Kimak dan objek utamanya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kimak. Alasan peneliti untuk mengambil penelitian di Desa Kimak adalah berdasarkan pertimbangan bahwa Desa Kimak memiliki jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar se-Provinsi Bangka Belitung. Sehingga menjadi fokus utama dalam melihat pembangunan desa sekaligus meninjau peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta tindakannya.

C. Subjek Penelitian

Subyek adalah orang berada dalam situasi sosial yang ditetapkan sebagai pemberi informasi dalam sebuah penelitian atau dikenal dengan informan (Mukhtar, 2013:89). Peneliti akan menentukan informan sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam mendapatkan data. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling*

merupakan teknik pengambilan data yang digunakan peneliti untuk penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi pertimbangan peneliti untuk menentukan informan diantaranya Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD, Perangkat Desa maupun pemuda-pemudi.

D. Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara dengan informan yang sudah ditentukan. Sedangkan data sekunder didapat dari dokumen pendukung seperti buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data selain wawancara juga melakukan observasi langsung di tempat yang bersangkutan di Desa Kimak.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman terbagi dalam tiga proses pengolahan data yaitu (a) reduksi data (*data reduction*) merupakan proses memilah data mentah yang didapatkan dari hasil lapangan, (b) penyajian data (*data display*) merupakan kumpulan informasi yang telah diatur secara sistematis, (c) penarikan kesimpulan merupakan bagian yang berisikan catatan inti dan penting berdasarkan hasil temuan dari penelitian (Sugiyono, 2016: 404-412).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa di Desa Kimak

Peran Badan Permusyawaratan akan diuraikan untuk melihat deskripsi mulai dari tugas dan fungsinya dalam pembangunan serta demokrasi lokal.

1. Deskripsi Kinerja dan Pemilihan BPD di Desa Kimak

BPD memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan serta mempunyai fungsi yang sangat penting diantaranya fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebagai fungsi legislasi, BPD sendiri berkewajiban untuk membuat dan menetapkan peraturan desa berdasarkan

kebutuhan masyarakat desa serta untuk kepentingan masyarakat, bersama Kepala Desa, selain itu sebagai lembaga demokrasi di desa, BPD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya, guna untuk mencapai kesejahteraan pada masyarakat Desa Kimak.

Seperti yang diungkapkan oleh Sukirno langsung dalam wawancara kepada peneliti sebagai berikut:

"Secara lokal, peran BPD sangat lah luarbiasa untuk membantu pembangunan desa, karena BPD mengacu pada UU nomor 11, fungsi BPD banyak akan tetapi, disamping dari segi pengawasan terhadap kinerja kepala desa, BPD juga istilahnya salah satu anggota dewan nya masyarakat yang menyampaikan seluruh aspirasi warga. dan banyak peran-peran BPD yang selama ini tidak dijalankan oleh BPD-BPD lain yang saya anggap agung. Dikarenakan begitu banyak kegiatan-kegiatan BPD yang dibatasi pada undang-undang nomor 9. Akan tetapi, dengan undang-undang nomor 11 BPD mendapatkan arah yang nyata. Dan itu secara lokal akantetapi ada secara umum BPD mempunyai rumah dan induk. Contohnya seperti kepala Desa itu ABDESI sedangkan BPD itu ABPEDESI dan saya sendiri menjabat koordinator ABPEDESI Provinsi Bangka Belitung..."

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam amanat Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan sistem demokrasi yang dimana pemilihan harus melibatkan masyarakat. Hal ini disampaikan juga oleh Sukirno ketua BPD Desa Kimak dalam wawancara sebagai berikut:

"Sistem pemilihan BPD saya kemarin itu benar-benar demokrasi jadi saya di pilih atas one man one vote bukan one man one delegasi tidak ada sitem delegasi dan juga pemilihan nya seperti pemilihan pemilu biasanya akan tetatpi yang membedakan nya pada pemilihan ketua dan pembagian jabatan saja yang kami lakukan dengan musyawarah"

BPD Desa Kimak benar-benar menjalankan demokrasi dikarenakan keterwakilan perempuan di Desa Kimak pada proses pemilihan BPD dijalankan sesuai dalam

regulasi undang-undang, Mersi juga menjelaskan tiga calon keterwakilan perempuan menjadikan contoh bahwasannya Desa Kimak dalam perihal demokrasi Desa terlalakan dengan semestinya berdasarkan wawancara sebagai berikut:

"2019 saya sudah gabung BPD, proses pemilihan waktu itu benar-benar demokrasi, saya mencalonkan BPD dikarena kan keterwakilan perempuan, jadi setiap pemilihan BPD itu ada keterwakilan perempuan tiga orang salah satunya saya sendiri, maka dari itu saya dapat keterwakilan BPD itu"

2. Fungsi Penyalur Aspirasi Masyarakat

BPD Desa Kimak memperhatikan segala kebutuhan ataupun keluhan yang ada pada masyarakat Desa Kimak itu sendiri. Hal ini juga disampaikan oleh Samsiar Ketua Karang Taruna Desa Kimak dalam wawancara:

"Menurut saya setiap aaepun kendala dalam masyarakat itu selalu diserap BPD, Banyak contoh nya seperti, jalan setapak, jalan apapun yang menjadi aspirasi untuk BPD dari masyarakat itu, BPD selalu menyampaikan itu ke Pemdes contoh nya, dengan adanya musdes atau rapat-rapat. Jadi menurut saya istilah masyarakat nya lah hamper 80 persen insyaallah lah menjalankan tugas nya dalam aspirasi masyarakat dan selalu bekerjasama dengan pemdes dan BPD lancar"

Pembangunan Desa Kimak semakin benar-benar berkembang dengan baik bukan halnya tidak ada yang tidak baik, akan tetapi dari 100 hanya 20 persen saja hal yang tidak baik nya, dengan hal itu dari 2019 setelah pemilihan ada beberapa tugas dan fungsi BPD yang terust-terusan dijalankan BPD Desa Kimak sehingga menurut bapak Ahirudin jelas memacukan perkembangan pada pembangunan Desa Kimak itu sendiri

"Seperti ini menurut saya aspirasi masyarakat ini tergantung anggaran yang dimana ketika anggaran itu ada allhamdulillah bakal dikabulkan, akan tetapi bertahap karena banyak dibagi dan juga ketika dana besar contohnya kemarin ada diajukan pemasangan tedmon air dan allhamdulillah dikabulkan walaupun

setelah tiga bulan mendatang dikarenakan ada yang lebih penting, jalan setapak kemarin itu dialihkan ke tedmonair dan juga waktu itu BPD kami sendiri terkait terkait pemasangan air shering dikarenakan ada daerah yang lebih rawan dan saya menyebutkan jangan hanya rumah yang dekat kalian saja yang difokuskan tetapi tolong dibagikan kepada daerah yang lain”

Desa Kimak memang sudah menjalankan peraturan tersebut dan Beliau mengatakan fungsi dan tugas BPD Desa Kimak dalam hal regulasi benar-benar dijalankan dengan sebaik mungkin dan juga regulasi dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Kimak itu sendiri. Adapun beberapa rancangan perdes yang sudah dirancang BPD dan pemdes Desa Kimak terkait Beberapa permasalahan yang ada dimasyarakat, seperti rancangan Peraturan Desa terkait Sawit Desa dan sawit Masyarakat Desa kimak itu sendiri, akan tetapi belum ditetapkan di Kabupaten. Seperti yang disampaikan oleh Andri selaku Sekretaris Desa mengenai fungsi legislasi di Desa Kimak sebagai berikut:

“Untuk pendapatan Desa Kimak sendiri pendapatan e berasal dari sawit desa yang dimana sawit tersebut untuk PADes, dan memang perusahaan di desa kimak sendiri tidak ada sama sekali dan menjadikan sawit desa sebagai PADes. Ada juga regulasi ataupun peraturan desa yang pemerintahan desa buat bersama BPD contohnya seperti perdes tanah Kkhas desa, perdes tentang sumbangan pihak ketiga dan juga perdes tentang pasar rakyat desa kimak. Allhamdulillahnya masyarakat menerima semua keputusan tersebut”

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kimak memberikan kontribusi yang nyata terhadap fungsi pengawasan yang ada di Desa Kimak dimana selama BPD mendapatkan saluran aspirasi masyarakat BPD harus selalu kongkrit dalam pelaksanaannya termasuk dalam proses pengawalan sistem pelaksanaannya maka dari itu BPD Desa Kimak harus melakukan Kontroling ataupun pengawasan dalam sistem pelaksanaan aspirasi masyarakat tersebut. Contohnya pun ada beberapa pengawasan yang BPD lakukan yakni pelaksanaan pembangunan Tedmon Air

dan pembangunan masjid di Desa Kimak itu sendiri, Adapun hal nya soal anggaran BPD selalu terus mengawasi pemerintahan desa khususnya Kepala Desa dalam proses penyusunan anggaran desa ataupun yang sering disebut APBDes dikarenakan Anggaran menjadi hal yang sangat bahaya dalam urusan pemerintahan Desa. Hal ini dijelaskan oleh Sukirno Ketua BPD desa Kimak sebagai berikut:

“Dalam hal pengawasan terhadap Keputusan kepala desa, BPD sudah berperan aktif terhadap tugasnya sebagai fungsi pengawasan, hal ini tercermin dalam adanya usulan-usulan atau saran-saran dari anggota BPD pada saat pelaksanaan sebuah keputusan kepala desa. Contohnya, Pengawasan terhadap keputusan kepala desa dalam pelaksanaan peraturan desa mengenai keputusan kepala desa tentang tanah Kas Desa, pelaksanaan fisik contohnya , pembangunan tedmon air, pembangunan masjid, pembangunan gedung bumdes, pembangunan gedung PKK dan dan perihal anggaran yang sangat lah urgeant dan harus benar-benar dengan keputusan dan harus melibatkan masyarakatat”

B. Faktor Pendukung dan Penghambat BPD dalam Memperkuat Demokrasi Lokal di Desa Kimak

Faktor Pendukung dan Penghambat BPD dalam memperkuat Demokrasi Lokal di Desa Kimak akan diuraikan untuk melihat deskripsi mulai dari faktor secara internal maupun eksternal.

1. Faktor Pendukung

Dalam proses Demokasi lokal tentu dilihat dari bagaimana satuan instansi dan lembaga suatu pemerintahan Desa dalam menjalankan Demokrasi lokal itu sendiri dan juga dilihat cara bagaimana sebuah instansi taupun lembaga pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat Demokrasi lokal tersebut ada beberapa faktor yang menjadikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai agen Demokrasi lokal untuk sebuah pencapaian yang pada akhirnya terjalankan sesuai pada keinginan masyarakat Desa tersebut. Adapun faktor pendukung BPD dalam memperkuat Demokrasi lokal tingkat Desa di Desa Kimak.

a) Secara Internal

Faktor pendukung BPD Desa Kimak dalam memperkuat Demokrasi lokal di Desa ialah tidak terlepas nya peran masyarakat dan kolaborasi antara pemerintahan Desa Kimak itu sendiri juga menjelaskan egaliter yang kuat yang menjadikan Demokrasi lokal di Desa Kimak terlaksana dengan baik, ditambah juga dengan komunikasi baik antara semua elemen masyarakat yang menambahkan keharmonisan dan loyalitas BPD sehingga keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa mempermudah BPD dalam mencari solusi ketika ada permasalahan apapun. Faktor pendukung inilah yang menjadikan BPD terus melaksanakan fungsi dan perannya sebagai agen Demokrasi lokal menjadi kuat, beberapa kegiatan demokrasi lokal yang dijalankan BPD Desa Kimak pun terlaksana dengan baik atas keterlibatan masyarakat yang sangat kuat, seperti contohnya pada kegiatan musyawarah desa, sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilihan baik pemilihan kepala desa maupun pemilihan BPD itu sendiri, sedikit demi sedikit peran faktor pendukung dalam BPD memperkuat demokrasi lokal terus dijalankan.

Seperti yang dijelaskan oleh Sukirno selaku ketua BPD Desa Kimak dalam wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya sendiri yang menjadi faktor pendukung kami BPD hanya masyarakat Desa dan pemerintah Desa juga, karena saya anggap kebersamaan kami untuk memajukan Desa ini Cuma kebersamaan itu saja yang menjadi faktor pendukung yang utama dan allhamdulillah nya masyarakat pada desa Kimak ini keterlibatan e untuk membangun desa ini tinggi”

Selain itu juga kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kimak telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam wujud demokrasi khususnya bagi masyarakat Desa Kimak dengan menyalurkan aspirasi politiknya. Sebagai lembaga independen/lembaga sosial dalam tata pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen Desa membawahi nuansa baru dalam

menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam kehidupan demokrasi. Hal yang serupa pun disampaikan Mersi sekretaris BPD Desa Kimak dalam wawancara;

“Pada dasarnya yang menjadikan faktor pendukung BPD desa Kimak ini ada pada masyarakat, karena desa Kimak ini masyarakatnya sangat-sangat membantu BPD dalam menjalankan berbagai kegiatan, dan juga keterlibatan masyarakat sudah sangat baik”

Adapun selain Egaliter yang kuat dibangun masyarakat dan pemerintahan Desa di Desa Kimak menjadikan salah satu faktor pendukung BPD dalam memperkuat Demokrasi lokal adapula soal finansial ataupun anggaran yang dimana hal ini juga bisa pada faktor pendukung bisa juga pada faktor penghambat, dari faktor pendukung jelas finansial menjadikan BPD aktif dalam setiap pembangunan Desa maupun memperkuat Demokrasi Lokal di Desa tersebut dikarenakan dengan gaji yang dulunya tidak memadai akan tetapi sekarang lebih memadai yang membuat masyarakat ingin mencalonkan dirinya pada pemilihan BPD. Hal ini juga dijelaskan Sukirno ketua BPD Desa Kimak dalam wawancara:

“.....selanjutnya juga ada faktor pendukung BPD ada pada finansial ataupun anggaran yang dimana saya melihat waktu dulu tidak sebanyak ini orang untuk daftar BPD yang dikarenakan gaji yang tidak memadai akan tetapi, sekarang terlihat jelas orang lebih banyak yang mendaftar BPD dikarenakan pendapatan sudah memadai....” (Wawancara 03 Juni 2022)

b) Secara Eksternal

Adapun faktor eksternal yang menjadikan faktor pendukung BPD dalam memperkuat Demokrasi lokal terdapat pada sistem hubungan kerjasama antara pihak luar atau pihak ketiga yang terus ada dalam membantu pembangunan Desa Kimak itu sendiri, sehingga mendorong BPD dalam proses penguatan Demokrasi lokal yang dimana hal ini harus terus dijaga dalam soal

relasi. Adapun hal ini juga disampaikan Erwin anggota BPD Desa Kimak dalam wawancara:

“Yang menjadi persoalan faktor pendukung BPD ada beberapa pihak luar ataupun pihak ketiga untuk membantu pembangunan Desa tersebut, contohnya pada proses pembangunan Mesjid dan pembangunan lainnya mereka siap membantu terkait hal itu, seperti anggota Dewan, dinas-dinas semacam itu, sehingga membuat mereka sebagai BPD untuk terus bergerak”

Dalam wawancara dengan Erwin tersebut menjelaskan ada pihak ketiga ataupun pihak luar dalam membantu proses pembangunan Desa Kimak itu sendiri yang menjadikan faktor pendukung BPD dalam memperkuat Demokrasi lokal yang dimana relasi yang dibangun BPD hingga saat ini menjadikan pihak luar untuk terus membantu dalam pembangunan Desa Kimak itu sendiri, hal ini juga menjadikan faktor pendukung eksternal BPD dalam memperkuat Demokrasi lokal sehingga membuat proses pembangunan Desa Kimak berjalan dengan baik.

2. Faktor Penghambat

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang ada di Desa yang memiliki peran yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi. Faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kimak dalam memperkuat Demokrasi lokal merupakan arah gerak suatu lembaga untuk menciptakan sebuah evaluasi kinerja secara akuntabel BPD itu sendiri. Adapun beberapa faktor penghambat BPD dalam memperkuat demokrasi lokal yaitu:

a) Secara Internal

Faktor internal BPD dalam memperkuat Demokrasi lokal terjadi pada soal Finansial yang dimana hambatan finansial yang menjadikan faktor BPD dalam pelaksanaan pembangunan sehingga berkurangnya keaktifan pada Anggota BPD sendiri dan juga dimana tiga tahun terakhir ini Indonesia dilanda pandemi covid yang

mengakibatkan semua yang berhubungan pada finansial atau pun anggaran dibatasi pemerintah pusat untuk sebuah pembangunan, inilah yang menjadikan hambatan tersendiri BPD maupun pemerintah Desa Kimak dalam hal finansial, akan tetapi tidak menjadikan sebuah persoalan besar bagi Desa Kimak dikarenakan Desa Kimak sendiri bisa menjalankan beberapa pembangunan yang dihasilkan pada dana Kas Desa. Hal ini juga di jelaskan Kodri Anggota BPD dalam wawancara sebagai berikut:

“Hambatan yang dirasakan BPD tidak ada akan tetapi terkadang BPD tugas nya hanya mengawasi dan pelaksanaan nya itu ada di pemerintahan Desa, bagi saya sendiri ada satu pas covid waktu lalu saya rasa menghambat gerak baik BPD maupun Pemerintahan Desa contohnya pada partisipasi masyarakat terbatas dan anggaran juga dibatasi oleh pemerintahan pusat pada salah satu fokus pembangunan”

Secara umum yakni jika anggota tidak melaksanakan tugasnya seperti kontroling dan eksekusi maka secara otomatis pelaksanaan pembangunan akan terhambat pula dikarenakan mereka sebagai agensi demokrasi lokal. Namun ada beberapa faktor yang di luar kendali internal anggota BPD itu sendiri seperti wacana-wacana Covid-19 yang memang menjadi persoalan multi-fungsi serta berdampak pada faktor finansial Desa Kimak itu sendiri

Pandemi covid dua tahun yang lalu sedikit membuat pengaruh dalam segi pelaksanaan demokrasi yang dimana partisipasi masyarakat terbatas dan juga membuat anggaran dalam pelaksanaan pembangunan berkurang sehingga fokus BPD dan pemerintah Desa tidak begitu fokus pada persoalan pembangunan. Akan tetapi Desa Kimak yang memiliki PADes terbesar se Provinsi Bangka Belitung membuat pemdes dan BPD Desa Kimak tidak berharap pada bantuan pemerintahan pusat pada persoalan anggaran. Hal ini juga di sampaikan oleh Sukirno Ketua BPD Desa Kimak dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Selama covid ini, ada yang terjalankan dan ada yang tidak karena terbentur oleh regulasi masalah covid, tetapi Desa Kimak sih alhamdulillah. Covid ataupun tidak covid, di Desa Kimak ini memiliki sistem pembangunan ataupun bantuan kita tetap terus berjalan mau seperti apapun bentuknya, Karena seperti hal tadi, disamping kita kuat secara PADes, kita kuat juga dalam segi hal sumbangan pihak ketiga, sehingga kita tidak terganggu dengan banyak hal-hal seperti itu”

Penegasan kembali terhadap faktor internal yang terjadi di Desa sebagai dampak dari regulasi Covid yang memberikan efek pada pembatasan anggaran-anggaran pembangunan tertentu. Regulasi covid-19 cenderung membatasi dan menghambat BPD dalam melakukan kontrol terhadap anggaran yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Distribusi tersebut bersifat terbatas pada program-program tertentu saja walaupun PADes dan Dana lainnya masih tersedia namun tentu langkah-langkah pengambilan keputusan BPD dalam sebuah pembangunan akan menjadi kunci penting dalam demokrasi lokal.

b) Secara Eksternal

Faktor eksternal yang terdapat pada sebuah demokrasi lokal tingkat desa jelas terjadi pada pemahaman masyarakat tentang acuan yang ada kepada pemerintahan desa khususnya pada BPD kemudian ada juga sebagian masyarakat yang notabane tidak memikirkan hal apapun terkait pemerintahan desa sehingga menganggap urusan pemerintahan hanya diurus para pejabat desa saja dan juga minimnya pemahaman masyarakat terkait fungsi dan peran BPD sehingga kontruksi tersebut membuat BPD Desa Kimak sulit dalam hal memperkuat demokrasi lokal. Hal tersebut disampaikan Ansori dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Seperti ini, memang tidak semua masyarakat tau dengan yang namanya BPD, hanya sedikit, jadi sebagian masyarakat memang tidak tau-menau dengan perkembangan BPD terutama

pada persoalan pembangunan, jadi istilahnya hanya ingin ambil hasilnya saja tanpa tau dengan proses di dalamnya”

Berdasarkan pernyataan Ansori, bahwasanya faktor eksternal yang dalam ini diluar kendali anggota BPD adalah beberapa masyarakat yang tidak mengikuti proses dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Masyarakat dalam kontruksi mereka hanya menginginkan hasil dari pembangunan itu sendiri dan tidak mementingkan dari proses dari pelaksanaan pembangunan yang dikontrol langsung oleh BPD.

C. BPD dan Bekerjanya Sistem Demokrasi Lokal

Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks, ada hal nya salah satu kompleks ialah adanya Demokrasi Lokal, yang dimana Demokrasi lokal dapat dimaknakan bahwasannya memahami demokrasi lokal memang tak dapat memisahkan diri dari perbincangan tentang kebijakan desentralisasi. Mengingat kebijakan ini merupakan pintu awal bagi terciptanya demokrasi lokal. Bahkan sejumlah ilmuwan meyakini bahwa tujuan yang sesungguhnya dari desentralisasi tidak lain adalah menumbuhkan demokrasi lokal (Suyatno, 2016: 214-215).

Menurut Sisk (2002:15-16) untuk menciptakan situasi yang demokratis, harus ditopang oleh kuatnya demokrasi dalam level lokal. Karena tumbuhnya demokrasi lokal pada nantinya akan menjadi tulang punggung dari perkembangan proses demokratisasi yang berbasis masyarakat. Dalam memahami konsep demokrasi lokal, ada empat hal yang harus diperhatikan:

1. Partisipasi Masyarakat

Yang dimana peran serta masyarakat lokal merupakan fondasi utama dalam gagasan modern mengenai kewarganegaraan agar supaya demokrasi dapat terwujud, dimana suara individu didengarkan oleh pemerintah (Sisk, 2002:15)

2. Adanya Proses Musyawarah

Demokrasi tidak sekedar pemilu, tetapi juga mencakup dialog yang bermuara pada pencarian solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat (Sisk, 2002: 15).

3. Pendidikan Politik

Demokrasi lokal memberikan fasilitas bagi tiap-tiap individu masyarakat untuk dapat memperoleh informasi mengenai semua urusan publik. Warga yang terdidik juga membuat demokrasi menjadi lebih efektif, termasuk juga peran masyarakat berarti mengurangi konflik vertikal antara elit lokal dengan warga masyarakat (Sisk, 2002: 15)

4. Pemerintahan yang baik dan Kesejahteraan Sosial

Demokrasi yang baik harus menciptakan hubungan yang baik antar warganya serta dapat membangun masyarakat yang mandiri dan memiliki semangat sosial (Sisk, 2002: 16). Jika ditinjau berdasarkan konsep demokrasi lokal Timothy D. Sisk di atas, pembangunan Desa di Desa Kimak akan lebih terlaksana apabila adanya suatu akselerasi dari peran dan fungsi BPD. Hal ini menjelaskan bahwa pembangunan baik secara infrastruktur maupun suprastruktur akan menciptakan situasi yang demokrasi apabila di dalamnya telah terpenuhi beberapa kriteria diantaranya yaitu dengan memaksimalkan partisipasi masyarakat, adanya proses musyawarah, pendidikan politik dan pemerintahan yang baik dalam membentuk kesejahteraan sosial.

5. Partisipasi Masyarakat

Langkah yang pertama yakni dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dikatakan demikian karena pada taraf lokal masyarakat merupakan sebuah struktur yang disebut sebagai *Civil Society*. *Civil Society* merupakan sekumpulan individu, kelompok masyarakat adat yang memproduksi sebuah budaya dan memiliki tujuan yaitu mengendalikan instrumen-instrumen kekuasaan. *Civil Society* secara umum disebut sebagai masyarakat sipil yang memiliki status tertinggi dalam sebuah negara. Sehingga berkaitan dengan penelitian ini, maka peran aktif masyarakat sebagai bentuk partisipasi di Desa Kimak pada proses pembangunan sangat dibutuhkan karena mereka sebagai struktur

utama dalam masyarakat yang akan mengendalikan setiap proses pengambilan keputusan oleh eksekutif yakni Pemerintah Desa maupun lembaga legislatif yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik itu melalui Musyawarah Desa ataupun Rapat-rapat membahas rancangan pembangunan Desa maupun Anggaran Desa.

6. Proses Musyawarah

Proses musyawarah dalam pengambilan keputusan baik itu dalam pembangunan maupun hal-hal yang menyangkut dengan demokrasi lokal. Musyawarah pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi yang berorientasi pada sifat egaliter masyarakat. Musyawarah merupakan langkah politis yang dilakukan berbagai individu, kelompok atau masyarakat untuk menemukan sebuah kesepakatan. Musyawarah mempermudah masuknya daya kritik bagi siapapun yang merasa tidak sepakat akan suatu keputusan tertentu. Komunikasi menjadi patokan utama dalam suatu musyawarah dengan tujuannya yaitu menghilangkan instrumen-instrumen kepentingan politik. Demokrasi tidak hanya sekedar dikonstruksikan sebagai pemilu, tetapi demokrasi mencakup semua dialog yang bermuara pada pencarian solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Jelas, kaitannya dengan proses pembangunan di Desa Kimak tidak terlepas dari peran BPD yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan ruang-ruang komunikatif bagi masyarakat untuk memberikan saran dan aspirasi mereka. Sehingga Desa Kimak secara musyawarah masih terjalankan dengan baik dengan tinjauannya yaitu masih berjalannya musyawarah Desa dalam berbagai pembahasan, contohnya pada pembahasan mengenai penyusunan APBDes khususnya pada program pembangunan, baik jangka panjang maupun jangka pendek yang tentunya melibatkan masyarakat.

7. Pendidikan Politik

Pendidikan politik melalui edukasi-edukasi yang dilakukukan oleh BPD Desa Kimak yakni dengan mengikutsertakan masyarakat dalam rapat-rapat Desa dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pendapat. Proses edukasi politik sebagai pendidikan politik di Desa Kimak terjadi pada pemenuhan

informasi-informasi publik yang terbuka secara bebas dan didapatkan oleh masyarakat secara langsung. Sehingga masyarakat secara edukasi akan memberikan dampak positif yaitu dukungan terhadap pembangunan yang bersifat utilitarianistis atau nilai-nilai tanpa konflik di dalamnya.

8. Pemerintahan yang baik dan Kesejahteraan Masyarakat

Keempat merupakan tinjauan terakhir yakni pelaksanaan Pemerintahan yang baik dalam membentuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan secara lokal dibagi menjadi Pemerintah Desa dan lembaga legislatifnya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kesenambungan peran dari masing-masing *stakeholder* sebagai bentuk *good governance* akan menciptakan suatu pembangunan yang menekankan pada kesejahteraan masyarakat. Desa Kimak sebagai salah satu Desa yang secara pelaksanaan pemerintahannya terbilang baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga membentuk solidaritas masyarakat yang kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa baik secara infrastruktur maupun suprastruktur.

D. BPD Sebagai Inovasi Dalam Penguatan Demokrasi Lokal

Pada dasarnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hadir sebagai lembaga maupun agen demokrasi yang diperkhususnya untuk menjaga stabilitas baik dari segi pembangunan, kesejahteraan, maupun beberapa sektor ekonomi lokal. Hal ini juga menjadi titik fokus utama bagaimana demokrasi lokal dapat tercapai sebagaimana bentuk upaya untuk pemerataan di berbagai wilayah yang tersebar khususnya dalam sebuah Negara. Negara secara ideal membutuhkan berbagai agen dalam memperkuat demokrasi lokal. Agen tersebut tidak hanya dikonotasi atau justifikasi pada pemerintah saja secara kelembagaan, namun peran politis dari perwakilan juga dibutuhkan seperti Anggota Legislatif baik tingkat Nasional, Regional maupun lokal. Agen politis yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan Badan Permusyawaratan Desa.

Tinjauan tersebut dimaksudkan untuk melihat sejauh mana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

memberikan berbagai inovasi berdasarkan tindakan mereka. Agen yang demikian secara individual secara komitmen mempunyai visi serta misi dalam menjaga stabilitas bahkan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pembangunan fisik maupun pembangunan manusia atau *Human Development Indeks*. Akselerasi dari visi dan misi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilihat melalui tindakan politik sebagai kontekstual hadirnya eksistensi anggota perwakilan. Beberapa faktor penting yang berpengaruh dalam pengembangan inovasi pemerintah daerah adalah sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, aspek kepemimpinan, infrastruktur, manajemen informasi, dan lingkungan bisnis (Firdaus dan Arnidiana: 23).

Inovasi yang dihadirkan berdasarkan peran BPD dilaksanakan konsisten dan memberikan efek secara kontinyu. Inovasi yang diupayakan pula hadir sebagai bentuk perwujudan bagaimana BPD melaksanakan konsep besar dari Demokrasi yang tersebar di wilayah lokal. Sehingga penguatan demokrasi lokal yang dilakukan BPD adalah memberikan inovasi ideal secara konseptual dan massif agar tercapainya kesejahteraan secara kolektif.

IV. KESIMPULAN

A. Penutup

Demokrasi pada dasarnya tidak akan lepas dari pelaksanaan otonomi daerah dan tinjauan demokrasi pada taraf lokal yang menjadi tombak pembangunan. Pembangunan sendiri diartikan sebagai suatu usaha dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya pada taraf Desa. Tindakan-tindakan politik nampak akan dipergunakan dalam pengambilan keputusan dalam sebuah pembangunan. Pada ruang lingkup pembangunan lokal tentu tidak akan terlepas dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sebagai agen-agen kontroling serta pengawasan terhadap realisasi pelaksanaan segala bentuk pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur yang dilaksanakan pemerintahan Desa.

Berkaitan dengan isu-isu pembangunan, BPD nampaknya menjadi lembaga *stakeholder* yang memungkinkan terjadinya suatu pengendalian pembangunan yang mengarah pada nilai-nilai atau utilitarianistis. Hal tersebut terkandung dalam fungsi BPD sesuai

dengan amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 55 tentang Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi diantaranya yaitu perancangan sebuah aturan sebagai bentuk legislasi, melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa dan menggali segala bentuk aspirasi masyarakat. Sehingga segala bentuk kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa yang bersinergi dengan BPD khususnya pada pembangunan akan terjalankan secara maksimal.

Menggunakan konsep demokrasi lokal dari gagasan Timothy D. Sisk khususnya pada proses pembangunan terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi dalam pelaksanaannya dan tentu BPD sebagai agen demokrasi lokal yang ikut berperan aktif. Pertama dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan baik itu infrastruktur maupun suprastruktur di Desa Kimak. Kedua memaksimalkan proses musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Ketiga, pentingnya edukasi sebagai langkah awal pendidikan politik oleh BPD Desa Kimak kepada masyarakat supaya masyarakat memiliki kekuatan untuk ikut mengawal isu-isu pembangunan khususnya di tingkat Lokal. Keempat, pemerintahan yang baik atau *good governance* dalam menciptakan kesejahteraan sosial melalui pembangunan serta melibatkan segala unsur ataupun elemen masyarakat di Desa Kimak.

Keterkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini disimpulkan bahwasannya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kimak menjadikan lembaga legislatif Desa atau BPD sebagai agen mitra Eksekutif Desa dengan melakukan kolaborasi kinerja, sehingga terjadinya realisasi terhadap segala bentuk pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur yang dilaksanakan pemerintahan Desa, dan juga dengan hal itu penguatan Demokrasi Lokal tingkat Desa yang dilakukan BPD bisa dijalankan dengan semestinya, walaupun ada beberapa faktor yang menjadi penghambat BPD dalam hal itu.

B. Saran

Untuk penelitian yang akan datang bagi peneliti selanjutnya disarankan agar bisa melakukan menggali lebih dalam kendala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta

melihat potensi dari inovasi berbasis teknologi sebagai upaya memaksimalkan partisipasi masyarakat berdasarkan asas keterbukaan demi tercapai demokrasi lokal secara massif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, sehingga penelitian dapat selesai dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Fitri. 2021. *Politik Demokratisasi Desa (Analisis Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Karanghegar Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang)*. Subang: Universitas Jendral Soedirman.
- Ansyar, Muhammad, 2017. *Transformasi Demokrasi Desa Melalui Musyawarah Desa Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, DIY*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Stpm "Apmd" Yogyakarta.
- Dahl, Robert. 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Dhedhu, Fransiskus. 2021. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Demokrasi Lokal (Studi Kasus Di Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo)*. Kupang: Universitas Nusa Cendana.
- Firdaus, Imansyah Abinda & Arnidiana. 2021. *Strategi Kota Bekasi Dan Kota Jambi Dalam Pengembangan Inovasi Digital Dan Kreativitas Masyarakat*. Jurnal Studi Inovasi, Vol. 1, No. 1, 2021
- Mukhtar, 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Noviati, Cora Elly. 2013. *Demokrasi dan Sistem Pemerintah*. Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 2, Juni 2013
- Nugroho, Heru, 2012. *Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada, Vol.I, No. 1, 2013

- Rahman, Bustami & Ibrahim, 2009. *Menyusun Proposal Penelitian*. Pangkalpinang: UBB Press
- Sisk, Timothy D, 2002. *Demokrasi di Tingkat Lokal: Buku Panduan Internasional Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Pemerintahan*. Jakarta: Internasional IDEA.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suyatno. 2016. *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia*. Indonesian Political Science Review, Vol. 1, No. 2, 2016
- Wahyuningrum, Oktofia, Erfin, 2015. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya memperkuat Demokrasi Lokal Di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara*. Universitas Negeri Semarang
- Yulistyowati, Efi., Pujiastuti, Endah & Mulyani. 2016. *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 18, No. 2, Desember 2016



Korespondensi

Email : noormaliana2azan@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

PENERAPAN PEMBELAJARAN MODEL DISCOVERY LEARNING SEBAGAI INOVASI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR KIMIA

Noormaliana

MAN 3 Kota Banjarmasin | Jl. Batu Benawa Raya No.32, Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70115

Disetujui: 25 Januari 2023

Abstract

This study aimed to improve students' chemistry learning outcomes using the Discovery Learning model in the form of achieving learning objectives in the material of Chemical Equilibrium and Equilibrium Shifts. The research method used was Classroom Action Research (CAR) with two cycles and two meetings in each cycle. The activities carried out in each cycle were planning, action implementation, observation and interpretation, analysis and reflection. The participants in this study were 33 students of class XII IPA 3 MAN 3 Banjarmasin. From the results of this study, it can be concluded that the application of the Discovery Learning model was able to improve learning outcomes in Chemistry lessons. The increase in learning outcomes could be seen from the increase in the average pretest and posttest scores from 66,7 to 72,1. In cycle 2 there was also an increase in the average score from 78,5 to 88,8. From the comparison of the average posttest scores in cycles 1 and 2, there was a very significant increase in average results with a total of 16.7 points. That way, the Discovery Learning model can be used by teachers by preparing themselves to be good at motivating, guiding and directing students in completing learning.

Keywords: Learning, Discovery Learning Model, Innovation, Learning outcomes, Chemical

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar kimia siswa menggunakan model *Discovery Learning* dalam bentuk tercapainya tujuan pembelajaran pada materi Kestimbangan Kimia dan Pergeseran Kestimbangan. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan dua siklus dan dua pertemuan di tiap siklusnya. Aktivitas yang dilakukan di tiap siklus adalah perencanaan, implementasi tindakan, observasi dan interpretasi, analisis dan refleksi. Partisipan penelitian ini merupakan siswa kelas XII IPA 3 MAN 3 Kota Banjarmasin yang berjumlah 33 orang. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan model *Discovery Learning* mampu meningkatkan hasil belajar pelajaran Kimia. Peningkatan hasil belajar tersebut bisa dilihat dari peningkatan nilai rata-rata Pretest dan Posttest dari 66,7 menjadi 72,1. Di siklus 2 juga terjadi peningkatan nilai rata-rata dari 78,5 menjadi 88,8. Dari perbandingan nilai rata-rata posttest di siklus 1 dan 2, terdapat peningkatan hasil rata-rata yang sangat signifikan dengan jumlah 16,7 poin. Dengan begitu, model *Discovery Learning* bisa digunakan oleh guru dengan cara menyiapkan diri untuk pandai memotivasi, membimbing dan mengarahkan siswa dalam menyelesaikan pembelajaran.

Kata Kunci: Pembelajaran, Model *Discovery Learning*, Inovasi, Hasil Belajar, Kimia

I. PENDAHULUAN

Kurikulum 2013 memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam pembelajaran sehingga perlu adanya suatu strategi atau model pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan (Nugrahaeni et al., 2017). Menurut Manihar (2013) permasalahan mutu pendidikan di sekolah menengah cukup beragam terkhusus permasalahan yang ditemukan adalah belum meratanya kualitas pembelajaran yang dirasakan oleh siswa (Semirata & Lampung, 2014). Melalui inovasi pembelajaran menggunakan strategi ataupun model yang beragam berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dirasakan di sekolah-sekolah.

Menurut Winarni (2013) pembelajaran yaitu implikatif antar siswa menggunakan model yang diterapkan di kelas pada proses pemerolehan pengetahuan dengan tujuan terjadinya perubahan yang lebih baik (Arfianawati et al., 2016). Lalu menurut Amir dalam guru mempertimbangkan model yang digunakan pada pembelajaran diantaranya pada aspek kondisi, suasana kelas, dan komponen pembelajaran yang mempengaruhi penggunaan model (Hamzah, 2020).

Menurut Nurdin (2016) pada pembelajaran menggunakan model *Discovery Learning* akan memberikan pengaruh dalam peningkatan hasil belajar yang lebih baik (Nurdin, 2016). Melalui penelitian Ninok dkk (2017) pembelajaran menggunakan *Discovery Learning* dianggap efektif diterapkan dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada jenjang SMA sederajat (Sumianingrum & Wibawanto, 2017). Sehingga melalui model ini diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan hasil belajar siswa di kelas pada pelajaran kimia di MAN 3 Kota Banjarmasin.

Menurut Bilam (2009) model *Discovery Learning* merupakan model yang mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran dimulai dari pengamatan hingga simpulan sesuai dengan temuan siswa (Atika et al., 2018). Lalu menurut Vahria dan Rina (2016) *Discovery Learning* merupakan belajar untuk mencari, menyoediki dan menemukan sendiri oleh siswa dan sekaligus proses pembelajaran

mental untuk menemukan konsep baru atau suatu prinsip-prinsip baru (Sari et al., 2017). Dari pendapat-pendapat tersebut, *Discovery Learning* dapat disimpulkan bahwa merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk melakukan dari pengamatan, observasi, analisis hingga penyimpulan yang menghasilkan suatu konsep maupun prinsip baru sesuai materi-materi yang telah ditetapkan.

Adanya penurunan hasil belajar siswa kelas XII IPA 3 di MAN 3 Kota Banjarmasin disebabkan monotonnya pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Penurunan tersebut dilihat dari hasil belajar siswa memperoleh nilai dibawah 75, yang mana nilai tersebut adalah batas KKM yang perlu diperoleh siswa. Hal itu terjadi karena model yang diterapkan pada pembelajaran secara monoton akan cenderung menghasilkan pembelajaran yang membosankan maupun menurunnya hasil belajar siswa (Hamzah, 2020).

Inovasi perlu dilakukan untuk dalam perbaikan pembelajaran di kelas. Hal ini bukan hal yang baru untuk dilakukan dan harus dilakukan sebagai upaya pemberian solusi atas masalah yang ditemukan (Meipiani et al., 2021). Inovasi yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan model *Discovery Learning* dalam menyelesaikan pembelajaran di kelas.

Discovery Learning digunakan pada pembelajaran untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ditemukan pada lingkungan siswa (Komalasari, 2017). Adapun tahapan atau prosedur model *Discovery Learning* di kelas dilakukan sebagai berikut (1) *Stimulation* yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan cara tanya-jawab, mencari informasi melalui referensi yang tersedia dan kegiatan lainnya dengan tujuan persiapan pemecahan masalah; (2) *Problem statement* yaitu identifikasi sebanyak mungkin yang dilakukan siswa dengan memperhatikan relevansi antara indikator masalah dan materi ajar; (3) *Data Collection* yaitu kesempatan kepada siswa untuk mengonfirmasi informasi ataupun data yang ditemukan untuk membuktikan validasi data tersebut hingga menghasilkan hipotesis; (4) *Data Processing* yaitu pengolahan data dan informasi yang telah divalidasi melalui wawancara, observasi dan sebagainya lalu menganalisis tersebut; (5) *Verification* yaitu

memeriksa dan mencermati hasil data yang diperoleh untuk membuktikan hasil hipotesis yang ditetapkan siswa melalui dihubungkan dengan hasil data *processing*; (6) *Generalization* yaitu kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip dan berlaku untuk semua kejadian (Mawaddah & Maryanti, 2016).

Harapan dalam menyelesaikan masalah menggunakan model *Discovery Learning* mampu tercapainya tujuan pembelajaran pada materi Kesetimbangan Kimia dan Pergeseran Kesetimbangan. Hipotesis dari penelitian melalui penerapan model pembelajaran *Discovery Learning* untuk meningkatkan hasil belajar kimia berupa peningkatan hasil belajar yang mencapai lebih dari KKM yang telah ditetapkan. Hipotesis tersebut ditinjau dari penelitian Ratna dan Antin (2022) pembelajaran menggunakan model *Discovery Learning* dapat meningkatkan hasil belajar siswa di SMAN 1 Papar Kediri (Dewi et al., 2022).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di kelas XII IPA 3 MAN 3 Kota Banjarmasin yang terletak di Jl. Batu Benawa Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2022/2023 pada semester ganjil selama 2 bulan di bulan Juli sampai September. Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan sebanyak dua siklus. Penelitian tindakan kelas dimulai dari pra-siklus yang akan dilaksanakan pada pertengahan Januari lalu dilanjutkan siklus 1 dan siklus 2.

Subjek penelitian tindakan kelas adalah siswa yang duduk di kelas XII IPA 3 MAN 3 Kota Banjarmasin dengan jumlah siswa 33 orang yang terdiri dari 6 siswa putra dan 27 siswi putri. Adapun objek penelitian ini berupa mata pelajaran kimia pada materi Kesetimbangan Kimia dan Pergeseran Kesetimbangan.

Metode penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 2 siklus. Tiap-tiap siklus disusun sesuai rencana berikut yaitu perencanaan, implementasi tindakan, observasi dan interpretasi, analisis dan refleksi. Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan dengan tujuan menyelesaikan masalah yang ditemukan dan mencari jawaban dari permasalahan yang ada di kelas secara ilmiah (Wijaya & Syahrums, 2014).

Melalui Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan sebanyak 2 siklus, setiap siklus dilakukan sebanyak 2 pertemuan. Langkah ini bertujuan untuk adanya kolaborasi dan adaptasi antara guru dan siswa dengan model pembelajaran yang akan diterapkan. Agar penelitian ini berjalan lancar dan berhasil sesuai dengan hipotesis yang telah dituangkan dalam tulisan ini maka peneliti menyusun tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian tindakan kelas, adalah: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) refleksi.

Tahapan pertama dimulai dari perencanaan penelitian diantaranya adalah menganalisis masalah yang ditemukan dan mengasumsikan solusi dari masalah tersebut dengan menggunakan model *Discovery Learning* dalam pelaksanaan pembelajaran berlangsung. selain itu menjalin koordinasi dengan selaku pengamat dan supervisi. Perencanaan pada aspek administrasi berupa penyusunan silabus, rancangan pelaksanaan pembelajaran, lembar kerja siswa hingga lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa.

Pelaksanaan penelitian di kelas peneliti menjadi guru yang mengajarkan model *Discovery Learning* dan meminta kepada kepala madrasah menjadi pengamat dan guru senior menjadi supervisi selama berlangsungnya pembelajaran. Pengamat dan supervisi bertugas untuk memberikan penilaian atas kinerja guru dalam menerapkan model tersebut, selain itu memberikan masukan dan perbaikan apabila ditemukan. Sehingga dari penilaian dan masukan tersebut akan bermanfaat untuk guru dalam memperbaiki pembelajaran pada siklus selanjutnya dan adanya peningkatan hasil belajar siswa.

Hasil dari observasi yang dilakukan oleh pengamat dan supervisi yang termuat dari kumpulan kertas-kertas penilaian, peneliti selagu guru pengajar melakukan analisis. Hasil dari analisis guru dapat melakukan refleksi dan menghasilkan rekomendasi yang perlu dilakukan pada siklus selanjutnya. Apabila hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar dari sebelumnya dan pemerolehan nilai peserta didik rata-rata diatas KKM maka model yang digunakan berhasil dan penelitian bisa diselesaikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Angka-angka yang ditemukan dari data hasil belajar siswa pada materi Kesetimbangan Kimia dan Pergeseran Kesetimbangan serta lembar observasi dianalisis untuk membuktikan hipotesis yang telah ditulis dalam penelitian ini. Hasil belajar siswa didapat dari hasil pengerjaan tugas atau tes yang diberikan oleh guru di kelas, hasil tersebut akan dibahas pada penelitian ini. Hasil belajar yang muat dalam penelitian ini adalah hasil tes pra-siklus, siklus 1 dan siklus 2. Pada siklus 1 dan siklus 2 dilakukan tes berupa pretest dan post test. Tes tersebut untuk menunjukkan peningkatan atau penurunan hasil belajar siswa pada siklus tersebut dan pada tiap siklus. Hasil dari tes tersebut termuat pada table 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Perolehan hasil belajar siswa kelas XII IPA 3 sebelum dan sesudah tindakan

Keterangan	Pra-Siklus	Siklus 1		Siklus 2	
		Pretest	Posttest	Pretest	Posttest
Nilai Tertinggi	80	80	80	90	100
Nilai Terendah	60	60	70	70	80
Rata-Rata	66,7	72,1	74,8	78,5	88,8
Ketuntasan	2 Siswa	8 Siswa	16 Siswa	27 Siswa	33 Siswa

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan setiap siklus. Peningkatan terlihat dari nilai rata-rata ketika dilakukannya pembelajaran menggunakan model *Discovery Learning*. Selain itu, jumlah ketuntasan juga terjadi peningkatan setiap siklusnya. Maka melalui table diatas bisa disimpulkan penggunaan model *Discovery Learning* dianggap berhasil dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas XII IPA 3 MAN 3 Kota Banjarmasin.

Selain itu, pada keaktifan belajar siswa di kelas terjadinya peningkatan pada setiap indikatornya. Ini menunjukkan penggunaan model *Discovery Learning* memberikan dampak kepada siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran kimia. Peningkatan keaktifan siswa menggunakan model *Discovery Learning* terlihat melalui table dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Lembar Observasi

No	Indikator Siswa	Presentasi Pertemuan 1 (%)	Presentasi Pertemuan 2 (%)	Presentasi Pertemuan 3 (%)	Presentasi Pertemuan 4 (%)
1	Melakukan Pengamatan	61	70	76	88
2	Melakukan diskusi	52	55	67	85
3	Keterampilan bertanya	58	55	61	82

No	Indikator Siswa	Presentasi Pertemuan 1 (%)	Presentasi Pertemuan 2 (%)	Presentasi Pertemuan 3 (%)	Presentasi Pertemuan 4 (%)
4	Keterampilan menjawab pertanyaan	48	64	70	88
5	Membuat kesimpulan	48	61	76	82

Tabel diatas bisa disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan persentasi keaktifan siswa dalam menjalani proses pembelajaran menggunakan *Discovery Learning*. Melalui model ini terlihat pada setiap pertemuan terjadi peningkatan dan tidak ada indikator yang mengalami penurunan pada setiap pertemuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menggunakan model *Discovery Learning* pada pembelajaran kimia dengan materi Kesetimbangan Kimia dan Pergeseran Kesetimbangan mampu meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa di dalam kelas.

B. Pembahasan

Pembelajaran menggunakan model *Discovery Learning* terbukti efektif dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa sehingga meningkatnya hasil belajar mereka. Peningkatan hasil belajar terlihat dalam hasil observasi dan hasil belajar siswa. Karena model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mekpresikan diri dalam pembelajaran di kelas. Selain itu, siswa mampu berpatisipasi dalam membantu siswa yang lain untuk menemukan informasi baru pada materi Kesetimbangan Kimia dan Pergeseran Kesetimbangan.

Pemaparan data hasil belajar yang tertuang pada table 1 menunjukkan pada siklus 1 pada *pretest* siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dengan hasil 80 dan Adapun nilai terendah dengan hasil 60, tetapi nilai rata-rata pada siklus 1 pada *pretest* mendapatkan hasil 72,1. Selanjutnya pada *posttest* di siklus 1 nilai tertinggi dengan hasil 80 dan nilai terendah dengan hasil 70 serta rata-rata pada *posttest* dengan hasil 74,8. Pada simpulan siklus 1 ditemukan sebelum dilaksanakan model *Discovery Learning* siswa banyak mendapatkan nilai dibawah KKM ditunjukkan dengan nilai rata-rata 72,1. Lalu, setelah dilaksanakan pembelajaran model *Discovery Learning* terjadinya peningkatan hasil belajar dilihat dari nilai-rata 74,8. Hal ini dianggap baik terjadinya peningkatan tetapi perlu adanya perbaikan

disebabkan pemerolehan mayoritas siswa belum mencapai KKM.

Siklus 2 menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar yang diperoleh siswa. Peningkatan tersebut dilihat dari hasil *pretest* yaitu nilai tertinggi dengan hasil 90 dan nilai terendah dengan hasil 70 selain itu, pada nilai rata-rata pada siklus 2 di *pretest* dengan hasil 78,5. Lalu setelah dilakukan pembelajaran menggunakan model *Discovery Learning* menunjukkan hasil pada *posttest* yaitu nilai tertinggi dengan hasil 100 dan nilai terendah 80, lalu pada nilai rata-rata di *posttest* tersebut mendapatkan hasil 88,8. Walaupun pada siklus 2 menunjukkan hasil rata-rata 78,5 pada nilai *pretest* yang menghasilkan diatas KKM tetapi guru menganggap perlu melanjutkan pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.

Model *Discovery Learning* berpengaruh tidak hanya pada kognitif tetapi juga pada keaktifan siswa. Melalui pembelajaran yang melibatkan siswa untuk melakukan pengamatan, diskusi hingga menyimpulkan hasil temuan akan memaksa siswa secara sadar untuk mengikuti proses pembelajaran hingga selesai. Pada siklus 1 keaktifan siswa tidak dirasakan secara menyeluruh. Karena pada materi Kesetimbangan Kimia dan Pergeseran Kesetimbangan masih memuat KD 3.8 yaitu menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara pereaksi dan hasil reaksi.

Pada KD 3.8 guru baru memulai materi baru yang diajarkan di kelas selain itu, siswa baru mengenal materi yang diajarkan sehingga keaktifan siswa kurang dirasakan. Pada siklus 1 memberikan informasi terkait reaksi kesetimbangan melalui gambar-gambar maupun video. Selain itu, siswa juga memperkaya informasi yang didapat dari guru melalui pencarian informasi melalui dunia maya ataupun sumber-sumber lain yang relevan. Sehingga pada pertemuan disiklus pertama lebih banyak melakukan pengamatan untuk mendapatkan informasi termait materi yang diperlukan.

Pertemuan kedua guru melanjutkan kegiatan pembelajaran sesuai rancangan yang telah disusun. Pada pertemuan kedua guru menentukan tujuan sesuai KD 3.9 yaitu menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Pada pertemuan pertama guru menugaskan kepada siswa untuk mencari informasi maupun data yang diperlukan,

pertemuan kedua guru membentuk kelompok secara acak untuk mengumpulkan hasil data yang ditemukan dan menganalisisnya untuk menemukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi.

Pertemuan kedua terjadinya peningkatan aktifitas hasil belajar karena dibentuknya kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Pertukaran data dan analisis yang dilakukan antar siswa meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Karena adanya pengelompokan kepada siswa memberikan dampak pada peningkatan keaktifan siswa pada indikator keterampilan menjawab pertanyaan dan membuat simpulan yang signifikan. Walaupun adanya peningkatan keaktifan siswa tetapi masih dirasakan banyaknya siswa yang kurang aktif.

Siklus 2 guru melakukan perbaikan pada perubahan kelompok belajar. Kelompok yang dibentuk berupa dibaginya siswa-siswi yang memiliki kompetensi yang menonjol dan mendapatkan hasil belajar diatas KKM pada pertemuan sebelumnya. Dibaginya siswa-siswi tersebut bertujuan membantu siswa lain yang sekelompok dengan mereka dan meningkatkan aktifitas siswa-siswi dikelas secara signifikan. Ini dianggap berhasil karena terjadinya peningkatan keaktifan siswa pada pertemuan ketiga, pertemuan ini guru menentukan tujuan pembelajaran pada KD 3.10 yaitu menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan. Maka guru menganggap perlu adanya kolaborasi yang saling membantu dan kompetitif untuk mewujudkan ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Dipertemuan terakhir pada siklus 2 guru mengajar siswa melakukan pembelajaran di laboratorium untuk meningkatkan pengetahuan yang didapat tentang kesetimbangan kimia dan pergeseran kesetimbangan. Pembelajaran tetap menggunakan kelompok yang sama dan memberikan penugasan praktek kepada siswa dengan alat dan bahan yang tersedia. Pada akhir pembelajaran siswa kembali melakukan ujuk kerja dari hasil praktek yang telah dilakukan. Pada hasil pembelajaran dipertemuan keempat aktifitas sangat dirasakan sehingga pembelajaran dirasa efektif.

Melalui rangkaian pembelajaran yang telah dilakukan terjadinya peningkatan pada

hasil belajar dan keaktifan siswa di dalam kelas. Model *Discovery Learning* dianggap efektif diselenggarakan dalam pembelajaran karena pada rata-rata hasil belajar pada setiap pertemuan adanya peningkatan dan pada hasil observasi keaktifan siswa juga terjadinya peningkatan persentasi. Maka dapat disimpulkan model *Discovery Learning* positif mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada keals XII IPA 3 MAN 3 Kota Banjarmasin.

IV. KESIMPULAN

Hasil dari analisa pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan model *Discovery Learning* mampu meningkatkan hasil belajar pada pelajaran Kimia. Peningkatan hasil belajar tersebut bisa dilihat dari peningkatan hasil belajar pada siklus 1. *Pretest* dan *Posttest* mendapat hasil rata-rata 66,7 menjadi 72,1. Kenaikan nilai yang diperoleh dari nilai rata-rata tersebut dengan selisih 4,3 poin. Pada siklus 2 terjadi peningkatah hasil belajar pada *pretest* dan *posttest* dengan hasil rata-rata 78,5 menjadi 88,8. Kenaikan nilai yang diperoleh dari nilai rata-rata tersebut dengan selisih 10,3. Dan perbandingan nilai rata-rata *posttest* dari siklus 1 dan siklus 2 terdapat peningkatan hasil rata-rata yang sangat signifikan dengan jumlah 16,7 poin. Peneliti memberikan saran kepada para peneliti yang akan menggunakan model *Discovery Learning* dalam pembelajaran Kimia yaitu Guru agar menyiapkan diri untuk pandai memotivasi, membimbing dan mengarahkan siswa dalam menyelesaikan pembelajaran menggunakan model ini, karena siswa yang tidak terbiasa merasakan pembelajaran yang mengaktifkan siswa dalam belajar mereka akan bingung karena tidak memiliki pengalaman. Selain itu, guru perlu menyiapkan LKPD yang memiliki petunjuk kerja yang jelas dan terarah agar membantu siswa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama berlangsungnya penelitian tindakan kelas ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kepala MAN 3 Kota Banjarmasin yang telah mendukung dan mendorong dalam melaksanakan inovasi pembelajaran yang dilaksanakan di kelas dan mendapatkan pengalaman baru untuk meningkatkan hasil pembelajaran menggunakan model *Discovery*

Learning. Pengalaman baru tersebut terkadang mendapatkan kendala dalam melaksanakan penelitian di dalam kelas.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arfianawati, S., Sudarmin, S., & Sumarni, W. (2016). Model Pembelajaran Kimia Berbasis Etnosains untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. *Jurnal Pengajaran MIPA*, 21(1), 46–51. <https://doi.org/10.18269/JPMIPA.V21I1.36256>
- Atika, D., Nuswowati, M., & Nurhayati, S. (2018). Pengaruh Metode *Discovery Learning* Berbantuan Video terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa SMA. *Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia*, 12(2), 2149. <https://doi.org/10.15294/JIPK.V12I2.15474>
- Dewi, R. K., Cholifatul, A., Jurusan, K., Kimia, T., Tarbiyah, F., Keguruan, I., Sayyid, U., Rahmatullah, A., & Sujadi, J. M. (2022). Pengaruh Model *Discovery Learning* Berpendekatan *Scientific* terhadap *Critical Thinking Skills* Siswa Kelas XI-MIA SMAN 1 Papar Kediri Materi Senyawa Hidrokarbon pada Era *New Normal*. *Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia*, 1(1), 16–27. <https://conference.undana.ac.id/SNKPK/article/view/299>
- Hamzah, A. (2020). *Etos Kerja Guru Era Industri 4.0*. Literasi Nusantara. www.penerbitlitnus.co.id
- Komalasari, K. (2017). *Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi* (N. Falah Atif (ed.); 5 ed.). PT Refika Aditama.
- Mawaddah, S., & Maryanti, R. (2016). Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa SMP dalam Pembelajaran Menggunakan Model Penemuan Terbimbing (*Discovery Learning*). *EDU-MAT: Jurnal Pendidikan Matematika*, 4(1). <https://doi.org/10.20527/edumat.v4i1.2292>
- Meipiani, C. A., Febriani, L., & Cholilah, J. (2021). Inovasi Pendidikan : Upaya Penyelesaian Masalah Reproduksi Kelas Sosial pada Sistem Pendidikan di SMA Santo Yosef Pangkalpinang. *Jurnal Studi Inovasi*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.52000/JSI.V1I2.17>

- Nugrahaeni, A., Redhana, I. W., & Kartawan, I. M. A. (2017). Penerapan Model Pembelajaran *Discovery Learning* untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Kimia. *Jurnal Pendidikan Kimia Indonesia*, 1(1), 23.
<https://doi.org/10.23887/jpk.v1i1.12808>
- Nurdin, M. (2016). Pengaruh Metode *Discovery Learning* untuk Meningkatkan Representasi Matematis dan Percaya Diri Siswa. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 09(01), 9–22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52434/jp.v10i1.83>
- Sari, J., Bahar, A., & Handayani, D. (2017). Studi Komparasi Antara Model Pembelajaran *Discovery Learning* dan *Group Investigation* terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa. *ALOTROP*, 1(1), 60–65.
<https://doi.org/10.33369/ATP.V11i1.2720>
- Semirata, P., & Lampung, F. U. (2014). Pengembangan Buku Ajar Kimia Sma Melalui Inovasi Pembelajaran dan Integrasi Pendidikan Karakter untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. *Prosiding SEMIRATA 2013*, 1(1).
<https://jurnal.fmipa.unila.ac.id/semirata/article/view/817>
- Sumianingrum, N. E., & Wibawanto, H. (2017). Efektivitas Metode *Discovery Learning* Berbantuan *E-Learning* di SMA Negeri 1 Jepara. 6(1), 27–35.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijcet.v6i1.15573>
- Wijaya, C., & Syahrums, S. (2014). Penelitian Tindakan Kelas Melejitkan Kemampuan Penelitian untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Guru. In *International Journal of Physiology* (Vol. 6, Nomor 1). Cita Pustaka.
<http://repository.unp.ac.id/71/>



Korespondensi

Email : rglfitri@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKA

Ragil Fitri Rahayu^{1*}, Ibrahim^{2*}

^{1,2} Universitas Bangka Belitung | Gang IV No. 1, Balunijuk, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

Disetujui: 25 Januari 2023

Abstract

This study attempts to analyze the implementation of public services innovation in Population and Civil Registry Office in Bangka District. Regarding to Executive Order Number 3 of 2003 on National Development Strategy of E-Government in Bangka District manage to improve the public services. However, there are complex problem of the implementation especially in population proposition. In the case moreover, citizen and civil service staff demand to be adapted. The occurring problem usually appeared is the unclear document of citizen. This study use theory of Innovation devotion by Everett M. Rogers, and use qualitative descriptive method. In the other hand, research data collecting use interview, observation, and documentation. The result of this study is to prove E-Government policy not completely gave the convenience to citizen, and also Population and Civil Registry Office in Bangka District is not ready to apply it. There are three digital innovations utilize by Population and Civil Registry Office in Bangka District, BANGMUDA (Bangka Mudah Dapat Akta), Gerbang Terindak and Matras Bangka. The implementation of E-Government public services innovation in Population and Civil Registry Office in Bangka District is not optimal. In fact, there are some points which influence the implementation of E-Government in Population and Civil Registry Office in Bangka District, regardless to the advantage or disadvantage, which are: first, creating the good government, second, reduce the corruption problem, third, the efficiency of time and space, fourth, there are numbers of citizen lack of technology and information, fifth, citizen ignorance, sixth, people culture, and seventh, internet problem.

Keywords: E-Government, Implementation, Innovation, Public Policy, Public Service

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai implementasi dari inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka. Merespon INPRES NO. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, Kabupaten Bangka terus meningkatkan inovasi pelayanan. Namun dalam implementasinya terdapat masalah yang cukup kompleks terkait masalah kependudukan. Dalam hal ini baik masyarakat maupun aparatur pegawai dituntut agar mampu beradaptasi dengan situasi seperti sekarang ini, adapun permasalahan yang kerap terjadi ialah banyaknya dokumen yang dilampirkan oleh masyarakat tidak jelas sehingga hal ini menjadi persoalan. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori Divisi Inovasi Everett M. Rogers, menggunakan metode penelitian

deskriptif kualitatif. Sementara teknik pengumpulan data dalam penelitian ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu *E-Government* dimaknai memberi kemudahan belum terbukti, Dukcapil Kabupaten Bangka belum siap sehingga *E-Government* tidak terkelola dengan baik. Terdapat tiga inovasi berbasis digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka yakni, BANGMUDA (Bangka Mudah Dapat Akta), Gerbang Terindak dan Matras Bangka. Implementasi daripada inovasi pelayanan berbasis *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka masih belum optimal. Terdapat beberapa point yang mempengaruhi implementasi *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka, baik secara kekurangan maupun kelebihan, diantaranya ialah: (1) terciptanya pemerintahan yang baik (2) Praktik korupsi berkurang, (3) Tercipta efisiensi skala ruang dan waktu. (4) Masih ada masyarakat yang belum memiliki perangkat teknologi dan informasi, (5) Ketidaktahuan masyarakat, (6) people culture dan (7) jaringangan internet.

Kata Kunci: *E-Government*, Implementasi, Inovasi, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik

I. PENDAHULUAN

Dalam sebuah kehidupan sosial masyarakat sangat diperlukan sebuah inovasi baru tepatnya inovasi pelayanan publik. Hal ini disebabkan karena semakin kompleksnya perkembangan sosial politik bahkan ekonomi masyarakat. Pelayanan publik mengalami beberapa perkembangan seiring berjalannya waktu yang dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat. Perkembangan tersebut bertujuan agar terciptanya suatu pengaplikasian pelayanan publik yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat tidak terkecuali menjadikan pelayanan publik lebih baik, responsif, efisien segala bentuk administrasi, bahkan meminimalisir praktik negatif atau penyimpangan pemerintah terkait dalam hal pelayanan public.

Inovasi berbasis pelayanan publik ini sejalan dengan adanya kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 3 Tahun 2003

Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang pengembangan *E-Government* yang merupakan wujud keinginan pemerintah dalam upaya mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan. Oleh karenanya pelayanan publik ini memiliki nilai strategis dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka merespon atau meneruskan kebijakan diatas pemerintah daerah Kabupaten Bangka dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bangka menciptakan sebuah inovasi baru dalam hal pelayanan publik. Pelayanan publik tersebut juga yang ada di Dukcapil Kabupaten Bangka bertujuan untuk merespon adanya pandemi Covid-19 yang telah merubah segala aktivitas sosial masyarakat sehingga diperlukan inovasi yang mampu menutupi pandemi tersebut agar kebutuhan masyarakat akan kependudukan tetap berjalan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) merupakan suatu instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilakukan diantaranya terkait dengan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, hingga Surat Kematian (Rianandita dkk, 2021).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka yang menjadi lokus penelitian ini, inovasi terhadap pelayanan publik sudah ada dan cukup bagus dalam mengembangkan pelayanan publik berbasis digital, dimana pada tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka membuat inovasi pelayanan dengan nama "BANG MUDA (Bangka mudah dapat akta)" yang merupakan inovasi pertama yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Inovasi "BANG MUDA" ini merupakan sebuah pelayanan akta kelahiran bagi bayi yang baru dilahirkan di puskesmas dan rumah sakit, pelayanan akta kelahiran dan akta kematian di pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, 2019). Kemudian, dilansir dari laman website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka, bahwa Dukcapil Kabupaten Bangka terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat salah

satunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital melalui pelayanan online.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka juga melaunching inovasi 'Gerbang Terindak' (Gerakan Bangka Tertib Administrasi kependudukan) di Hotel Akses Natural Resort, Rabu 29 September 2021 lalu. Kepala Disdukcapil Bangka, Muhtar, menyampaikan bahwa inovasi Gerbang Terindak pada dasarnya merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan secara digital berbasis website melalui pesonadukcapil.bangka.go.id. Kemudian pada kesempatan yang sama, Bupati Bangka berharap inovasi Gerbang Terindak nantinya akan meningkatkan kinerja layanan administrasi kependudukan di daerahnya (Nita, 2021). Dengan adanya website pesona dukcapil ini pemerintah berharap agar segala proses pendaftaran kependudukan (kartu keluarga hingga surat kematian) menjadi lebih mudah.

Terdapat 12 pelayanan yang bisa diakses di antaranya adalah layanan pencetakan KTP EL, layanan sinkronisasi data (BPJS/Bank/Data Online), pelaporan perceraian dari pengadilan agama Bangka (hanya untuk petugas pengadilan agama), pelayanan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak), pelayanan pengajuan akta kelahiran, pelayanan pengajuan akta kematian, pelayanan pengajuankartu keluarga (kartu keluarga baru/rumah tangga baru), pengajuan akta cerai, pengajuan akta kawin, pengajuan kartu keluarga (perubahan data dan kehilangan KK), pengajuan KK (peristiwa datang dari luar Kabupaten Bangka dan pengajuan surat pindah jiwa (SKPWN) (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, 2021).

Oleh karena adanya berbagai inovasi yang ada, maka hal ini seyogyanya semakin lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan terselenggaranya *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka di era seperti sekarang ini. Namun, dibalik hal tersebut justru pengembangan *E-Government* saat ini masih berfokus pada penyediaan website dan layanan informasi saja walaupun pembahasan terkait Master plan Implementasi *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka sudah di bahas sejak 25 oktober 2015 melalui Forum Grup

Diskusi (FGD) serta dalam implementasinya terdapat masalah yang cukup kompleks terkait masalah kependudukan. Sehingga jika suatu pemerintah daerah telah memiliki website, muncul anggapan telah menerapkan aplikasi *E-Government*. Padahal konsep *E-Government* tidak hanya menampilkan informasi pemerintah melalui layanan website saja, melainkan terjadinya transformasi hubungan antara pemerintah dengan seluruh stakeholder yang semula menggunakan media konvensional beralih menggunakan teknologi informasi (Anggraini dkk, 2020).

Berdasarkan survei terakhir yang diperoleh, indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada unit pelayanan publik di Kabupaten Bangka hingga tahun 2020 diperoleh hasil skor IKM 86,05. yang artinya kinerja unit pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka pada tahun 2020 berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori 'Sangat Baik' (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, 2021). Berbeda saat sudah terjadi maraknya kasus pandemi covid-19 di Kabupaten Bangka, terdapat perubahan yang cukup signifikan mulai dari penyelenggaraan pelayanan publik di dukcapil Kabupaten Bangka yang sempat tutup layanan hal ini karena terdapat pegawai yang terpapar covid-19 (Putra, 2021).

Selain itu dalam berlangsungnya layanan secara daring pada pemanfaatan website permasalahan sering terjadi pada saat melakukan approve data kependudukan yakni saat dokumen yang dilampirkan oleh penduduk tidak jelas (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, 2021).

Oleh karena pelayanan publik merupakan titik strategis dalam pengembangan good governance, seyogyanya penerapan aplikasi *E-Government* ini memenuhi kriteria yang baik, akuntabel, transparansi, efisiensi, profesionalisme, efektivitas, responsiveness (daya tanggap) serta penegakan hukum sesuai dengan aspek penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan motto penerapan *E-Government* ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) kabupaten Bangka.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi inovasi pelayanan publik berbasis *E-Government* di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka yang ada tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini yakni suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif, maksudnya diawali dengan proses atau peristiwa penjas yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa yang terjadi dalam penelitian yang akan peneliti lakukan.

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori difusi inovasi yang dipopulerkan pada tahun 1964 oleh Everett M. Rogers. Dalam bukunya yang berjudul "Diffusion of Innovations" dia menjelaskan bahwa difusi merupakan proses ketika sebuah inovasi dikomunikasikan melalui beberapa saluran dengan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial (Everett M. Rogers, 2003).

Dalam teori tersebut terdapat lima tahapan pengambilan keputusan dalam sebuah inovasi yaitu : (1) *knowledge* (pengetahuan), yang berkaitan dengan kesadaran bahwa inovasi tersebut ada, pengetahuan akan penggunaan inovasi tersebut, dan pengetahuan yang mendasari bagaimana fungsi inovasi tersebut. (2) *persuasion* (kepercayaan), yakni keuntungan dan kerugian menggunakan informasi tersebut, termasuk sikap yang ditunjukkan individu dapat berupa sikap baik maupun buruk. (3) *decision* (keputusan), mengenai keputusan seseorang terhadap inovasi yang dipengaruhi oleh faktor perasaan atau kebutuhan, keinovatifan, atau norma dalam sistem sosial. (4) *implementation* (implementasi), dimana seorang individu akan lebih ke arah perubahan tingkah laku. (5) *confirmation* (konfirmasi). Pada tahap ini individu akan mengevaluasi dan memutuskan apakah akan terus menggunakan inovasi tersebut atau akan mengakhirinya serta akan mencari berbagai penguatan atas keputusan yang telah ia ambil sebelumnya.

Selanjutnya Rogers (2003) menyebutkan terdapat lima atribut yang dapat digunakan dalam melihat inovasi pada sebuah instansi, lima atribut tersebut diantaranya :

keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba (uji coba) dan kemudahan diamati. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar keunggulan relatif, kesesuaian, kemampuan untuk diuji coba dan kemampuan untuk diamati serta semakin kecil kerumitannya, maka semakin cepat kemungkinan inovasi tersebut dapat diadopsi.

Sementara metode atau teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini yaitu model Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berinisiatif dengan membuat berbagai inovasi dalam melakukan pelayanan untuk masyarakat dengan memanfaatkan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk membangun *E-Government* di antaranya ialah : BANG MUDA (Bangka mudah dapat akta), Gerbang Terindak (Gerakan Bangka Tertib Administrasi Kependudukan) dan Matras Bangka (Pelayanan khusus untuk penyandang disabilitas). Hal ini dengan tujuan agar infrastruktur TIK dapat di manfaatkan bersama serta memberi kemudahan bagi masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dan Keputusan menteri Komunikasi dan Informasi tentang Pengembangan *E-Government* yang merupakan wujud keinginan pemerintah dalam upaya mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan. Oleh karenanya, pelayanan publik ini memiliki nilai strategis dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

Berikut rangkaian temuan di lapangan yang dianalisis berdasarkan teori difusi inovasi oleh Everett M. Rogers berkaitan dengan implementasi inovasi pelayanan publik berbasis *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bangka:

A. Pengambilan Keputusan Pemerintah Kabupaten Bangka

Fase perumusan masalah menjadi fundamen dasar dan langkah awal dalam membuat kebijakan karena akan menentukan cara kebijakan tersebut akan disusun. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk

pelaksanaan dan teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Terpenting harus mempertimbangkan sisi masyarakat yakni adanya suatu standar pelayanan publik yang menjabarkan kepada masyarakat tentang pelayanan yang menjadi haknya, cara mendapatkannya, persyaratannya, dan bentuk layanan itu. Berikut lima tahapan pengambilan keputusan berdasarkan teori difusi inovasi dalam sebuah inovasi pelayanan publik diantaranya:

1. **Knowledge (pengetahuan)**

Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka tersebut berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan atau berbagai informasi yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja sebagai ide baru inovasi, dengan kata lain adanya bentuk inovasi pelayanan melalui media oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka kepada masyarakat. Hal ini juga bertujuan agar mampu mengangkat dan meningkatkan potensi lokal masyarakat Kabupaten Bangka dengan cara memperkenalkan dan mempromosikan produk lokal melalui internet juga melalui proses kerja sama dengan berbagai pihak.

Adapun cara dan saluran komunikasi yang dipergunakan dalam proses penyebaran pengetahuan atau informasi tersebut diantaranya melalui : (1) saluran massa (media massa), berupa media website dengan alamat sebagai berikut <https://pesonadukcapil.bangka.go.id> dan juga Instagram @dukcapil.bangka serta facebook @disdukcapilbangka. Dengan ketiga media tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka memperkenalkan berbagai macam informasi termasuk pengembangan inovasi pelayanan mulai dari BANG MUDA (Bangka mudah dapat akta), Gerbang Terindak (Gerakan Bangka Tertib Administrasi Kependudukan) dan Matras Bangka (Pelayanan khusus untuk penyandang disabilitas).

(2) Saluran antar pribadi, dilakukan melalui kegiatan pertemuan-pertemuan keliling desa, pelayanan keliling dan mensosialisasikan kepada desa terkait inovasi pelayanan tersebut. Pada proses penyebaran informasi di Kabupaten Bangka adanya sasaran atau target penyebaran

informasi yaitu semua elemen struktur sosial yakni pemerintah desa di Kabupaten Bangka dan seluruh anggota lapisan masyarakat yang saling mempengaruhi dalam kaitannya dengan proses penyebaran informasi berkaitan dengan sistem pelayanan yang berkembang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka.

2. **Persuasion (kepercayaan)**

Seperti yang disampaikan oleh Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka bahwa hal ini dilakukan dengan mencoba menciptakan inovasi berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat dengan cara memperkenalkan apa saja yang menjadi kerugian dan keuntungan dari inovasi yang ada serta bagaimana mengidentifikasi penerima inovasi yang potensial dan lalu bagaimana merancang dan mengembangkan pengguna produk yang ramah. Namun, hasil di lapangan menunjukkan bahwa, masih banyak juga pihak-pihak terutama masyarakat yang belum akrab dengan teknologi instruksional tersebut.

3. **Decision (keputusan)**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka mencoba merumuskan sebuah inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, kemudian menciptakan berbagai inovasi yang di pandang sangat inovatif dalam merancang inovasi pelayanan berbasis *E-Government* tersebut. Salah satu cara menilai inovasi tersebut adalah dengan melihat orang lain yang telah menggunakan layanan, mengetahui manfaat dari layanan yang ada, kemudian adopter dapat menilai apakah inovasi ini baik atau tidak untuknya. Kemudian setelah melalui berbagai pertimbangan, adopter akan mulai mengakses layanan yang ada.

4. **Implementation (implementasi)**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka berupaya memberikan standar bahwa inovasi yang di bentuk semakin memberi kemudahan, semakin efektif dan hemat biaya serta adanya transparansi. Adopter melalui semua tahapan tersebut sampai akhirnya menerima dan mantap untuk

mengadopsi inovasi pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka. Proses pengadopsian suatu inovasi memerlukan jangka waktu dalam semua proses tahapan, dimana terdapat Konsekuensi yang merupakan perubahan yang terjadi pada individu atau sistem sosial sebagai akibat dari mengadopsi atau menolak suatu inovasi.

5. **Confirmation (konfirmasi).**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka melakukan cara dengan tetap menjalankan inovasi yang telah di rumuskan. Setiap adopter memiliki pertimbangan sebelum memutuskan untuk mengadopsi ataupun tidak yang dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Calon adopter akan lebih cepat mengadopsi inovasi karena melihat adanya manfaat yang diperoleh dan menjadi agen pembaharu menjadi faktor pendukung. Sementara faktor penghambatnya ialah sikap masyarakat yang kurang percaya pada kredibilitas inovasi yang ada serta pengetahuan masyarakat yang minim tentang teknologi informasi, bahkan pengoperasian website menjadi lebih lama.

B. **Melacak Keberhasilan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka**

Dalam teori difusi inovasi oleh Everett M. Rogers, terdapat lima atribut yang dapat digunakan dalam melihat keberhasilan inovasi pada sebuah instansi yaitu :

1. **Relative advantage (keuntungan relatif)**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka, paradigma pelayanan publik saat ini sudah bergeser dari manual atau konvensional menjadi pelayanan berbasis teknologi informasi (digital) dan saat ini sudah menyentuh berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan kepada masyarakat.

Secara faktual pelaksanaan *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka dinilai sebagai proyek “gagah-gagahan” artinya dari para penyelenggara *E-*

Government masih merasa “aman” dan “nyaman” dengan kepemilikan website tanpa peduli lagi pada optimalisasi pemanfaatan *E-Government*. Dalam hal ini *E-Government* bukan berarti mengganti cara pemerintah dalam berhubungan dengan masyarakat.

E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka masih memerlukan banyak pendekatan keilmuan yang bisa dilakukan apakah melalui pendekatan teknologi komunikasi dan informasi, manajemen, politik dan pemerintahan ataukah sosial. Namun yang paling banyak mewacanakan adalah dari pihak kaca mata teknologi dan manajemen pemerintahan. Aspek yang lain masih kurang terlihat dan sedikit sekali terlibat dalam isu *E-Government*. Padahal, *E-Government* merupakan suatu penerapan konsep dan teknologi yang membutuhkan banyak pendekatan keilmuan sehingga aplikasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara (pemerintah) dapat terwujud secara ideal dan komprehensif. Oleh karena itu, bisa dikatakan inovasi *E-Government* di Dukcapil Kabupaten Bangka masih sangat dangkal sehingga implementasinya-pun masih kurang optimal. Masih menjadi tantangan bagi pemerintah agar mampu memberi pemahaman yang bersifat berkelanjutan bagi masyarakat agar mau dan mampu menggunakan inovasi pelayanan secara digital yang ada yang seharusnya mampu membuat urusan semakin cepat dan efisien mengingat masih banyaknya masyarakat yang lebih menikmati cara tradisional yakni pelayanan secara langsung.

Namun, disini memberikan keuntungan atas berlakunya *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka selain untuk memudahkan akses pelayanan administrasi kependudukan yakni segala bentuk kegiatan menyimpang seperti pemungutan liar yang terindikasi pada tindakan korupsi akan berkurang bahkan tidak terjadi lagi dikarenakan sistem komputer hanya bila memang secara sengaja dan sistematis dirancang untuk melakukannya. Selain itu, dapat membuat proses birokrasi berjalan secara transparan, mendorong adanya pengurangan biaya tersembunyi,

peningkatan efisiensi pemerintahan, tercipta efisiensi skala ruang dan waktu baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

2. **Compatibility (kesesuaian)**

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan bahwa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bangka, kegagalan masyarakat dalam menerima inovasi baru menjadi faktor penghambat dalam terselenggaranya pelayanan publik berbasis *E-Government*. Inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka memenuhi nilai pertimbangan yakni jenis pelayanan yang 'memudahkan masyarakat'. Akan tetapi, dalam merumuskan inovasi pelayanan yang di lakukan secara online, adaptasi dan proses pembelajaran terkait inovasi pelayanan berbasis online hanya dirasakan oleh pihak pemberi layanan, hal ini sejalan dengan struktur masyarakat yang tidak semuanya memahami akan penggunaan teknologi yang ada dalam artian masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya.

Masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih datang langsung ke kantor, pada saat mengakses sistem informasi, pelayanan publik juga masih sering terjadi masalah teknis yang di alami masyarakat seperti *human error* dan jaringan internet masih menjadi kendala yang sering terjadi pada saat menginput data kependudukan sehingga kadang data salah dan tidak berjalan dengan baik. Kemudian, tidak ada sharing atau sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait penerapan teknologi informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) serta sifat buruk (malas) masyarakat sehingga masih ada masyarakat belum mengetahui. Oleh sebab itu, aspek *compatibility* (kesesuaian) atas penerapan *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka masih relatif kurang atau belum sesuai.

3. **Complexity (kerumitan)**

Inovasi berupa BANG MUDA (Bangka mudah dapat akta), Gerbang Terindak (Gerakan Bangka Tertib Administrasi Kependudukan) dan Matras Bangka (Pelayanan khusus untuk penyandang disabilitas) mempunyai tingkat kerumitan

yang lebih tinggi dibandingkan inovasi yang sebelumnya yakni tatap muka dikarenakan sifatnya yang baru. Terkait dengan *complexity* atau kerumitan dalam pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka bukanlah hal yang rumit karena berjalan sesuai prosedurnya yakni melakukan kerja sama dengan berbagai instansi lain.

4. **Triability (kemungkinan dicoba)**

Berdasarkan penelitian di lapangan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka bahwa inovasi layanan belum menyentuh nilai uji publik. Hal disebabkan inovasi tersebut belum teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibanding dengan pelayanan sebelumnya yakni pelayanan secara konvensional. Hal tersebut sejalan dengan teori Rogers pada indikator *triability* (kemungkinan dicoba) yang mengatakan bahwa sebuah inovasi harus melewati fase uji publik dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi. Setelah melewati fase uji publik dimana setiap orang atau pihak memiliki kesempatan untuk menguji kualitas inovasi berbasis *E-Government* tersebut.

5. **Observability (kemudahan diamati)**

Berbagai inovasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka ini dengan mudah dapat diamati implementasinya dengan adanya sistem sosialisasi yang dijalankan oleh pemerintah. Inovasi harus dapat diamati dari segi bagaimana ia bekerja yang dapat diamati oleh seluruh lapisan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi-organisasi yang aktif.

Pelaksanaan inovasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka bukan hanya dipantau ataupun diamati, melainkan pihak-pihak yang berkaitan tersebut dapat memberi masukan, kritikan, bahkan kontribusi yang membangun dan mensukseskan program inovasi yang ada. Berdasarkan pengamatan beberapa pihak salah satunya Asisten Pratama Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung, ditemukan beberapa fenomena dalam proses pelayanan

publik berbasis *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka, diantaranya adalah belum menunjukkan adanya pelayanan secara optimal, penerapan layanan secara online masih sangat minim penggunaannya.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa *E-Government* yang dimaknai untuk memberi kemudahan belum mampu terbukti. Hal ini disebabkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka terkhusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka belum siap sehingga yang terjadi dalam pemaknaan implementasi pelayanan publik berbasis *E-Government* ini hanyalah sebagai tuntutan namun dalam pelaksanaannya *E-Government* itu sendiri tidak terkelola dengan baik. Hal ini dapat dilihat mulai dari tahapan pengambilan keputusan oleh pemerintah Kabupaten Bangka itu sendiri yang merancang dan melaksanakan berbagai keinovatifan pelayanan akan tetapi dalam proses difusi inovasi kadangkala membawa keberhasilan yang gemilang karena inovasi diterima dengan baik oleh masyarakat dan kadangkala mengalami kendala sehingga menghambat keberhasilan dan bahkan kegagalan karena ditolak oleh masyarakat. Dengan demikian, proses difusi inovasi mendatangkan konsekuensi-konsekuensi tertentu.

Dalam hal ini, penyebaran informasi yang terjadi belum menyentuh seluruh elemen masyarakat sehingga ketidaktahuan masyarakat menjadi faktor penghambat terlaksananya inovasi pelayanan yang ada. Kemudian, kepercayaan masyarakat akan inovasi pelayanan yang ada masih belum mendapat apresiasi penuh, hal ini dikarenakan kurangnya keakraban masyarakat akan inovasi yang ada. Sehingga ketidakakraban pada satu sisi menjadi akibat difusi teknologi yang tidak merata.

IV. KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai "Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka", peneliti menarik kesimpulan bahwa inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bangka sudah bagus dalam pengembangannya. Namun, beberapa hasil temuan peneliti di lokasi penelitian bahwa implementasi dari inovasi pelayanan yang ada belum terimplementasi dengan optimal. Inovasi pelayanannya sudah ada namun sekedar berinovasi. Masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang inovasi pelayanan yang ada.

Terdapat beberapa point yang mempengaruhi terselenggaranya *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka baik dampak baik maupun yang buruk diantaranya: (1) Terciptanya pemerintahan yang baik, implementasi *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka mempengaruhi proses layanan menjadi lebih baik, transparan, mudah dikontrol dan diawasi setiap waktu. (2) Kemudian Praktik korupsi berkurang, penerapan *E-Government* pada proses pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka berdampak pada berkurangnya praktik-praktik korupsi. (3) Tercipta efisiensi skala ruang dan waktu, penerapan *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka berdampak pada tercipta efisiensi skala ruang dan waktu dikarenakan proses pelayanan lebih cepat serta mudah diakses dimana dan kapan saja tanpa harus datang ke kantor layanan. (4) Masih ada masyarakat yang belum memiliki perangkat teknologi dan informasi, (5) Ketidaktahuan masyarakat, (6) kebiasaan masyarakat (*people culture*) dan (7) jaringan internet.

B. Saran

Beberapa saran yang peneliti sampaikan baik yang ditujukan bagi pemerintah maupun peneliti selanjutnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas jaringan server yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bangka agar pelayanan menjadi lebih tepat.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih mengenal, mengetahui, dan memanfaatkan inovasi pelayanan publik yang ada.

3. Pemerintah perlu menyusun strategi baru untuk mendorong masyarakat beradaptasi dari cara lama ke cara yang baru.
4. Bagi peneliti selanjutnya perlu membahas lebih dalam terkait peran pemerintah itu sendiri akan merespon kebutuhan masyarakat khususnya dalam pelayanan publik serta berbagai rekomendasi rumusan kebijakan bagi pelayanan publik kedepannya agar lebih merespon kebutuhan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah turut andil membantu dalam proses penelitian, pembuatan, dan memberikan masukan dan dukungan saat penyusunan tulisan ini. Terima kasih kepada :

1. Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin, rahmat, dan anugerah-Nya
2. Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai
3. Kepada teman seperjuangan perkuliahan terkasih
4. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini
5. Para informan di lapangan atau lokasi penelitian termasuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta memberikan bantuan dan dukungan tak hingga sepanjang proses penulisan tulisan ini hingga terselesaikan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Andreany, selfy. 2022. Inovasi Digital LIBERTI (Literasi Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Sarana Pembelajaran Sekolah di SMP Negeri 2 Cisauk Kabupaten Tangerang. *Jurnal Kebijakan dan Inovasi Daerah*.
- Apriliani, Deby. 2021. Digitalisasi Pelayanan Publik (Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android di Kabupaten Bangka). *Skripsi*.
- Asrori. 2022. Inovasi Layanan Gerai Investasi Pangkalan Cari Izin bagi Nelayan Sebagai Langkah Percepatan/Akselerasi Terhadap Kegiatan yang Bersifat Normatif pada Kota Tegal. *Jurnal Kebijakan dan Inovasi Daerah*.
- Atthahara, Haura. 2018. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis *E-Government: Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Politikom Indonesiana*. Vol 3, No 1, 70-76.
- Bendini. 2021. Elemen Sukses Penerapan Elektronik Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Era Covid-19 Di Kota Makassar. *Skripsi*.
- Cahyadi, Adi. 2003. *E-Government: Suatu Tinjauan Konsep dan Permasalahan. Jurnal The Winners*. Vol 4, No 1, 1-12.
- Cahyaningrum, Anisa dan Rino Ardhian Nugroho. 2019. Inovasi Pelayanan melalui Aplikasi "Dukcapil Dalam Genggaman" oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 106-110.
- Dahlia. 2020. Inovasi Dukcapil Digital Mobil Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman. *Journal of Education on Social Science*, 247-251.
- Daryanti, Utami Chika. 2020. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Electronic Government (E-Gov) Di Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *Skripsi*.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka. 2018. Disdukpencapil Kab. Bangka. Diakses pada: <http://dukcapil.bangka.go.id/halaman/detail/selayang-pandang>
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2021. *Lanching Inovasi 'Gerbang Terindak', Disdukcapil Bangka Diapresiasi Kemendagri*. Diakses pada: <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/866/lanchinginovasi-gerbang-terindak-disdukcapil-bangka-diapresiasikemendagri>
- Firdaus, Imansyah Abinda, dkk. 2022. Inovasi Pelayanan Publik dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Inklusif di Kota Bekasi. *Jurnal Kebijakan dan Inovasi Daerah*.
- Gamatechno. 2015. *Master Plan E-Gov Untuk Kab. Bangka*. Diakses pada <https://www.gamatechno.com/news/master-plan-e-gov-untuk-kabangka/>
- Handayani, Sri. 2020. Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Melalui Penerapan

- E-Government* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone. *Skripsi*.
 Indrajit, Richardus Eko. 2006. *E-Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Aptikom.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Khoirunisa, Siti. 2021. Optimalisasi Penggunaan Website Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid19 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *Skripsi*.
- Latul, Lily. (2021). Inovasi Pembinaan dan Pengawasan dalam Pencapaian Urusan Wajib Dasar. *Jurnal Studi Inovasi*. Vol 1 (3) : 9-22.
- Mubarq, Husni, dkk. 2022. Optimalisasi Good Governance dengan Program “Si Jinggo” dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kota Probolinggo. *Jurnal Studi Inovasi*. Vol 2 (1) : 33-39.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: alfabeta cv.
- Nuraini, Anggi. 2021. Transformasi Layanan Administrasi Kependudukan oleh Disdukcapil Kabupaten Bekasi di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*. Vol 9, No 2, 111-115.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Prakoso, Cathas Teguh. 2020. Inovasi Layanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Perspektif Digital Government. *Jurnal Paradigma*. Vol 9, No 2, 135-142.
- Rianandita, dkk. 2021. Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota Bandung. *Jurnal Caraka Prabu*. Vol 5, No 1, 70-74.
- Rogers, Everett M. 2003. *Diffusion Of Innovations*. New York: Free Press.
- Yuliana, Wiwin. 2018. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Quanta*. Vol 2, No 2, 83-88. 102.
- Yusuf, Siti Yulianah M. 2019. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis *E-Government* Pada Kantor Pelayanan Bersama Samsat Mataram. *Jurnal Media Bina Ilmiah* 1433. Vol 13, No 8, 1-10.



Korespondensi

Email¹ : rafiaufamawardi1@gmail.com

Email² : emailnya.rizkipratama@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,

40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

PERAN *SOCIAL ENTERPRISE* SEBAGAI INOVASI PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Rafi Aufa Mawardi^{1*}, Muhammad Rizki Pratama^{2*}

^{1,2} Universitas Airlangga | Jl. Dharmawangsa Dalam, Kel. Airlangga,
Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60286

Disetujui: 25 Januari 2023

Abstract

Social Enterprise is an innovation in the field of business that plays a role in alleviating the problem of poverty. This article examines the role of Social Enterprise in overcoming the complexity of poverty problems in Indonesia. This study uses qualitative research methods with a literature study approach and social functioning theory as an analytical framework. This study found that there are four fundamental faces of poverty in Indonesia, namely high population growth, escalating unemployment rates, low levels of education, and unequal distribution of income. Researchers analyze that Social Enterprise s exist as external parties whose role is to assist the government in overcoming poverty problems. This can be seen from several functional roles, such as conducting community empowerment, providing microfinance services, and providing free education.

Keywords: *Social Enterprise , Poverty Alleviation, Innovation, Social Functioning, Community Empowerment*

Abstrak

Social Enterprise merupakan suatu inovasi di bidang bisnis yang ikut berperan dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan. Artikel ini mengkaji mengenai peran *Social Enterprise* dalam mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan teori keberfungsian sosial sebagai kerangka analisis. Studi ini menemukan bahwa ada empat wajah kemiskinan di Indonesia yang cukup fundamental, yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi, eskalasi tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Peneliti menganalisis bahwa *Social Enterprise* hadir sebagai pihak eksternal yang berperan membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal ini terlihat dari beberapa peran fungsionalnya, seperti melakukan pemberdayaan masyarakat, memberikan layanan jasa keuangan mikro, dan menyediakan pendidikan gratis.

Kata Kunci : *Social Enterprise , Pengentasan Kemiskinan, Inovasi, Keberfungsian Sosial, Pemberdayaan Masyarakat*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang berjuang mengatasi berbagai permasalahan kemiskinan. Fenomena kemiskinan selalu berhimpitan dengan persoalan-persoalan lain dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Realitas kemiskinan pada masyarakat akan berimplikasi terhadap permasalahan lain seperti pengangguran, persoalan kesehatan, meningkatkan kriminalitas, hingga angka kematian yang meningkat. Kemiskinan menjadi satu situasi yang kompleks dan tidak dikehendaki oleh masyarakat itu sendiri (Supriatna, 1997). Menurutnya, masyarakat yang miskin dapat ditilik dalam beberapa hal, seperti rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya pendapatan, rendahnya produktivitas kerja, dan rendahnya kesejahteraan hidup.

Salim (1984) melihat ada beberapa karakteristik masyarakat miskin, yaitu tidak memiliki faktor produksi secara mandiri, tidak memiliki probabilitas untuk mendapatkan aset produksi, tingkat pendidikan yang rendah, umumnya tidak memiliki fasilitas, dan relatif berada di usia muda tanpa kompetensi yang memadai. Cox (2004) menjelaskan ada beberapa penyebab kemiskinan di suatu negara. *Pertama*, kemiskinan sebagai realitas yang diakibatkan oleh kompetisi global (globalisasi). *Kedua*, kemiskinan yang disebabkan oleh pola pembangunan. *Ketiga*, kemiskinan yang dilihat dari situasi dan kondisi sosial pada masyarakat yang tidak berpihak secara baik. *Keempat*, kemiskinan konsekuensial yang merujuk pada faktor eksternal sebagai variabel penyebab kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2022) bahwa kemiskinan di Indonesia berada di angka 9,54%. Di mana jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 ini sebesar 26,16 juta orang yang dicatat melalui garis kemiskinan sebesar Rp. 505.469,00/bulan. Walaupun ada penurunan dari segi angka kemiskinan sebesar 0,17%, namun jumlah akumulasi dalam konteks kemiskinan ini masih menunjukkan problematika sosial yang nyata dan faktual. Secara normatif, pemerintah menerapkan dua strategi besar untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. *Pertama*, melakukan perlindungan intensif pada keluarga dan kelompok masyarakat yang

sedang menghadapi kemiskinan sementara. *Kedua*, membantu secara langsung masyarakat yang menghadapi kemiskinan dengan tingkat yang parah (Kemenkeu, 2022).

Kebijakan pemerintah yang dikonseptualisasikan untuk memutus rantai kemiskinan pada masyarakat harus proporsional dan efektif. Jika tidak proporsional dan efektif, maka kebijakan tersebut hanya bersifat instan dan tidak berdampak signifikan pada upaya penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Dasgupta (2003) melihat bahwa kebijakan yang disusun menjadi program pengentasan kemiskinan harus memenuhi kriteria yang fundamental, seperti spesifik, relevan dengan persoalan, berdasarkan pada kesadaran faktual, mengukur konsekuensi dari implementasi program, dan berbasis pada sumber daya lokal. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan harus merepresentasikan kriteria umum tersebut, agar berkorelasi positif terhadap menurunnya angka kemiskinan.

Program sebagai kristalisasi dari kebijakan pemerintah untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan harus diselaraskan dengan beberapa faktor-faktor penting. Seperti, program yang diintegrasikan dengan nilai-nilai lokal, menggunakan pendekatan yang integratif dan komprehensif, dan bersifat pengembangan sumber daya manusia (Chambers, 1988). Salah satu program yang merepresentasikan hal-hal tersebut adalah KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang terbukti menunjukkan perubahan di segi sosial, ekonomi, dan infrastruktur (Belasari dkk, 2022). Di sisi lain, ada program Kampung Tematik yang berhasil mengatasi permasalahan kemiskinan dengan mendistribusikan kebutuhan dasar pada desa-desa di Kota Kademangan (Putri dan Mubaroq, 2022). Selain pemerintah yang memiliki kewajiban untuk mengatasi kemiskinan, ada masyarakat – utamanya masyarakat miskin, ada pihak eksternal yang juga ikut berpartisipasi dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan.

Secara umum, pihak eksternal tersebut dimanifestasikan oleh perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Seiring berjalannya waktu, terjadi transformasi dari pada bentuk perusahaan umum yang berorientasi hanya pada keuntungan kepada perusahaan yang berorientasi pada aspek sosial. Perusahaan dengan model baru ini

dikenal dengan *Social Enterprise*. Istilah *Social Enterprise* ini merujuk pada jenis perusahaan yang memiliki tidak hanya melihat aspek keuntungan saja, namun juga aspek sosial. Certo dan Miller (2008) menjelaskan ada tiga karakteristik dari *Social Enterprise*, yaitu memiliki misi untuk menciptakan dan memasifkan nilai sosial tanpa menegasikan nilai *profit*, ukuran performa perusahaan yang dinamis dan cenderung sulit diukur, dan memanfaatkan sumber daya manusia secara sukarela.

Social Enterprise menawarkan inovasi sosial dengan mencerminkan proses eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru (Christian, 2021). Di Indonesia sendiri, lahir berbagai *Social Enterprise* dari skala mikro, meso, hingga makro yang saling terintegrasi dalam upaya memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, *Social Enterprise* ini juga ikut menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan secara faktual memberikan dampak kepada masyarakat. *Social Enterprise* menjadi warna baru dalam model bisnis yang mentalikan aspek ekonomi dan sosial di waktu yang bersamaan. Atas dasar ini, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana peran *Social Enterprise* sebagai inovasi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemilihan metode ini dimaksudkan demi memperoleh pemahaman yang holistik terkait realitas yang akan diamati dalam proses penelitian ini. Metode kualitatif menggunakan fakta dan informasi yang tersedia untuk mendapatkan kesimpulan dan penjelasan terhadap realitas yang akan diteliti (Cresswell, 2015). Pendekatan studi literatur digunakan dalam penelitian ini. Studi literatur merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan beragam literatur yang tersedia, mulai dari buku, artikel ilmiah, berita, statistik, dan lain sebagainya, sebagai landasan dan pedoman dalam menganalisis realitas sosial. Studi literatur merupakan salah satu wujud kolektivisme ilmu yang terdiri atas beragam himpunan pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya (Neuman, 2014).

Snyder (2019) menjelaskan bahwa terdapat empat tahapan yang harus dilakukan

dalam penelitian studi literatur. Tahap pertama adalah merancang penelitian. Pada tahap ini, peneliti menentukan tema, fokus, dan pertanyaan penelitian. Penentuan ini merupakan hal yang krusial karena memberikan arah dan pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Selain itu, peneliti juga merancang tujuan sekaligus implikasi praktis penelitian, baik terhadap peneliti maupun pembaca. Tahap kedua adalah melakukan proses review. Tahap ini merupakan proses pengumpulan literatur-literatur yang dianggap relevan dengan tema dan fokus penelitian yang mampu membantu menjawab pertanyaan penelitian. Tahap ketiga adalah analisis. Hasil literatur yang telah didapat selanjutnya akan dikategorisasikan, dibandingkan, disederhanakan, dan disatukan agar mampu membantu menggambarkan realitas yang akan diteliti. Tahap terakhir adalah menulis laporan penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik. Pada tahap ini, peneliti mengkomunikasikan temuan yang diperoleh dalam penelitian kepada pembaca melalui tulisan.

Kerangka analisis dalam penelitian ini menggunakan teori keberfungsian sosial. Keberfungsian sosial dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu maupun kelompok untuk dapat menjalankan peran dan fungsi dalam struktur sosial untuk menjaga keserasian di dalam masyarakat (Huraerah, 2005; Wibhawa, 2010; Siporin, 1975). Teori keberfungsian sosial, dalam konteks kemiskinan, melihat bahwa individu atau kelompok yang “sebenarnya” memiliki pengetahuan dan kompetensi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, namun tidak optimal. Keberfungsian sosial juga mencoba untuk mencari aspek korelatif dari jaringan sosial dari pihak eksternal – pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan, dan lain-lain – dengan masyarakat miskin. Pihak eksternal hadir sebagai otoritas yang memformulasikan kebijakan atau program untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Social Enterprise* : Sebuah *Literature Review*

Peneliti menggunakan beberapa studi terdahulu untuk menjelaskan koherensi dan relevansi *Social Enterprise* sebagai model bisnis

yang memiliki implikasi pada upaya mengatasi permasalahan kemiskinan. *Social Enterprise* menjadi bentuk inovatif dari bisnis di era kontemporer yang telah banyak berdampak buruk bagi aspek-aspek laten, seperti sosial dan lingkungan. Melalui penelitian yang ditulis oleh Hynes (2009) berjudul “*Growing the Social Enterprise – Issues and Challenges*” bahwa *Social Enterprise* berkembang pesat dengan mendorong visi untuk memberikan nilai sosial dan kesejahteraan pada masyarakat sasaran. Visi ini mengalami kompleksitas dari segi implementasi, karena harus bersaing dengan bisnis-bisnis konvensional di pasar komersial. Persoalan yang inheren pada *Social Enterprise* terletak pada kurang sumber daya keuangan, minimnya sumber daya manusia, dan ketidakmampuan untuk memberikan kompensasi gaji yang tinggi.

Hal menarik dari model bisnis *Social Enterprise* adalah faktor ekonomis berada di bawah faktor sosial. Dalam menjalankan ritme bisnis yang baik, maka *Social Enterprise* memberikan kompensasi sosial untuk menarik karyawan maupun konsumen untuk menjadi bagian dari bisnis ini. Tidak dapat dinafikan bahwa era yang serba kapitalis seperti saat ini menstimulasi paradigma masyarakat untuk selalu berorientasi pada aspek ekonomis. Fenomena sosial ini berkorelasi terhadap kesulitan *Social Enterprise* dalam merekrut karyawan, karena memiliki keterbatasan dalam sumber daya keuangan. Oleh karena itu, *Social Enterprise* memberikan satu bentuk legitimasi kepada calon karyawan atau sukarelawan, yaitu kompensasi non-finansial (O’Hara, 2001). Umumnya, kompensasi non-finansial ini dapat dimanifestasikan dalam bentuk sertifikat, hadiah, dan hal-hal lain.

Selain menekankan pada aspek sosial, *Social Enterprise* sebagai model bisnis di era kontemporer ini juga memiliki elemen-elemen yang bersifat fundamental. Hal ini dijelaskan oleh Palesangi (dalam Al-Kahfi, 2019) bahwa elemen dari *Social Enterprise* ada empat, yaitu *social value*, *civil society*, *innovation*, dan *economic activity*. Pertama, *social value* atau nilai sosial ini berkaitan dengan visi perusahaan untuk mendiseminasi dampak sosial kepada masyarakat dan menjadi poin diferensiasi dengan perusahaan konvensional. Kedua, *civil society* atau masyarakat sipil ini menjadi subjek dan objek dari *Social Enterprise* dalam bergerak menjalankan model bisnisnya.

Sehingga partisipasi aktif dari masyarakat begitu penting untuk memberikan optimalisasi dari segi produktivitas perusahaan. Ketiga, *innovation* atau inovasi sebagai pembaharuan berkelanjutan dari *Social Enterprise* untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Keempat, *economic activity* atau aktivitas ekonomi harus diselaraskan dengan aktivitas sosial.

Tidak sampai di situ, penelitian yang ditulis oleh Al-Kahfi (2019) dengan judul “*Social Enterprise Berbasis Ekonomi Proteksi*” ini menjelaskan bahwa penerapan ekonomi proteksi dalam basis *Social Enterprise* memberikan dampak pada lahirnya usaha dari masyarakat dan perlindungan pada usaha masyarakat. Lahirnya usaha pada masyarakat ini dibentuk dari proses partisipasi secara aktif maupun pasif pada bergeraknya roda bisnis. *Social Enterprise* juga membuka diri untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan masyarakat. Di lain sisi, perlindungan usaha pada masyarakat ini bertalian dengan usaha *Social Enterprise* untuk memproteksi berbagai potensi buruk dari bisnis yang dijalankan oleh masyarakat. Misalnya, dengan mereduksi adanya kemungkinan persaingan bisnis dengan produk sejenis, lalu meminimalisir adanya produk selain dari *Social Enterprise*, dan mengembangkan sistem pasar yang adil bagi produk *Social Enterprise*.

Dari studi terdahulu di atas, maka dapat dipahami bahwa *Social Enterprise* merupakan lini bisnis yang menekankan pada aspek sosial secara fundamental. Model bisnis yang inheren dengan faktor sosial ini memperkuat nilai intensionalitas secara sosial dengan adanya karyawan dengan gaji yang relatif rendah atau sukarelawan. Kemudian, *Social Enterprise* juga terbukti secara ilmiah melakukan perlindungan pada usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Dalam hal ini, penelitian ini memiliki fokus kajian yang lebih spesifik pada irisan antara *Social Enterprise* dengan permasalahan kemiskinan di Indonesia. Peneliti ingin menganalisis optimalisasi dari peran *Social Enterprise* dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang sangat kompleks di Indonesia.

Perkembangan dari *Social Enterprise* sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat akan model bisnis yang partisipatif dan ramah akan lingkungan. Bahkan, *Social Enterprise* ini oleh masyarakat juga dielaborasi sebagai bentuk pendekatan bisnis pada model koperasi.

Hal ini diterangkan oleh Hartanti dan Setiaji (2020) dalam artikel berjudul "Implementasi *Social Entrepreneurship* Pada Koperasi Wanita Srikandi". Menurutnya, model bisnis *social entrepreneurship* atau *Social Enterprise* ini diinisiasi akan suatu kesadaran kolektif akan permasalahan di masyarakat – utamanya terkait ekonomi. Aspek misi sosial diinternalisasikan sebagai nyawa dari koperasi untuk dapat membangun sistem yang efektif dari segi unit usaha, yaitu simpan pinjam dan unit produksi. Dalam penelitian ini, diungkapkan bahwa *Social Enterprise* berdampak secara positif pada eskalasi sumber daya manusia, pengembangan sumber daya alam, dan peningkatan di sektor ekonomi lokal.

Selain itu, model bisnis *Social Enterprise* ini juga sampai pada aspek pariwisata dan irisannya dengan ekonomi lokal. Proposisi ini diterangkan secara komprehensif oleh Cakranegara, dkk (2020) bahwa kewirausahaan sosial atau *Social Enterprise* adalah solusi untuk mereduksi disparitas pada dunia usaha dengan menjalin kemitraan dengan usaha lain dan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan *Social Enterprise* sangat ditentukan oleh karakteristik dari pengusaha yang memiliki jiwa sosial tinggi, inovatif, kreatif, dan berani untuk mengambil keputusan di kondisi yang dinamis. Aspek pariwisata yang sempat surut akibat pandemi COVID-19 mampu ditingkatkan lagi dengan proses kewirausahaan sosial dan kolaborasi simetris dengan pemerintah serta *stakeholder* lain. Dengan itu, maka *Social Enterprise* hadir sebagai satu inovasi yang meningkatkan ekonomi lokal ketika keadaan sosial-ekonomi global sedang bermasalah.

Fokus dan isu yang diangkat oleh *Social Enterprise* memang sangat beragam, mulai dari ekonomi, sosial, teknologi, pengelolaan sampah, dan masih banyak lagi. Selain penjelasan di atas yang fokus pada dampak *Social Enterprise* pada sektor ekonomi, ternyata sektor pendidikan juga menjadi satu bagian yang relevan dan proporsional dalam *Social Enterprise*. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang ditulis oleh Sobirin (2021) mengenai implementasi *Social Enterprise* di SMP Juara Bandung. SMP Juara Bandung adalah manifestasi dari model *Social Enterprise* di sektor pendidikan dengan menggratiskan biaya operasional pendidikan bagi siswa yang tidak mampu. Biaya operasional pendidikan ini akan

ditanggung oleh Rumah Zakat sebagai donatur utama SMP Juara Bandung. Strategi bisnis yang diejawantahkan oleh SMP Juara Bandung adalah dengan melakukan subsidi silang antara siswa umum kepada siswa yang tidak mampu. Selain itu, aspek kepemimpinan, kerja sama, dan kolaborasi adalah tiga variabel yang menentukan keberhasilan dari implementasi *Social Enterprise* di sektor pendidikan ini.

Dari beberapa studi terdahulu di atas dapat diketahui bahwa *Social Enterprise* berdampak secara multidimensi pada beberapa sektor. Dampak paling umum dan utama adalah bagaimana implementasi dari *Social Enterprise* berimplikasi secara positif pada ekonomi lokal masyarakat. Selain itu, *Social Enterprise* juga menjadi suatu solusi inovatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata yang sempat terdampak oleh pandemi COVID-19. Di satu sisi, *Social Enterprise* memberikan dampak positif di sektor pendidikan yang inklusif dan egaliter. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki diferensiasi secara substansial terkait fokus kajian yang lebih khusus melihat optimalisasi peran *Social Enterprise* dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Social Enterprise meneguhkan semangat perubahan yang holistik dalam upaya menuju kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik. Menurut Perrini dan Vurro (2006) bahwa *Social Enterprise* atau kewirausahaan sosial menjadi instrumen bisnis yang mendukung adanya suatu perubahan sosial di masyarakat. *Social Enterprise* secara fungsional menghadirkan komponen kreativitas dan inovasi pada bentuk kewirausahaan untuk menunjang transisi perubahan ke arah yang positif. Ini yang menjadi justifikasi bahwa *Social Enterprise* dianggap menjadi inisiator dalam berinovasi di bidang bisnis dan aspek cakupannya yang luas, seperti memecahkan permasalahan sosial-ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemberian dampak yang sifatnya terukur bagi masyarakat.

Tidak berhenti di situ, *Social Enterprise* juga diasosiasikan sebagai gerakan bisnis-sosial dari masyarakat untuk memangkas kemiskinan di suatu daerah. Berdirinya *Social Enterprise* memiliki tujuan laten untuk menanggalkan berbagai bentuk permasalahan sosial di masyarakat – termasuk kemiskinan. *Social Enterprise* seakan menjadi variabel alternatif – selain pemerintah dan swasta –

untuk memantik pertumbuhan ekonomi masyarakat tanpa memperburuk keadaannya. Pemerintah sebagai pihak yang berotoritas masih terjebak di dalam kondisi masyarakat yang kurang berkualitas dan cenderung rendah. Berbagai persoalan masih menempel di setiap kebijakan pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah. Misalnya, persoalan korupsi pada anggaran kebijakan, kualitas sumber daya manusia yang rendah, kebijakan yang belum tepat sasaran, terbatasnya aksesibilitas kepada masyarakat sasaran, dan lain sebagainya.

Atas dasar ini, *Social Enterprise* menjelma sebagai kesadaran sosial masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan menggunakan kendaraan bisnis model baru. Penelitian berjudul "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial" yang ditulis oleh Firdaus (2014) bahwa *social business* – atau dalam terminologi ini disebut sebagai *Social Enterprise* – memiliki peran yang cukup sentral dalam membangun ekonomi masyarakat. Bentuk dari *Social Enterprise* ini direpresentasikan oleh Bina Swadaya dan Mitra Bali yang menjalankan peran utamanya untuk menyelesaikan permasalahan sosial, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia yang implikasinya pada kemiskinan. Yang menarik, lahirnya *Social Enterprise* ini merupakan respon dari pemerintah yang dirasa gagal dalam memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Penelitian lain yang ikut memberikan penjelasan akademis mengenai kegiatan *Social Enterprise* dan kemiskinan adalah penelitian yang ditulis oleh Yusriadi, dkk (2020) dengan judul "Pengentasan Kemiskinan Melalui *Socialpreneur*". Penelitian ini secara faktual mencoba menyoroti fenomena pandemi COVID-19 yang berdampak negatif pada kemiskinan di wilayah pedesaan. Kegiatan *sociopreneur* atau *Social Enterprise* yang membawa misi sosial untuk memutus rantai kemiskinan yang berkepanjangan ini menggunakan pendekatan *community development* atau pemberdayaan masyarakat. Jadi, *Social Enterprise* di sini diimplementasikan dalam bentuk pemberdayaan kepada ibu-ibu melalui pembuatan sabun cuci, jajanan tradisional, dan kegiatan konveksi. Dalam derajat ini, ibu-ibu sebagai subjek dari *Social Enterprise* diberikan

pemahaman komprehensif dan praktis mengenai mekanisme pembuatan barang-barang tersebut. Kemudian, juga diberikan sosialisasi dan edukasi dalam konteks bisnisnya, seperti desain produk, melakukan pemasaran, mengatur keuangan bisnis, dan lain sebagainya.

Dari studi terdahulu di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa *Social Enterprise* memang memiliki dampak yang faktual pada permasalahan kemiskinan di suatu daerah. *Social Enterprise* membawa narasi positif mengenai perubahan sosial yang dimulai dari masyarakat dan untuk masyarakat. Akan tetapi, yang menjadi titik diferensiasi dari penelitian ini adalah fokus kajian dan analisis mengenai optimalisasi peran *Social Enterprise* dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia yang lebih komprehensif. Kemudian, substansi yang akan dikembangkan dalam penelitian ini ialah dengan menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi kemiskinan di Indonesia secara objektif. Setelah itu, analisis dan elaborasi mengenai peran *Social Enterprise* dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan di Indonesia akan dinarasikan secara lengkap serta mendalam.

B. Wajah Kompleksitas Kemiskinan di Indonesia

Indonesia merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang masuk ke dalam 100 negara termiskin di dunia. Menurut *World Population Review* (2022), Indonesia menduduki posisi ke-73 dengan *Gross National Income* (GNI) sebesar 3.870 USD. GNI sendiri adalah pendapatan nasional bruto per kapita di setiap negara yang dikalkulasi dari interval pendapatan akumulatif negara dibagi dengan populasi masyarakatnya. Walaupun Indonesia masih cukup baik secara urutan ranking daripada negara-negara Asia Tenggara lain, seperti Myanmar, Kamboja, Timor Leste, Vietnam, dan Filipina. Akan tetapi, data ini memberikan satu gambaran bahwa Indonesia masih tenggelam dalam lautan kemiskinan yang menimpa masyarakat secara masif.

Kemiskinan masih menjadi monster yang menakutkan bagi Indonesia – dan bahkan negara-negara pada umumnya. Permasalahan kemiskinan merupakan gelombang pasang yang dapat menerjang masyarakat di berbagai wilayah dan berimplikasi pada lahirnya problematika baru yang negatif. Menurut

Nugroho (1995), umumnya masyarakat yang mengalami kondisi miskin adalah kelompok yang belum menyentuh standar hidup yang layak. Hal ini dapat dilihat dari tidak terakomodasinya beberapa kebutuhan hidup, seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal layak. Tidak tercapainya proses akomodasi standar hidup dari masyarakat miskin ini ditengarai oleh pendapatannya yang relatif kecil dan jauh dari rata-rata pendapatan per kapita negara. Bagaikan efek domino, kecilnya pendapatan ini berdampak pada kegagalan masyarakat untuk mengakses berbagai kebutuhan fundamental.

Selain itu, Sharp, dkk (1996) menggambarkan bahwa penyebab lahirnya fenomena kemiskinan adalah aspek atau dimensi ekonomi. Menurutnya, kemiskinan terjadi akibat ketidakselarasan pola kepemilikan sumber daya yang berkorelasi terhadap alokasi pendapatan yang tidak proporsional dan adil. Di satu sisi, rendahnya kualitas dan kapabilitas dari sumber daya manusia juga muncul sebagai variabel yang mendegradasi produktivitas di ruang-ruang pekerjaan. Lahirnya fenomena kemiskinan di masyarakat juga timbul dari aksesibilitas terhadap modal yang timpang dan terdiferensiasi dari struktur sosial serta kelas-kelas sosialnya. Kompleksitas yang mewarnai fenomena kemiskinan ini terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Jumlah penduduk yang mencapai 270 juta jiwa dengan heterogenitas dari suku, ras, agama, dan budaya menambah kerumitan akan fakta sosial-kemiskinan di dalamnya.

Indonesia mengalami dinamika permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks. Berbagai aspek multidimensional hadir menyertai berbagai kompleksitas bentuk permasalahan kemiskinan di Indonesia. *Pertama*, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia merupakan fenomena kompleks dan alamiah dari masyarakat dan berdampak pada realitas kemiskinan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi acap kali melekat pada negara-negara berkembang – seperti Indonesia. Pertumbuhan penduduk merujuk pada peningkatan dan pengurangan penduduk di suatu daerah. Pertumbuhan penduduk awalnya membawa pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, ketika pertumbuhan penduduk telah melampaui

kapasitas optimum, maka berpengaruh terhadap penurunan dari segi pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2010).

Di era orde baru, ada program Keluarga Berencana yang dicanangkan sebagai program untuk menekan angka pertumbuhan penduduk yang meningkat. Melansir dari Badan Pusat Statistik (2022) bahwa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia di tahun 2022 adalah 1,17. Angka ini memang menunjukkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yang berada di angka 1,25 di tahun 2020 dan 1,22 di tahun 2021. Pertumbuhan penduduk yang terjadi di suatu negara berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang signifikan tanpa ditopang kebutuhan sosialnya oleh negara, maka akan menyebabkan lahirnya fenomena kemiskinan yang tidak terbandung.

Perlu diingat bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi oleh pemerataan pembangunan, maka angka kemiskinan akan bertambah. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia mencerminkan bagaimana fenomena kemiskinan selalu mengikuti di belakangnya. Jumlah penduduk yang menyentuh angka 273 juta jiwa dan diproyeksikan akan terus meningkat menjadi variabel yang membayangi permasalahan kemiskinan. Ketika negara tidak mampu untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai dan akomodatif bagi seluruh masyarakat, tentu kemiskinan menjadi konsekuensi logis. Tidak hanya itu, pembangunan yang tidak merata dan sangat sentralistik memperkeruh kondisi kemiskinan di Indonesia.

Kedua, eskalasi tingkat pengangguran. Pengangguran adalah kondisi di mana masyarakat berusia aktif tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika masyarakat mengalami pengangguran, maka sudah pasti akan memasuki wahana kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tahun 2022 adalah 5,83% – walaupun mengalami penurunan – namun masih masih memperlihatkan angka kemiskinan yang tinggi. Kemiskinan merupakan situasi problematis yang lahir atas beberapa hal, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, motivasi yang rendah, dan minimnya lapangan pekerjaan yang proporsional. Oleh karena itu, semakin

tinggi tingkat pengangguran akan berkorelasi terhadap meningkatnya angka kemiskinan di suatu daerah. Persoalan pengangguran masih menjadi beban kompleks dan permasalahan yang terjadi di Indonesia.

Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan. Pendidikan adalah inkubator bagi lahirnya masyarakat yang memiliki kompetensi dan kapabilitas di berbagai bidang. Ketika masyarakat tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak, maka hal ini menjadi pemantik untuk munculnya permasalahan kemiskinan. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat yang tidak terdidik memiliki kemampuan di bawah standarisasi dan kualifikasi pekerjaan formal. Sehingga rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat akan membawa pada mental, kognitif, dan kompetensi yang buruk. Beririsan dengan substansi di atas, bahwa rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat akan menyebabkan pengangguran sebagai bentuk dari permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Melansir dari data yang dirilis oleh Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2021) bahwa tingkat pendidikan di Indonesia masih cukup rendah. Hal ini dapat terlihat dari 273 juta penduduk di Indonesia yang menamatkan pendidikan hingga Perguruan Tinggi adalah 17,08 juta (16,7%). Di lain sisi, penduduk yang menamatkan tingkat pendidikan SMP adalah 39,67 juta (14,57%) dan di tingkat SMA adalah 56,15 juta (20,63%). Sehingga akumulasi total yang bersekolah hingga jenjang sekolah lanjut pertama dan atas adalah 95,82 juta (35,2%). Sedangkan ada 64,84 juta (23,82%) yang menamatkan pendidikan hingga tidak pendidikan dasar (SD). Dari data ini dapat ditilik bahwa tingkat pendidikan dari masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Hal ini tentu menjadi problematika serius karena memiliki irisan dengan fenomena kemiskinan sebagai realitas faktual.

Keempat, distribusi pendapatan yang tidak merata. Masyarakat di usia produktif yang sedang bekerja pasti memiliki orientasi ekonomis untuk mendapatkan pendapatan. Akan tetapi, terjadi distribusi pendapatan yang tidak merata kepada masyarakat dari berbagai stratifikasi sosial. Distribusi pendapatan yang tidak merata kepada masyarakat menjadi cikal bakal dari munculnya permasalahan kemiskinan. Pendapatan yang tidak merata

akan mengakibatkan jurang pemisah antara masyarakat yang kaya dan yang miskin. Ketika hal ini terjadi, disparitas sosial yang tidak dapat dibendung akan menghasilkan suatu bentuk kemiskinan. Secara normatif, distribusi pendapatan adalah mekanisme dan instrumen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indonesia yang cenderung sentralistik dalam hal pembangunan membuat ada ketimpangan dari distribusi pendapatan di daerah-daerah. Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi salah satu bentuk kompleksitas kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

C. Social Enterprise sebagai Inovasi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Sektor bisnis konvensional telah banyak terdisrupsi dengan mengarah pada lini bisnis yang diselaraskan dengan kebutuhan dan partisipasi sosial masyarakat. Bisnis konvensional yang cenderung menampilkan kegiatan produksi dan berorientasi untuk menghasilkan *profit* sebanyak mungkin tanpa meninjau aspek lain – sosial dan lingkungan – mengalami transformasi positif ke arah yang lebih akomodatif. Transformasi yang terjadi juga merepresentasikan narasi mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai bentuk komitmen negara-negara di dunia untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan tidak terkungkung pada aspek ekonomi saja, namun juga wajib memperhatikan aspek sosial-masyarakat dan lingkungan hidup.

Perubahan dan kesadaran dari beberapa orang di lini bisnis menggerakkan satu narasi untuk mulai mengintegrasikan aspek bisnis konvensional dengan sosial. Terminologi atau konsep yang mencerminkan dari transformasi paradigmatis ini dikenal dengan *Social Enterprise*. Menurut Certo dan Miller (2008), ada tiga cara untuk mengenai *Social Enterprise*. *Pertama*, misi objektif yang diinternalisasi dalam roda bisnis adalah misi sosial untuk memberikan dampak secara nyata pada masyarakat – tanpa mengurangi aspek *profit*. *Kedua*, model bisnis cenderung mengalami kompleksitas dalam melakukan pengukuran pada performa kinerja. Sebab, narasi daripada misi yang dibawa adalah misi sosial dan secara interval tidak dapat diukur seperti aspek ekonomi. *Ketiga*, lini bisnis ini sering kali memanfaatkan sumber daya manusia secara

sukarela (*volunteer*) dengan memperkenalkan nilai-nilai sosial sebagai daya tarik.

Pada konteks ini, *Social Enterprise* menyimpan satu misi untuk memotong akar kemiskinan di suatu daerah yang diselaraskan dengan produk atau jasa bisnisnya. Akan tetapi, umumnya *Social Enterprise* percaya bahwa proses pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah jalan untuk mencerdaskan masyarakat dan mengasah kompetensinya agar dapat terhindar dari jeratan kemiskinan. Di Indonesia, *Social Enterprise* memiliki variasi yang beragam dari produk atau jasa bisnis yang ditelurkan. Hal ini tentu akan berkorelasi terhadap efektivitas dan intensitas dari *Social Enterprise* tersebut dalam memformulasikan program pengentasan kemiskinan. Perlu diketahui bahwa kemiskinan merupakan fakta sosial yang kompleks dan multidimensional. Untuk memutuskan tali kemiskinan yang panjang, maka harus diselesaikan permasalahan kunci yang menjadi faktor penyebab kemiskinan.

Pertama, kemiskinan di Indonesia secara teoritis banyak disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dunia pekerjaan yang semakin kompetitif mengharuskan adanya eskalasi kompetensi dan kapabilitas di bidang tertentu untuk menunjang perekonomiannya. Dalam konteks ini, *Social Enterprise* membawa sebuah misi sosial untuk melakukan pemberdayaan secara intensif dan sistematis dalam rangka meningkatkan kualitas dari masyarakat tersebut. *Social Enterprise* sebagai lini bisnis yang dinamis dan berorientasi pada misi sosial akan menciptakan rangkaian proses pemberdayaan masyarakat, mulai dari melakukan proses persiapan, tahapan pengkajian, tahapan perencanaan program, tahap implementasi program, dan tahap evaluasi. Oleh karena itu, *Social Enterprise* menjadi organ eksternal yang melakukan upaya pengentasan kemiskinan dengan cara-cara sistematis, seperti pemberdayaan masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh *Social Enterprise* ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berdaya. Menciptakan masyarakat berdaya ini terdiri dari beberapa aspek. Aspek pertama, yaitu usaha dari *Social Enterprise* untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas dari masyarakat agar dapat mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu, aspek kedua, yaitu

usaha dari *Social Enterprise* untuk menanam bibit-bibit wirausahawan baru dengan produk atau jasa yang dimilikinya. Misalnya, masyarakat miskin yang menjadi wirausahawan di bidang konveksi atau bidang kuliner adalah beberapa hasil dari proses pemberdayaan intensif dari *Social Enterprise*. Ketika masyarakat berani untuk berbisnis dan memiliki kompetensi di bidang tertentu, maka hal ini menjadi catatan baik untuk menghapus angka kemiskinan di Indonesia. Serta, secara tidak langsung hal ini ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kedua, beberapa permasalahan kemiskinan di Indonesia terjadi karena distribusi pendapatan yang tidak merata dan minimnya pendapatan. Beberapa *Social Enterprise* di Indonesia yang bergerak di bidang jasa keuangan mikro berusaha untuk melakukan peminjaman uang kepada masyarakat miskin. Selain itu, *Social Enterprise* di bidang jasa keuangan ini juga melakukan proses penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dalam interval waktu tertentu. Hal ini juga sebagai upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menabung dan tidak hidup boros tanpa kalkulasi yang terukur. Kemudian, *Social Enterprise* ini juga membuka layanan pembiayaan bagi masyarakat miskin berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa cara-cara ini menjadi mekanisme bagi *Social Enterprise* untuk memfasilitasi masyarakat miskin dalam konteks keuangan dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Ketiga, Indonesia masih terjerat akan rendahnya pendidikan pada masyarakat yang berdampak pada permasalahan kemiskinan. Di beberapa *Social Enterprise* di bidang pendidikan menyediakan berbagai fasilitas gratis untuk masyarakat miskin dapat mengenyam proses pembelajaran yang setara. Acap kali keterbatasan pendapatan dari orang tua membuat anak-anak tidak mendapatkan akses pendidikan. Sehingga hal ini akan melahirkan lingkaran setan dari masyarakat miskin dan sulit untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Pendidikan adalah solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjadi jalan pembuka di gerbang-gerbang pekerjaan. Kualifikasi pekerjaan yang tinggi dan harus lulusan tingkat pendidikan tertentu

membuat *Social Enterprise* berinisiatif untuk membuka layanan belajar gratis atau beasiswa pendidikan untuk siswa terkategori miskin. Cara ini merepresentasikan fungsi sosial dari *Social Enterprise* untuk mengatasi problematika kemiskinan di Indonesia.

Secara praksis, *Social Enterprise* di Indonesia telah mengejawantahkan berbagai peran dalam spektrum keberfungsian sosial yang telah dijelaskan di atas. Namun, secara elaboratif, penulis ingin mencoba menganalisis menggunakan pendekatan keberfungsian sosial. Pendekatan ini melihat bahwa *Social Enterprise* adalah manifestasi dari kemampuan individu atau kelompok dalam mendistribusikan aspek-aspek positif kepada masyarakat miskin. *Social Enterprise* merupakan subjek yang menjalankan proses-proses sosial-fungsional dalam rangka membangun sumber daya manusia yang dilemahkan oleh sistem – seperti yang dibahas dalam pendekatan demokrasi-sosial. Sebagai suatu sintesis, maka pendekatan keberfungsian sosial ingin melemparkan suatu gagasan yang konkret dengan tindakan sosial yang faktual dan tidak utopis.

Menurut pandangan dari Suharto (2009), pendekatan keberfungsian sosial melihat apa yang dimiliki oleh masyarakat miskin dan tendensi positif apa yang dapat diakselerasikan oleh individu atau kelompok berdaya – dalam hal ini *Social Enterprise*. *Social Enterprise* tidak hanya memberikan modal ekonomi kepada masyarakat miskin, namun juga memberikan modal sosial yang dikonversikan ke dalam berbagai program-program pemberdayaan dan edukasi. *Social Enterprise* berupaya untuk menstimulasi konstruksi sosial dari masyarakat miskin yang fatalis menjadi optimis mengenai hidup. Mereka dibimbing, dididik, dan diberdayakan melalui agenda-agenda sosial yang inheren akan nilai-nilai positif.

Tabel 1. Manifestasi Peran *Social Enterprise* untuk Mengatasi Kemiskinan di Indonesia

No	Nama	Peran Sosial
1	Tanijoy	<i>Social Enterprise</i> yang bertujuan untuk membentuk ekosistem pertanian dan menghubungkan petani melalui teknologi.
2	Ecodoe	<i>Social Enterprise</i> yang menawarkan souvenir dan hadiah buatan tangan untuk perusahaan dan klien pemerintah.
3	Du Anyam	<i>Social Enterprise</i> yang bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui kerajinan anyaman
4	Mitra Bali	<i>Social Enterprise</i> yang berfokus pada pembangunan sosial dan ekonomi dengan

No	Nama	Peran Sosial
		melakukan pemberdayaan kelompok pengrajin
5	Bina Swadaya	<i>Social Enterprise</i> yang memiliki layanan keuangan mikro melalui Koperasi Bina Swadaya Nusantara dan perbankan mikro untuk sektor perekonomian rakyat
6	Lumbang Dana Indonesia	<i>Social Enterprise</i> berkomitmen untuk menyediakan alternatif akses keuangan melalui transformasi jasa keuangan dan bertujuan meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan ekonomi Indonesia
7	Mahoni Edukasi Digital	<i>Social Enterprise</i> yang mengembangkan aplikasi digital untuk memberikan edukasi secara gratis.
8	Solve Education!	<i>Social Enterprise</i> pendidikan inovatif dan gratis yang dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai kelas ekonomi
9	We The Teachers (WTT)	<i>Social Enterprise</i> yang fokus untuk meningkatkan kondisi guru dengan memberikan sesi pengembangan, perancangan, dan pemetaan kualitas siswa melalui observasi kelas

Sumber : Data Sekunder

IV. KESIMPULAN

Social Enterprise merupakan model bisnis di era kontemporer yang lahir dari kesadaran kolektif praktisi bisnis akan pentingnya memberikan dampak secara sosial kepada masyarakat. Secara koheren, *Social Enterprise* memiliki dampak secara faktual terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal ini tercermin dari beberapa cara dan program yang dilakukan sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan. *Pertama*, *Social Enterprise* melakukan proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi masyarakat agar dapat bersaing di dunia profesional serta menjadi praktisi bisnis baru. *Kedua*, *Social Enterprise* yang bergerak di jasa keuangan memberikan layanan pinjaman kepada masyarakat miskin serta memberikan edukasi akan pentingnya mengatur keuangan secara kalkulatif. *Ketiga*, *Social Enterprise* yang bergerak di bidang pendidikan menyediakan layanan pendidikan secara gratis dan beasiswa pendidikan untuk masyarakat miskin sebagai bentuk komitmen dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Bagi peneliti selanjutnya, topik mengenai *Social Enterprise* dapat diteliti secara lebih komprehensif terkait eksistensi, fungsi, dan perannya. Mengingat, *Social Enterprise* merupakan model bisnis di era kontemporer yang memiliki implikasi positif terhadap beberapa sektor, seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat melihat dampak secara makro dan mikro dari *Social Enterprise*

terhadap beberapa sektor fundamental di Indonesia. Dengan hal ini, masyarakat akan mendapatkan wawasan mengenai *Social Enterprise* dari sisi substansi dan praksisnya. Sehingga partisipasi masyarakat untuk berkontribusi melalui platform *Social Enterprise* akan meningkat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih terhadap pihak-pihak yang berkontribusi dan membantu penulisan artikel ini sehingga artikel ini dapat ditulis secara maksimal.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kahfi, M. F. (2020). *Social Enterprise Berbasis Ekonomi Proteksi*. Khazanah: Jurnal Mahasiswa. Vol. 11, No. 2. <https://journal.uui.ac.id/khazanah/article/download/16662/10463>.
- Belasari, B., Rahman, B., & Ranto, R. (2022). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai Inovasi dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020. *Jurnal Studi Inovasi*, 2(2), 1-16. <https://jurnal.studiinovasi.id/jsi/article/download/85/51>.
- BPS Indonesia. 2022. Berita Resmi Statistik. <https://www.bps.go.id/>.
- Christian, Y. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Inovatif dalam Mendukung Kemajuan Daerah Perkotaan. *Jurnal Studi Inovasi*, 1(1), 52-61. <https://jurnal.studiinovasi.id/jsi/article/download/10/9>.
- Certo, S. T., & Miller, T. (2008). *Social Entrepreneurship: Key Issues and Concepts*. Business Horizons. Vol. 51, No. 4, Hal. 267-271. <http://www.igntu.ac.in/eContent/IGNTU-eContent-861724313123-MSW-4-Dr.HanjabamShukhdebaSharma-SocialEntrepreneurship-1,2,3,4,5.pdf>.
- Chambers, Robert. (1988). *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial).
- Cox, David. (2004). *Outline of Presentation on Poverty Alleviation Programs in The Asia Pacific Region*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. 2 Maret 2004.
- Cresswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dasgupta, P. (2003) *Social Capital and Economic Performance: Analytics*. In: Ostrom, E. and Ahn, T., Eds., *Foundations of Social Capital*, Edward Elgar, Cheltenham, Hal. 309-339.
- Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2021). *Berita Resmi Dukcapil Kemendagri*. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/>.
- DuBois, Brenda., & Karla Krogsrud Miley. (1992). *Social Work: An Empowering Profession*. Boston: Allyn and Bacon.
- Febriana, E. (2010). *Strategi untuk peningkatan pendapatan rumah tangga petani miskin di perdesaan: studi kasus pada rumah tangga petani miskin di desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi* (Doctoral dissertation, Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi).
- Firdaus, Nur. (2014). *Pengentasan Kemiskinan melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*. Vol. 22, No.1, Hal. 55-67. <https://jurnalekonomi.lipi.go.id/index.php/JEP/article/download/29/13>.
- Hartanti, V. G., & Setiaji, K. (2020). *Implementasi Social Entrepreneurship pada Koperasi Wanita Srikandi*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*. Vol. 12, No. 2. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/download/29772/17079>.
- Hynes, Briga. (2009). *Growing The Social Enterprise – Issues and Challenges*. *Social Enterprise Journal*. Vol. 5, No. 2, Hal. 114-125. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17508610910981707/full/html?casa_token=F4uFl_Hq4MkAAAA:0frp028h-FjTcew71oYtWvcJinKLOGDUZIS6mBA59g6qeCs0JKhsCj09B7JbgMntA-2Jv2_sCFqR1_QQzSUa-7j0FIXKiIX_OokUpQwGvpz-7uNLFvs.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Penerbit Humaniora.
- Kementerian Keuangan Indonesia. (2021). *Berita Resmi Kemenkeu*. <https://www.kemenkeu.go.id/home>.

- Kuncoro, Mudrajad. (2010). Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Fokusmedia.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Essex: Pearson Education Limited.
- O'Hara, P. (2001), Ireland: *Social Enterprise s and Local Development in Borzaga*. The Emergence of *Social Enterprise*, Routledge.
- Perrini, F., & C. Vurro. (2006). *Social Entrepreneurship: Innovation and Social Change Across Theory and Practice*. New York (USA): Palgrave Macmillan.
- Putri, M., & Mubaroq, H. (2022). Strategi Pengimplementasian Konsep Kampung Tematik sebagai Wujud Masyarakat untuk Mengentaskan Desa 3T (Studi kasus: Kampung Tematik Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo). *Jurnal Studi Inovasi*, 2(1), 1-8.
<https://jurnal.studiinovasi.id/jsi/article/download/72/41>.
- Salim, Emil. (1984). *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan*. Jakarta: Inti Dayu.
- Sharp, Ansel M, dkk. (1996). *Economic of Social Issue*. Edisi Ke-12. Richard D. Irwin. Chicago.
- Siporin, Max (1975). *Introduction to Social Work Practice*. New York: Macmillan Publishing. Co, Inc.
- Snyder, H. (2019). *Literature Review as A Research Methodology: An Overview and Guidelines*. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296319304564>.
- Sobirin, Muhammad. (2021). Implementasi Usaha Sosial (*Social Enterprise*) di SMP Juara Bandung. *Tsaqafatuna: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 3, No. 2.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2319976&val=19776&title=implementasi%20usaha%20sosial%20social%20enterprise%20di%20smp%20juara%20bandung>.
- Supriatna, Tjahya. (1997). *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan kemiskinan*. Bandung. Humaniora Utama Press (HUP).
- Suharto, Edi. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wibhawa, Budi, dkk. (2010). *Dasar-dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjajaran.
- World Population View. (2022). *Indonesia Population 2022 (Live)*.
<https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population>.
- Cakranegara, P. A., Rahadi, D. R., & Sinuraya, S. D. (2020). Model Kewirausahaan Sosial Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Sektor Pariwisata di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(2), 189-205.
<https://scholar.archive.org/work/4ni64f7hwfdtpgk4ltysw64t6u/access/wayback/http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jmdk/article/download/4318/pdf>.



Korespondensi

Email : chaeka17@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

INOVASI SOSIAL TIPOLOGI EKONOMI POLITIK BERBASIS ETNIS PADA MASYARAKAT DI KELURAHAN SUNGAI SELAN BANGKA TENGAH

Eka Mawar Hartati^{1*}, Bustami Rahman^{2*}, Ibrahim^{3*}

^{1,2,3} Universitas Bangka Belitung | Gang IV No. 1, Balunijuk,
Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

Disetujui: 25 Januari 2023

Abstract

The background of this research is that the economy of the Sungai Selan community can be categorized as quite good and has progressed from previous years. In this case, the economic progress of the Sungai Selan community itself is supported by various types of livelihoods and the abundance of natural resource potential. The first source of livelihood for the people of Sungai Selan, who incidentally are farmers and fishermen, they also work as traders, as carpenters, and many other jobs. The aims of this research are: (1) to find out the typology of ethnic-based political economy; (2) to find out what factors money causes the formation of the political economy typology. This research uses qualitative methods because it is done naturally. Where the qualitative method is carried out based on data collection techniques, inductive data analysis and is carried out through data collection with participant observation to find out this phenomenon. This study was analyzed using the Need for Achievement theory (Need for Achievement) put forward by David McClelland and a rational choice put forward by James Coleman. and nature, interest factors, and origin factors. There are several policy innovations that the researcher presents.

Keywords: Ethnicity, Political Economy, Policy Innovation, Livelihood, Typology

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perekonomian masyarakat Sungai Selan dapat di katagorikan cukup baik dan sudah mengalami kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini, kemajuan perekonomian masyarakat Sungai Selan sendiri didukung oleh berbagai macam jenis mata pencaharian serta melimpahnya potensi sumber daya alam. Sumber pertama mata pencaharian masyarakat Sungai Selan yang notabeneanya sebagai petani dan nelayan, mereka juga bekerja sebagai pedagang, menjadi tukang, dan masih banyak lagi pekerjaan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui tipologi ekonomi politik berbasis etnis; (2) untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembentukan tipologi ekonomi politik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dilakukan secara alamiah. Dimana pada metode kualitatif dilakukan berdasarkan teknik pengumpulan data, analisis data yang bersifat induktif serta dilakukan melalui pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena tersebut. Studi ini dianalisis menggunakan teori *Need for Achievement* (kebutuhan akan prestasi) yang di kemukakan oleh David McClelland dan teori pilihan rasional di kemukakan oleh James

Coleman. Hasil temuan penelitian ini adalah di Kelurahan Sungai Selan masih terdapat berabagai macam etnis dan beragam jenis mata pencaharian, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembentukan ekonomi politik di Kelurahan Sungai Selan seperti, faktor kondisi geografis, faktor lingkungan dan alam, faktor kepentingan, dan faktor daerah asal. Terdapat juga beberapa inovasi kebijakan yang peneliti sajikan.

Kata Kunci: Ekonomi Politik, Etnis, Inovasi Kebijakan, Mata Pencaharian, Tipologi

I. PENDAHULUAN

Bangka Belitung merupakan provinsi yang memiliki banyak Etnis atau Suku yang beragam, pada tahun 2019 mayoritas Suku yang ada di Bangka Belitung adalah Suku Melayu. Sebelum adanya Etnis atau Suku Melayu masuk ke dalam Provinsi Bangka Belitung terdapat Suku Lokal, yaitu Suku Lom dan Suku Sekak. Selain penduduk asli Melayu, di Provinsi Bangka Belitung juga terdapat berbagai macam suku bangsa, seperti Suku Bugis, Suku Jawa, Suku Tionghoa, dan sebagainya. Terdapat salah satu wilayah yang ada di Bangka Belitung memiliki beragam Etnis seperti halnya di Kelurahan Sungai Selan yang menjadi lokus penelitian ini.

Perekonomian masyarakat Sungai Selan dapat dikategorikan cukup baik dan sudah mengalami kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini, kemajuan perekonomian masyarakat Sungai Selan sendiri didukung oleh berbagai macam jenis mata pencaharian serta melimpahnya potensi sumber daya alam. Sumber pertama mata pencaharian masyarakat Sungai Selan yang notabeneanya sebagai petani dan nelayan, mereka juga bekerja sebagai pedagang, menjadi tukang, dan masih banyak lagi pekerjaan lainnya. Sungai Selan mempunyai potensi yang tertinggi dalam sektor pertambangan, sehingga dapat meningkatkan pendapat masyarakat sekitar.

Mata pencaharian antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya tentu berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya perbedaan geografis, sosial, kebudayaan, serta etnis/suku mereka masing-masing yang menjadi penyebab utama. Faktor-faktor tersebut sangatlah berpengaruh

terhadap corak mata pencaharian suatu masyarakat.

Adapun tipologi mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Sungai Selan sangatlah beragam. Tipologi merupakan suatu konsep yang mendeskripsikan objek berdasarkan atas kesamaan sifat-sifat dasar yang berusaha memilih atau mengklarifikasikan bentuk keragaman dan kesamaan jenis. Dalam hal ini, tipologi merupakan hasil elaborasi karakteristik arsitektur, yang tersusun dari beberapa unsur kultur lokal dan luar yang spesifik dalam suatu struktur klasifikasi, singkatnya diartikan sebagai klasifikasi atau pembagian (Amiuz, 2006).

Dalam hal ini ada sebuah fenomena yang khas dimana sistem mata pencaharian yang ada di Kelurahan Sungai Selan digolongkan berdasarkan etnis. Sebagaimana halnya etnis Melayu, pada awalnya etnis Melayu ini sendiri bekerja sesuai keinginan serta kemampuan mereka, tetapi sekarang mereka mulai mengelompokkan diri untuk bekerja berdasarkan etnis mereka masing-masing. Di Kelurahan Sungai Selan terdiri atas berbagai macam etnis, yakni, Melayu, Tionghoa, Bugis, Jawa, Batak, dan Palembang. Dalam hal ini, etnis-etnis tersebut mulai hidup secara berkelompok dengan ini mata pencaharian masyarakat yang terlihat mengelompokkan diri berdasarkan etnis mereka masing-masing.

Sebagaimana diketahui biasanya ada sebagian kelompok etnis yang melakukan migrasi ke daerah tertentu dan membentuk suatu kelompok dalam satu hubungan identitas sosial yang sama, sehingga mereka hidup dalam satu daerah untuk melangsungkan hidup mereka. Dalam hal ini mereka akan memanfaatkan situasi sosial tersebut untuk membentuk sebuah pekerjaan yang bercorak kesukubangsaan (*culture entrepreneurship*). Situasi sosial ini merupakan dorongan yang memaksa kelompok masyarakat membentuk pilihan pekerjaan mereka atas dasar ekonomi politik dan geo politik mereka masing-masing. Hal semacam ini banyak terjadi usaha yang bercorak kesukubangsaan ini yakni berkembang sebagaimana yang di kemukakan oleh Effendi (2002), ekonomi masyarakat banyak menggunakan identitas etnis serta bersumber dari warisan budaya masyarakat. Oleh karena itu terjadilah pengelompokkan

mata pencaharian masyarakat berdasarkan etnis mereka masing-masing.

Oleh sebab itu, diperlukan sebuah inovasi sosial yang dalam hal adalah inovasi kebijakan yang penting dilakukan dalam masyarakat yang memiliki etnis yang beragam. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik antar etnis atau menjaga keharmonisan sosial, adanya kesetaraan serta menghindari perebutan akses atas pemanfaatan sumber daya alam, meningkatkan rasa toleransi dan pola pikir yang modern daripada konvensional, saling berbaurnya interaksi sosial masyarakat meskipun berbeda etnis, bahkan untuk meminimalisir adanya dominasi salah satu etnis dalam sebuah daerah yang berimplikasi pada pertentangan. Selain itu, inovasi sosial penting dilakukan agar terciptanya pembangunan berkelanjutan yang terhindar dari kemiskinan atau ketidaksejahteraan masyarakat Kelurahan Sungai Selan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan paparan di atas penelitian ini akan berfokus pada bahasan bagaimana tipologi ekonomi politik berbasis Etnis di Kelurahan Sungai Selan serta faktor-faktor yang menyebabkan pembentukan tipologi ekonomi politik berbasis etnis di Kelurahan Sungai Selan tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini yakni suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif, maksudnya sebuah prosedur penelitian dari data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari hasil wawancara mendalam informan di lapangan atau lokasi penelitian serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena serta aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh data yang akurat serta sesuai dengan faktanya.

Penelitian ini dianalisis menggunakan 2 teori yaitu pertama teori *Need for Achievement* (kebutuhan akan prestasi) merupakan sebuah ide atau gagasan yang dipopulerkan oleh David McClelland. David McClelland, seorang ahli psikologi sosial. Prinsip dasar teori *Need for*

Achievement adalah masyarakat yang memiliki tingkat kebutuhan tinggi untuk berprestasi pada umumnya akan menghasilkan perkembangan ekonomi yang lebih cepat. Teori tersebut menyatakan bahwa orang-orang dengan kebutuhan akan tinggi ini akan menetapkan target yang matang untuk diri sendiri dan mengambil resiko yang disengaja untuk mencapai target yang diharapkan. Individu yang memiliki kebutuhan akan pencapaian ini mencari cara yang inovatif dalam melakukan pekerjaan. Mereka menganggap pencapaian tujuan sebagai hadiah dan menghargainya lebih dari sekedar hadiah financial. Teori tersebut memiliki 2 indikator yakni kemampuan dan kreativitas.

Teori kedua yaitu teori pilihan rasional, yang dipopulekan oleh James Coleman. Teori pilihan rasional menjelaskan bahwa tindakan perseorangan mengarah kepada suatu tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan). James dalam teori tersebut membagikan 2 unsur yaitu aktor dan sumber daya. Aktor merupakan seorang atau individu yang melakukan tindakan, dan mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik. Sumber daya adalah setiap potensi yang dimiliki, bisa berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Aktor memiliki kontrol serta memiliki kepentingan tertentu terhadap sumber daya. James Coleman juga menerangkan interaksi antar aktor dan sumber daya ke tingkat sistem sosial.

Sementara metode atau teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini yaitu model Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian di lapangan yang peneliti analisis sesuai dengan teori *Need for Achievement* oleh David McClelland (kebutuhan dan prestasi) dan teori pilihan rasional oleh James Coleman. Berikut penjelasannya:

A. Tipologi mata pencaharian berbasis Etnis

Sistem mata pencaharian merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang dilakukan sekelompok masyarakat untuk keberlangsungan hidup. Hal ini banyaknya

jenis-jenis mata pencaharian yang ada di Kelurahan Sungai Selan seperti halnya, pertanian, nelayan, buruh harian, dan pedagang. Dengan beragamnya jenis mata pencaharian yang ada di masyarakat Kelurahan Sungai Selan sendiri ada sebagian dari mereka yang mengelompokkan diri mereka berdasarkan etnis mereka masing-masing. Masyarakat di Kelurahan Sungai Selan ini sendiri saling bergantung satu sama lainnya, akan tetapi dalam hal ini masyarakat di Kelurahan Sungai Selan banyak bergantung hanya untuk memperluas wilayah, untuk mendapatkan peluang yang besar, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, di Kelurahan Sungai Selan sendiri di kategorikan ada yang saling bergantung tapi tidak adanya kesetaraan, dimana banyak etnis atau suku yang ada di Kelurahan Sungai Selan hanya menjadi buruh dalam kelompok Etnis yang ada di Kelurahan Sungai Selan.

Berikut jenis mata pencaharian penduduk yang ada di Kelurahan Sungai Selan yaitu :

1. Petani

Berdasarkan penelitian di lapangan mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Sungai Selan sangatlah dominan dengan bidang pertanian. Hal ini di sebabkan karena daerah Kelurahan Sungai Selan mempunyai potensi yang cukup baik jika dilihat dari pengelolaan tanah, dan memelihara tanaman seperti ada jagung, singkong, kacang tanah, buah-buahan, dan ada juga yang menanam sayursayuran.

2. Nelayan

Seperti keterangan yang di sampaikan warga di Kelurahan Sungai Selan bahwa masyarakat Sungai Selan juga bekerja sebagai nelayan. Nelayan adalah seseorang atau sekelompok orang yang bekerja menangkap ikan atau jenis hewan laut lainnya yang sangatlah erat hubungannya dengan perairan. Masyarakat menangkap ikan biasanya menggunakan peralatan sederhana, seperti jala. Namun ada juga masyarakat yang telah menggunakan peralatan yang modern serta canggih. Mereka bekerja biasanya berkelompok dan kelompok tersebut biasanya di dominan oleh keluarga mereka, ataupun yang satu golongan etnis dengan mereka.

3. Buruh Harian

Pekerjaan sebagai buruh menjadi pekerjaan minoritas masyarakat di

Kelurahan Sungai Selan, seperti keterangan yang disampaikan salah seorang buruh angkut barang di Kelurahan Sungai Selan. Masyarakat yang bekerja sebagai buruh harian masih di katagorikan minim pendapatan karena mereka hanya terpaku oleh kapal barang yang keluar masuk ke pelabuhan Sungai Selan, jika tidak ada kapal barang yang masuk tentu mereka tidak bekerja pada hari itu. Orang-orang yang bekerja sebagai buruh bukanlah orang-orang pribumi dari Sungai Selan melainkan para pendatang atau etnis lain.

4. Pertambangan

Sektor pertambangan ini merupakan salah satu jenis mata pencaharian yang di andalkan di Kelurahan Sungai Selan, selain melimpahnya sumber daya alam hasil yang di dapatkan pun sudah pasti. Selain itu, dengan adanya hasil pertambangan ini sendiri tentu akan memperbaiki pendapatan masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya.

5. Pedagang

Kebanyakan yang jadi pedagang bukan orang asli Kelurahan Sungai Selan melainkan pendatang yang kebanyakan etnis Cina (Tionghoa) dan Bugis tetapi jika bugis ini lebih dominan berjualan di pasar pagi Sungai Selan. Mereka berdagang dengan cara keliling dari desa ke desa menggunakan motor yang menjual sayur, bahan makanan lainnya.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembentukan Ekonomi Politik

Pembentukan ekonomi politik dalam kehidupan sosial yang memiliki etnis beragam di Kelurahan Sungai Selan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Faktor lingkungan dan alam

Masyarakat Sungai Selan bekerja masih bergantung dengan keadaan lingkungan serta alam, dimana cuaca pada saat ini kerap kali berubah. Selain itu, kondisi lingkungan pun sekarang sering berubah sesuai dengan sifat alam dan musim. Selain itu faktor lingkungan juga berpengaruh seperti halnya keadaan sekitar, masyarakat di Kelurahan Sungai Selan mereka selalu ingin hasil yang sudah pasti dan mereka pun kadang terlihat mengelompokkan diri dengan Etnis mereka, karena adanya pengaruh antar Etnis satu sama lainnya.

2. Faktor geografis

Dalam hal ini lokasi beraktivitas juga menentukan terbentuknya suatu kelompok masyarakat. Selain itu kondisi geografis juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Hal ini di sebabkan karena kondisi geografis sendiri tentu menunjukkan adanya sebuah perbedaan baik itu budaya, bahasa, adat istiadat, seta kepercayaan.

Mereka sebagai Etnis pendatang di Kelurahan Sungai Selan ini sebelum bermigrasi sangat memperhatikan kondisi geografis Sungai Selan karena bagi mereka kondisi geografis ini sendiri sangat berpengaruh besar. Dalam hal ini kondisi geografis ini sangat berpengaruh terhadap terbentuknya ekonomi politik berbasis Etnis pada masyarakat di Kelurahan Sungai Selan, karena terbentuknya suatu kelompok masyarakat di pengaruhi oleh kondisi geografis.

3. Faktor kepentingan

Faktor kepentingan ini sendiri sangat berpengaruh terhadap pemebentukan ekonomi politik berbasis Etnis di Kelurahan Sungai Selan. Jika terdapat kepentingan yang sama maka mereka tentunya akan membentuk suatu kelompok sosial. Dalam hal ini setiap individu atau kelompok tentunya pasti mempunyai tujuan masing-masing dalam hal ini saling mereka akan bersaing satu sama lainnya untuk mencapai tujuan mereka seperti halnya dalam bidang pekerjaan dan cenderung membuat kelompok-kelompok sesuai dengan kepentingan mereka.

4. Faktor daerah asal

Diketahui bahwa Sungai Selan memiliki beragamnya etnis baik etnis pendatang maupun etnis asli yang mendominasi sehingga tentu terjadilah sebuah perbedaan antar Etnis satu sama lainnya.. Namun, hal ini tentu harus adanya solusi yang tepat untuk menangani adanya konflik antar Etnis tersebut seperti, memberikan pola mediasi dimana hal ini harus dilakukan oleh pemerintah melalui institusi yang berwenang dari suatu daerah sampai ke pusat. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap staf Kelurahan Sungai Selan, bahwa sejauh ini belum ada konflik yang terjadi antar Etnis untuk di lingkungan Kelurahan Sungai Selan

walaupun banyak masyarakat yang berbeda-beda Etnis tapi mereka saling menghormati satu sama lainnya.

5. Faktor sejarah kedatangan

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap daerah memiliki keberagaman yang disebabkan oleh semakin banyaknya penduduk pendatang yang mendiami suatu wilayah baik itu agama, rasa tau etnis, dan sebagainya. Kelurahan Sungai Selan merupakan salah satu daerah penghasil timah di Provinsi Bangka Belitung sehingga hal ini banyak Etnis-Etnis luar yang ingin masuk ke wilayah ini sendiri, mereka mulai tinggal dalam jangka waktu yang panjang, bahkan menikah dengan penduduk lokal di Kelurahan Sungai Selan. Maka oleh karena itulah membuat adanya keberagamam Etnis di Kelurahan Sungai Selan.

C. Tipologi Ekonomi Politik di Kelurahan Sungai Selan

Teori *Need for Achievement* menyebutkan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi tipologi ekonomi politik di suatu daerah. Berikut analisis peneliti berdasarkan penelitian di Kelurahan Sungai Selan:

1. Faktor Intrinsik (berasal dari dalam diri individu)

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat agar masyarakat mampu mendapatkan serta mempertahankan pekerjaannya yakni mengacu pada persepsi individu tentang kemungkinan sukses yang akan dicapai, keyakinan individu, *value* (tujuan), ketakutan individu terhadap kegagalan dan mengacu pada perbedaan gender sehingga individu akan terus memotivasi dirinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Faktor Ektrinsik (bersumber dari luar individu)

Faktor ekstrinsik dapat berupa hubungan pimpinan dengan bawahan, hubungan antar rekan bekerja, system pembinaan dan pelatihan, system kesejahteraan, lingkungan fisik tempat kerja. Di Kelurahan Sungai Selan ini sendiri banyak jenis mata pencaharian, dimana dalam hal ini masyarakat bekerja sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka masing-masing, sehingga adanya pengaruh dorongan antar masyarakat untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, Kelurahan Sungai

Selain juga mempunyai jenis etnis atau Suku yang beragam, tentunya setiap etnis atau suku mempunyai tujuan serta kepentingan masing-masing yang tentu mempunyai sebuah kebudayaan yang berbeda. Budaya ini juga sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat.

Untuk tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan tentunya harus adanya kinerja yang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok masyarakat. Dengan adanya *Need for Achievement* ini sendiri tentu dapat membantu karena adanya dorongan-dorongan untuk masyarakat agar dapat berkembang kedepannya.

Teori pilihan rasional yang membuat dua untuk yakni aktor dan sumber daya. Berdasarkan penelitian peneliti di Sungai Selan bahwa aktor yang dimaksud ialah masyarakat itu sendiri, dimana mereka bekerja sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka memiliki pilihan atau maksud serta kepentingan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan. Aktor (masyarakat) dalam menentukan pilihan rasional mereka terlebih dahulu mempertimbangkannya secara mendalam sesuai dengan kesadarannya serta memiliki kekuatan untuk menentukan pilihan mereka dalam bertindak dan bersikap. Dalam penelitian ini pilihan rasional ini juga mengarah ke suatu tindakan masyarakat untuk mencapai tujuan mereka sesuai dengan keinginan mereka. Di Kelurahan Sungai Selan ini sendiri masyarakat yang bekerja berhak memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan serta keinginan mereka untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam hal ini aktor atau masyarakat di pandang memiliki pilihan, maksud atau sesuatu yang bernilai.

Kemudian, sumber daya. Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya interaksi antara aktor dan sumber daya itu sendiri. Adanya tindakan sosial ini sendiri tentunya di pengaruhi oleh dua aktor, dimana masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak lain dan saling mempengaruhi. James Coleman mengemukakan bahwa individu tidak selalu berperilaku rasional, namun hal ini akan sama saja karena aktor tetap bertindak sesuai dengan rasionalitas seperti yang mereka bayangkan.

D. Inovasi Kebijakan Terhadap Tipologi Ekonomi Politik Berbasis Etnis Kelurahan Sungai Selan

Dalam rangka menjaga keharmonisan kehidupan sosial masyarakat khususnya di Kelurahan Sungai Selan yang dikenal heterogenya komposisi etnis di wilayah tersebut sehingga peneliti memberikan beberapa inovasi kebijakan terhadap tipologi tersebut, diantaranya: (1) institusi lokal yang ada di Kelurahan Sungai Selan perlu meningkatkan kapasitas serta fungsi mereka dalam mengembangkan potensi masyarakat baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Institusi lokal juga turut membantu menyelesaikan berbagai masalah bahkan kemungkinan munculnya problem di masyarakat (2) masyarakat perlu membuat komunitas baru ditengah multietnis dimana agar mampu memecahkan masalah ekonomi bahkan politik tanpa kehilangan identitas aslinya termasuk bekerja sama untuk menentukan kebermanfaatn terhadap potensi yang dimiliki daerah tersebut (3) diperlukannya lembaga khusus yang bertujuan unyuk memberikan penguatan baik itu ekonomi, kekeluargaan, pendidikan, agama, politik, dan sebagainya kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan tipologi etnis yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, lembaga tersebut juga berperan dalam menopang hidup masyarakat. (4) merumuskan kebijakan ekonomi yang peka terhadap potensi serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang multietnis seperti di Kelurahan Sungai Selan ini yang kemudian selanjutnya terkait kebijakan tersebut memerlukan ketegasan dan konsistensi pemerintah terkait agar berdampak positif bagi ekonomi politik daerah tersebut.

IV. KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai tipologi ekonomi politik berbasis etnis di Kelurahan Sungai Selan bahwa Kelurahan Sungai Selan terdapat beberapa etnis. Adapun macam-macam etnis yang ada di Kelurahan Sungai Selan seperti, etnis Melayu, Bugis, Tionghoa, Jawa, dan sebagainya. Etnis Melayu merupakan etnis yang paling Dominan di Kelurahan Sungai Selan, sisanya adalah etnis Pendatang. Etnis pendatang inipun mulai baerbaur dengan masyarakat sekitar. Dengan

beragamnya jenis etnis yang ada di Kelurahan Sungai Selan, dalam hal ini masing-masing ada sebagai masyarakat yang bekerja berdasarkan etnis mereka masing-masing.

Sistem perekonomian masyarakat Sungai Selan juga relatif cukup baik serta sudah mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Hal ini didukung dengan adanya sistem mata pencaharian dan potensi melimpahnya sumber daya alam salah satunya timah dikarenakan memiliki nilai jual yang tinggi. Masyarakat berusaha untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada demi mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Mata pencaharian setiap masyarakat tentunya berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti, adanya perbedaan geografis, sosial, budaya, serta etnis tentunya.

Dengan beragamnya Etnis serta mata pencaharian yang ada di Kelurahan Sungai Selan terbentuklah sebuah Ekonomi politik, dimana sebagian masyarakat di Kelurahan Sungai Selan bekerja masih berdasarkan Etnis mereka masing-masing. Dalam hal ini mereka tentu mempunyai sebuah kepentingan dan tujuan masing-masing. Terbentuknya ekonomi politik berbasis etnis di Kelurahan Sungai Selan ini pun terbentuk disebabkan oleh beberapa faktor seperti, faktor lingkungan dan alam, kondisi geografis, kepentingan, serta faktor daerah asal. Oleh karena itu, di Kelurahan Sungai Selan masih terlihat sebagian masyarakat masih mengelompokkan diri mereka berdasarkan etnis mereka.

B. Saran

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan hasil penelitian peneliti di lapangan diatas, peneliti memberikan saran yang ditujukan bagi pemerintah, masyarakat, dan akademisi (maupun peneliti selanjutnya) agar dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat yang seperti multietnis ini. **Pertama**, bagi pemerintah. Perlu adanya perhatian dan pengakuan dari pemerintah terkait dengan eksistensi masyarakat multietnis bahkan adanya kelembagaan lokal yang dibentuk tersebut. Hal ini bertujuan agar program pemerintah dapat disinergikan khususnya pada pemanfaatan potensi lokal yang ada di wilayah atau di masyarakat di Kelurahan Sungai Selan serta meminimalisir munculnya konflik antar etnis. **Kedua**, bagi masyarakat. Masyarakat juga perlu meningkatkan rasa toleransi dan rasa

hidup yang damai dalam lingkungan sosial, menanamkan nilai-nilai serta kebudayaan antar etnis atau Suku mereka masing-masing dan mampu beradaptasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya etnis lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Ketiga, bagi akademisi. Diperlukannya penelitian lebih lanjut untuk mengukur sejauh mana peran pemerintah khususnya pemerintah lokal yang secara tidak langsung berhadapan dengan masyarakat setempat serta sejauh mana efektif dan efisiennya pembentukan komunitas atau lembaga tersebut berjalan agar dapat menemukan pola keefektifitasannya sehingga mampu dipelajari dan diimplementasikan pada daerah terkait dan daerah lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah turut andil membantu dalam proses penelitian, pembuatan, dan memberikan masukan dan dukungan saat penyusunan tulisan ini. Terima kasih kepada:

1. Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin, rahmat, dan anugerah-Nya
2. Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai
3. Kepada teman seperjuangan perkuliahan terkasih
4. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini
5. Para informan di lapangan atau lokasi penelitian termasuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta memberikan bantuan dan dukungan tak hingga sepanjang proses penulisan tulisan ini hingga terselesaikan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zakaria, (2019). Pilihan Rasional Petani Sawah Menanam Padi Pada Musim Kemarau Di Desa Donoyudan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Annur Reza. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan

- Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. *Jurnal Unnes*, Vol 2, No 4.
- Aprilia, Cika. (2022). Kajian analisis Batasan Etnik Suku Baduy Dalam Terhadap Wisatawan di Kampung Cibeo. *Jurnal Studi Inovasi*. Vol 2 (3) : 25-33.
- Ariani, (2008). *Need for Achievement* dalam Kinerja Individu Tinjauan Konseptual. *Jurnal Eksekuti I*, Vol 5.
- Arifin Basok, (2016). Konformitas dan Integrasi Pada Relasi Antar Etnis Dalam Aktivitas Perdagangan Di Pasar Pagi Sungai Selan. *Skripsi*. Universitas Bangka Belitung.
- Baskoro, Rihan. (2021). Dampak Sosial Ekonomi Kampoeng Reklamasi PT. Timah dalam Menunjang Pengembangan Sektor Pariwisata di Desa Riding Panjang Kabupaten Bangka. *Jurnal Studi Inovasi*. Vol 1 (2) : 70-76.
- Eka, dkk. (2013). Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Multi Etnik. *Jurnal Stain Pontianak*, Vol 14, No 1.
- Hadi Abdul, (2016). Eksklusivitas Sistem Sosial Budaya Masyarakat Dusun Pangkal Raya Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah. *Skripsi*. Universitas Bangka Belitung.
- Iskandar Dadan, (2004). Identitas Budaya Dalam Komunikasi Antar-Budaya: Kasus Etnik Madura dan Etnik Dayak. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol 6, No 2.
- Meta Sya, Dkk. (2019). Tinjauan Historis Symbol Harmonisasi Antara Etnis Tionghoa Dan Melayu di Bangka Belitung. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol 4, No.2.
- Mulyanto, dkk. (2016). Dinamika Konflik Etnis Di Toboali Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Empirika*, Vol 1, No 2.
- Nindra, Dary, dkk. (2021). Analisis Interaksionisme Simbolik Tradisi *Sam Sip Pu* pada Perayaan Imlek di Pulau Bangka. *Jurnal Studi Inovasi*. Vol 1 (4) : 40-49.
- Noffik Ernawati, dkk. (2017). Pengaruh *Need for Achivment dan Locus of Control* terhadap Intense Berwirausaha melalui Sikap Siswa Kelas XII SMK Negeri Se-Kota Semarang. *Journal of Economic Education*.
- Pradoto, dkk. (2015). Pengaruh Karakteristik Sosial-Ekonomi Masyarakat Terhadap Pola Permukiman di Bantaran/ Tepian Sungai Kahayan Kota Palangkaraya. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, Vol 11, No 3.
- Rachmadhani Arnis, (2018). Dimensi Etnik Dalam Kerukunan Umat Beragama di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Religious Research and Developmen*, Vol 2, No 1.
- Rejeki, Sri. (2019). Pilihan Rasional Petani Miskin pada Musim Paceklik. *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol 8, No 2. Hal, 185-212.
- Rosidin, (2015). Analisis Teori Pilihan Raional Terhadap Transformasi Madrasah. Vol. 7, No 2.
- Saliman, Wati. (2019). Perubahan Mata Pencarian Petani Pala Menjadi Nelayan Dalam Meningkatkan Status Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Dender. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Ambon.
- Siagan, Desri, dkk. (2021). Politik Identitas : Strategi Negosiasi Marga dalam Pernikahan Amalgamasi pada Etnis Batak dan Melayu di Kota Pangkalpinang. *Jurnal Studi Inovasi*. Vol 1 (3) : 80-85.
- Simanora, (2020). Peralihan Sistem Mata Pencarian dan Pola Interaksi Masyarakat Petani Kratom di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. *Jurnal pengembangan sumber daya manusia*.
- Suharjanto, Gatot. (2013). Keterkaitan Tipologi Dengan Fungsi dan Bentuk: Studi Kasus Bangunan Masjid. *Jurnal Architecture Departement Binus University*, Vol 4, No.2.
- Suliyati, (2016). Etnis Bugis di Kepulauan Karimunjawa: Harmoni Dalam Pelestarian Budaya dan Tradisi. *Jurnal Ilmu budaya Universitas Diponegoro*, Vol 11.
- Susiolo dwi, dkk. (2020). Pilihan Rasional Individu Menikah pada Usia Dini di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, Dan Sosial*, Vol 2, No 2.
- Syah, Abdul. (2016). Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pantai Nagari Persiapan Maligi Perpindahan Mata Pencarian Masyarakat Nelayan Tahun 2010-2017. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Yasin Arbi, (2017). Hegemoni Ekonomi Etnik Tionghoa Di Pesisir Kabupaten Bengkalis Riau. *Jurnal Sosial Budaya*, Vol 14, No 2.



Korespondensi

Email : alisopindimas@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

INOVASI POLITIK : KIPRAH LEGISLATOR PKS DI PARLEMEN KOTA PANGKALPINANG PERIODE 2019-2024

Dimas Ali Sopin^{1*}, Ranto^{2*}

^{1,2} Universitas Bangka Belitung | Gang IV No. 1, Balunijuk,
Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

Disetujui: 30 Januari 2023

Abstract

Gait in parliament is an important part that does not escape from the sight of political parties's eyes. Cadres as representation from political parties occupying seats in parliament are expected to be able in taking part of realizing people's aspirations, so the administration of regional government becomes more dynamic. The aim of this research were: 1) Analyzing the progress of PKS legislators in Pangkalpinang City's parliament; and, 2) Analyzing the influencing factors of progress from PKS legislator in Pangkalpinang City's parliament. This research was conducted at Prosperous Justice Party (PJP) Parliament, Pangkalpinang City in 2022 using qualitative method through descriptive approach. This research used primary data and secondary data from the chairperson, management, and cadres of Prosperous Justice Party collected through observation, interview, and documentation. The result of this research showed that: 1) Prosperous Justice Party optimizing legislator's work through the faction in DPRD of Pangkalpinang City by strengthening the function in parliament through quantity and quality increasing of cadres in government as evidenced by the increase in seat acquisition from 2 seats in 2014 until 2019 to 3 seats in 2019 until 2024; and, 2) Prosperous Justice Party employs various strategies to realizing aspirations, which are influential factors in gait, including the process of conveying convincing details of aspirations at plenary meetings, negotiating several parties using reciprocal relationships, and periodic internal evaluation. However, the realization of this aspirations faces several obstacle, including budget constraints, and political interest with certain people.

Keywords: Government, Cadre, Legislator's Work, Parliament, Factor

Abstrak

Kiprah dalam parlemen menjadi bagian penting yang tidak luput dari penglihatan partai politik. Kader sebagai utusan dari partai politik yang menduduki kursi parlemen diharapkan mampu berkiprah dalam perealisasi aspirasi masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih dinamis. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menganalisis kiprah legislator PKS di parlemen Kota Pangkalpinang; dan, 2) Menganalisis faktor yang mempengaruhi kiprah legislator PKS di parlemen Kota Pangkalpinang. Penelitian ini dilakukan di Parlemen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kota Pangkalpinang pada 2022 dengan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dari Ketua, Pengurus, dan Kader dari Partai Keadlian Sejahtera Kota Pangkal-

pinang yang dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dan penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Partai Keadilan Sejahtera melakukan pengoptimalan kiprah legislator melalui fraksi di DPRD Kota Pangkalpinang dengan melakukan penguatan fungsi di parlemen melalui peningkatan kuantitas dan kualitas kader di pemerintahan yang dibuktikan dengan peningkatan perolehan kursi dari 2 kursi pada 2014 sampai 2019 menjadi 3 kursi pada 2019-2024; dan, 2) Partai Keadilan Sejahtera melakukan berbagai strategi untuk merealisasikan aspirasi yang menjadi faktor berpengaruh terhadap kiprah, antara lain proses penyampaian detail aspirasi yang menyakinkan pada rapat paripurna, negosiasi terhadap beberapa partai dengan menggunakan hubungan timbal-balik, dan evaluasi internal secara berkala. Namun, realisasi aspirasi ini menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan anggaran dan kepentingan politik dengan orang tertentu.

Kata Kunci: Pemerintah Kiprah Legislator, Kader, Parlemen, Faktor

I. PENDAHULUAN

Partai politik menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem demokrasi negara, terkhusus negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia (Sunarto, 2004:27). Partai politik yang baik merupakan partai politik yang mampu memperjuangkan fungsinya sesuai ketetapan peraturan perundang-undangan secara konsisten. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, cita-cita, dan nilai yang sama dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Budiardjo, 2008:403).

Saat ini, setiap partai politik dituntut untuk bertahan dalam percaturan dan permainan politik serta melaksanakan berbagai program dengan tujuan untuk menguatkan kiprah partai politik dalam masyarakat. Partai politik seringkali menjadi wujud ekspresi ide, pikiran, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Semakin tinggi peran dan fungsi partai politik, maka akan semakin berkualitas sebuah demokrasi. Partai politik

harus selalu melakukan inovasi-inovasi terbaru demi kemajuan internal partai. Sebagaimana Sururi (2019) yang mengatakan Inovasi dalam sektor publik di Indonesia telah mengubah karakteristik organisasi publik yang rigid, kaku, dan cenderung status-quo menjadi sistem yang lebih luwes dan dinamis. Partai politik menjadi aktor penting dalam percaturan politik dikarenakan banyaknya kepentingan di dalam partai politik yang membuat partai sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang akan muncul. Sebagaimana Budiardjo (2008, hlm. 405) menyatakan partai politik menjadi tempat bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di depan penguasa.

Para tokoh politik berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Artinya, meningkatkan kinerja dan efektivitas fungsi partai politik dapat mewujudkan ruang demokrasi di tengah masyarakat dan tersalurkannya aspirasi publik. Tentunya hal ini berkaitan erat dengan berbagai dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas di dalam masyarakat. Sumber dari kelemahan partai politik memang sangat beragam, namun belakangan ini terdapat beberapa kelemahan yang menonjol dan cukup memprihatinkan yakni tentang aktualisasi peran partai politik di dalam parlemen.

Partai politik memiliki fungsi yang sangat penting di negara demokrasi, salah satunya adalah fungsi artikulasi politik. Artikulasi politik ini dapat diartikan bahwa partai politik berfungsi untuk menyuarakan atau memperjuangkan aspirasi rakyat yang beragam dan disatukan menjadi kehendak bersama melalui berbagai cara, seperti memberikan dukungan kepada kader partai politik yang kompeten atau individu di luar partai politik yang masih dianggap searah untuk menjadi pejabat di bidang pemerintahan dengan harapan kebijakan-kebijakan umum (*public policy*) yang akan dihasilkan dapat dipengaruhi oleh partai politik yang bersangkutan.

Pascareformasi tahun 1998, terjadi fenomena yang sangat menonjol, yakni munculnya banyak partai baru di antara partai-partai terdahulu yang ikut dalam verifikasi untuk menjadi peserta pemilihan umum tahun 1999 yang membuat iklim politik di Indonesia

penuh dengan persaingan terbuka. Salah satu partai politik yang baru muncul sebagai kontestan pemilihan umum tahun 1999 adalah Partai Keadilan, akan tetapi Partai Keadilan tidak memenuhi aturan syarat minimal perolehan suara sah (*electoral threshold*) sebesar 3% seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 pada pemilihan umum 1999 sehingga untuk dapat mengikuti pemilu 2004 dipersiapkan sebuah partai yang dapat mengakomodasi keinginan Partai Keadilan agar tetap berkontribusi pada perjuangan umat. Tanggal 3 Juli 2003, bergabunglah Partai Keadilan yang secara resmi merubah namanya menjadi Partai Keadilan Sejahtera, disingkat PKS. Partai Keadilan Sejahtera dipimpin oleh Dr. Hidayat Nur Wahid, M.A. dengan visi “terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat”. Pemaknaan kata sejahtera berawal dari Visi partai ini sebagai wujud nyata finalisasi perjuangan partai, misalnya melalui kader di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen untuk mempengaruhi kebijakan umum atau mengkritisi kebijakan umum yang tidak menguntungkan rakyat.

Bapennas mencatat pada pemilu 2004, PKS berhasil memperoleh lonjakan suara hingga lebih dari 600%. PKS mendapat suara sebanyak 8.149.457 dengan 45 kursi di DPR. PKS bahkan berhasil menang di DKI Jakarta dan meloloskan presiden partainya saat itu, Dr. Hidayat Nur Wahid dengan perolehan suara sebesar 262.019 melebihi BPP yang hanya sebesar 232.355 dan menempatkannya sebagai anggota DPR 2004-2009 dengan perolehan suara terbanyak, bahkan Hidayat Nur Wahid kemudian memenangkan pemilihan ketua MPR. Lonjakan suara PKS yang sangat besar pada pemilu 2004 tidak lepas dari keberhasilan PKS membangun citra sebagai partai bersih dan peduli sebagaimana jargon mereka. Berbeda dengan kebanyakan partai yang hanya bergiat menjelang Pemilu, PKS mampu menggerakkan kader-kadernya untuk terus memanas mesin partai setiap saat, terutama dalam menggarap aspirasi dan aksi-aksi sosialnya.

Dinamika politik lokal saat ini menuntut setiap anggota legislatif terpilih untuk bekerja lebih keras dibuktikan dengan ekspektasi yang tinggi dari konstituen terhadap kader partai yang terpilih menjadi anggota legislatif serta memberikan inovasi-inovasi baru bagi perkembangan masyarakat seperti yang

dikatakan oleh Yulius (2021) yakni inovasi tentunya harus memiliki dampak positif terhadap lingkungannya terutama masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Ekspektasi yang begitu tinggi ini bukan hanya pandangan sesaat atau tanpa alasan, hal ini dikarenakan sejak tahun 2005 tata cara pemilihan calon legislatif telah mengalami perubahan (dari rekomendasi partai menjadi pemilihan langsung oleh pemilih), keputusan ini tentunya menumbuhkan sistem demokrasi yang benar-benar ditentukan oleh rakyat. Artinya, rakyat memilih secara langsung wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan preferensinya, bukan atas dasar paksaan oleh pihak-pihak lain. Fungsi menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi konstituen partai politik oleh anggota legislatif merupakan salah satu yang harus dijalankan sesuai dengan program kerja partai politik.

Realitas politik yang berkembang saat ini mengisyaratkan kandidat terpilih yang menduduki kursi parlemen harus menyerap aspirasi dengan memanfaatkan waktu reses dan saat-saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil). Tidak ada satupun alasan bagi anggota DPRD untuk tidak melakukan penyerapan dan penyaluran aspirasi dari masyarakat, karena waktu, fasilitas bahkan anggaran mereka melakukan tindakan tersebut telah diatur sedemikian rupa. Tidak sedikit muncul kasus di beberapa daerah, masyarakat mengeluh karena anggota DPRD yang mereka pilih sebagai wakil di parlemen kurang akomodatif bahkan tidak pernah berkunjung dan berkomunikasi dengan masyarakat yang memilihnya seolah-olah lupa dari mana mereka berasal, sehingga terkadang masyarakat kehilangan saluran komunikasi politik untuk menyalurkan aspirasi mereka.

Terkadang muncul kasus yang berbeda, anggota DPRD pernah berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat, akan tetapi aspirasi yang mereka sampaikan tidak pernah terealisasikan. Hal ini begitu terlihat ketika seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan/diputuskan oleh pemerintah sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Seharusnya dengan menguatnya peran DPRD sebagai posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin

kedaulatan rakyat di era otonomi daerah dapat ditandai dengan ditegaskannya peran tugas dan wewenang DPRD, yakni selain menyerap dan menyalurkan aspirasi juga melakukan fungsi pengawasan.

Parlemen harus mampu menjaring aspirasi masyarakat dalam upaya mendekatkan penerapan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat harus dijadikan prioritas serta bahan pertimbangan dalam menyusun rencana dan kebijakan oleh pemerintah daerah dan parlemen, bukan hanya hasil dari interaksi pemerintah daerah dan parlemennya saja, diperlukan penguatan peran kelompok kepentingan dan pers di daerah untuk mendorong sistem di parlemen lebih aktif dan aspiratif. Pasal 53 UU 10/2004 telah menjamin hak masyarakat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan kebijakan tanpa memerinci implikasinya bagi pemerintah, karena di dalam penjelasan undang-undang tersebut UU ini menyatakan bahwa teknis penjaminan hak masyarakat ini diatur dalam tata tertib DPRD, sehingga hal ini membantu transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam implementasi kebijakan nantinya.

Pangkalpinang merupakan ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan masyarakatnya dominan beragama islam. Tercatat bersumber dari DKD Kemendagri RI Semester II sejak tahun 2020 penduduk Kota Pangkalpinang yang beragama islam mencapai 182.426 jiwa dari 217.753 jiwa penduduk Kota Pangkalpinang. Sementara itu, PKS dikenal sebagai partai yang menegakkan nilai Islam secara konsisten. Anggota PKS memang heterogen, ada yang NU dan Muhammadiyah. Perbedaan cara pandang islam atau mazhab yang dianut masyarakat Kota Pangkalpinang merupakan tantangan bagi PKS untuk menyatukan budaya yang berbeda dan mengkomunikasikan ideologi masyarakat dalam beragama, sehingga terbentuk kehendak bersama untuk mewujudkan visi sejahtera yang telah dicita-citakan.

Kiprah partai politik di dalam parlemen seharusnya menjadi bagian penting yang tidak luput dari penglihatan semua partai politik. Kiprah ini dapat berupa aktualisasi fungsi dari para kader-kader partai politik yang saat ini menduduki kursi-kursi parlemen. Aktor politik utusan partai yang menduduki kursi parlemen diharapkan mampu memberikan kontribusi

tertinggi dalam menjalankan peran dan fungsi mereka terhadap masyarakat, bukan hanya mementingkan kepentingan partai dan ideologi partai politik saja. Partai politik yang saat ini menduduki DPRD Kota Pangkalpinang sangatlah beragam dengan 30 anggota mulai dari partai Gerindra (4 kursi), PDIP (4 kursi), Golkar (4 kursi), Nasdem (4 kursi), PPP (4 kursi), Demokrat (4 kursi), PKS (3 kursi), PAN (2 kursi) dan PKB (1 kursi).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selalu mendapatkan kursi di parlemen Kota Pangkalpinang, tercatat dari awal pemilihan parlemen di Kota Pangkalpinang sampai dengan pemilihan serentak 2019 kemarin Partai Keadilan Sejahtera terus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dibuktikan dengan perolehan suara yang didapatkan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilihan serentak 2019 membuat PKS mendapatkan 3 kursi di DPRD Kota Pangkalpinang yakni Rio Setiady, S.T., H. Arnadi, S.TP., dan Syahrumadon sehingga mereka mampu membentuk fraksi di DPRD Kota Pangkalpinang. Dengan terbentuknya fraksi sendiri, kebebasan dalam mengutarakan pendapat lebih fleksibel. Fungsi dewan di DPRD juga diharapkan lebih maksimal untuk memberikan pengaruh (*influence*) dalam perumusan kebijakan umum dengan harapan visi sejahtera yang diperjuangkan PKS dapat tercapai.

Pelibatan peran serta masyarakat harus dijadikan kebutuhan bersama, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih dinamis dan dapat mewujudkan aspirasi masyarakat. Hasil penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh DPRD tentunya harus ditanggapi dengan menyeleksi setiap aspirasi yang diterima, kemudian hasil aspirasi yang diseleksi diusulkan sebagai *public policy* di tingkat daerah. Penerapan *public policy* yang berasal dari aspirasi masyarakat harus tetap diawasi oleh DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat di Pemerintahan Daerah, dan sampai dengan saat ini hanya terdapat beberapa partai politik yang terus eksis bersuara di dalam parlemen kota Pangkalpinang yakni PKS. Walaupun PKS hanya mendapatkan 3 kursi di dalam parlemen, akan tetapi partai ini sering menjadi sorotan publik dengan aksi-aksinya membela masyarakat dan menjadi oposisi dari pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat. Sehingga hal ini membuat masyarakat

bingung dan penasaran di mana fungsi partai-partai lain sebagai wujud representasi dari suara masyarakat Kota Pangkalpinang.

Oleh karena itu, studi dalam penelitian ini akan terfokus melihat kiprah legislator PKS di parlemen Kota Pangkalpinang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Parlemen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berlokasi di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2022 menggunakan metode dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan kegiatan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas data temuan lapangan mengenai permasalahan penelitian (Yusuf, 2014). Data temuan lapangan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dari ketua, pengurus, dan kader dari Partai Keadilan Sejahtera di Parlemen Kota Pangkalpinang melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kiprah Legislator PKS di Parlemen Kota Pangkalpinang

Legislator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pembuat undang-undang anggota dewan legislatif. Artinya, legislator adalah orang-orang yang tergabung ke dalam parlemen dengan tujuan sebagai anggota yang membuat undang-undang dan aturan untuk suatu daerah.

Dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera melakukan berbagai cara untuk menguatkan kiprah legislatornya di parlemen Kota Pangkalpinang diantaranya adalah:

1. Penguatan Fungsi

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menguatkan fungsinya sebagai mitra penyambung aspirasi rakyat melalui pengoptimalan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan di setiap komisi. DPRD Kota Pangkalpinang memiliki 3 komisi diantaranya Komisi 1 yang berfokus kedalam bidang pemerintahan, komisi 2 yang berfokus kedalam bidang perekonomian dan keuangan dan komisi 3 yang berfokus kedalam bidang pembangunan. Partai Keadilan Sejahtera memiliki fraksi sendiri yang terdiri dari 3 orang yakni H. Arnadi, S.TP sebagai ketua

fraksi, Syahrudhoh sebagai wakil ketua fraksi dan Rio Setiady, S.T sebagai anggota fraksi.

Selaras dengan yang disampaikan pada wawancara peneliti dengan Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza yang menyebutkan:

Setiap komisi melakukan tugas dan fungsinya masing-masing seperti komisi 1 yang bertugas dibidang pemerintahan dan komisi-komisi yang lain agar setiap aspirasi yang masuk dan kebijakan yang akan dikeluarkan dapat ditindak dengan cepat (Wawancara 12 September 2022).

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa struktural komisi yang terdapat di DPRD Kota Pangkalpinang tersusun rapi dengan tugas masing-masing sehingga aspirasi yang disuarakan akan tepat sasaran dan lebih cepat terealisasikan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tergabung kedalam setiap komisi yang ada di DPRD Kota Pangkalpinang seperti Rio Setiady di komisi 1, Arnadi di komisi 2 dan Syahrudhoh di komisi 3. DPRD juga dituntut untuk mewartakan serta menjadi jembatan terkuat dalam menyikapi berbagai persoalan di masyarakat karena mereka yang duduk diparlemen saat ini menjadi representasi aspirasi dan tombak utama untuk menyampaikan ke pemerintahan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Fuad dalam jurnal administrasi negara (2000) mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Oleh karena itu, DPRD menjadi sorotan umum untuk membuat kebijakan-kebijakan pro rakyat dan menampung aspirasi rakyat untuk diperjuangkan dan direalisasikan sehingga masyarakat akan menilai setiap anggota DPRD yang sering menyuarakan aspirasi mereka dan mengedepankan keinginan masyarakat.

2. Teknik Penjaringan Aspirasi

Salah satu bentuk untuk menarik aspirasi adalah dengan melakukan reses ke masyarakat. Hasil-hasil reses yang dilakukan oleh fraksi PKS akan menjadi bahan dan pertimbangan untuk ditindaklanjuti dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah, dalam hal ini adalah Musyawarah Rencana Pembangunan

(Musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai tingkat Kota Pangkalpinang. Dengan adanya tindak lanjut aspirasi yang diakomodir dalam Musrenbang kemudian menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan pada akhirnya ter-anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, oleh karena itu salah satu kewajiban Anggota DPRD dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, searah dengan pelaksanaan otonomi daerah yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Reses dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni melakukan secara formal seperti mengundang beberapa aperatur pemerintahan mulai dari desa sampai dengan kelurahan atau dilakukan secara non formal seperti bercerita diwarung kopi ditengah-tengah masyarakat atau duduk bersama sambil bersenda gurau di halaman rumah. Hal senada juga diutarakan pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan anggota DPRD komisi 3 Fraksi PKS yakni Syahrudahon yang menyebutkan:

“Secara formal akan dilakukannya reses, akan tetapi saya biasanya lebih senang ngobrol langsung dengan masyarakat-masyarakat ketika ngumpul-ngumpul didepan rumah tetangga sehingga biasanya masyarakat akan lebih terbuka disituasi-situasi tersebut, dan karena saya juga aktif dimasjid jadi terkadang masyarakat menyampaikan langsung ke saya, karena saya tinggal didapil saya sehingga memudahkan untuk bergaul dan silaturahmi dengan masyarakat sekitar, karena biasanya masyarakat lebih nyaman menyampaikan aspirasi diruang-ruang nonformal karena bahasa yang digunakan lebih nyaman menggunakan bahasa daerah karena terkadang masyarakat sulit untuk berbicara diruang formal karena sulit mengatur tata bahasa” (Wawancara 16 Agustus 2022).

Pernyataan anggota komisi 3 fraksi PKS tersebut menggambarkan bahwa proses reses yang dilakukan dengan tujuan menyerap dan mendengar aspirasi masyarakat tidak hanya dilakukan diruang-ruang formal melainkan diruang-ruang non formal. Proses reses yang dilakukan

haruslah melihat kultur dan budaya masyarakat agar masyarakat lebih nyaman dalam menyampaikan aspirasi dan kritikan terhadap pemerintah. Hal ini juga disampaikan oleh Yusreza (22) selaku masyarakat Kota Pangkalpinang yang mengatakan bahwa:

“Seharusnya dewan-dewan itu turun langsung dan berbicara kepada masyarakat, karena terkadang kami gugup untuk bertemu langsung dikantor, jadi kalau sambil berbicara diwarung-warung atau kerumah-rumah lebih enak kita berbicara dan menyampaikan apa yang kita mau” (Wawancara 22 Januari 2023).

Dari pernyataan tersebut, ruang-ruang non formal dapat menjadi solusi yang baik untuk menjaring aspirasi sampai ke akar rumput karena ketika melakukan reses ke wilayah masyarakat yang minim pendidikan cara ini akan jauh lebih efektif karena masyarakat tidak perlu sungkan dan canggung untuk berbicara dan mereka lebih senang ketika para anggota dewan berbicara langsung sambil menikmati kopi didepan teras rumah dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing.

3. Dukungan Partai

Semua partai politik di tuntun untuk melakukan yang terbaik agar konstituen mereka dan masyarakat Kota Pangkalpinang dapat menjalani kehidupan yang baik tanpa adanya kendala yang berarti terutama perihal kebijakan pemerintah dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang sehingga butuh pertimbangan yang matang dan cara yang tepat agar kiprah dalam menjalankan fungsinya sebagai lidah masyarakat terus terlihat, seperti yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki cara-cara tertentu agar mereka terus mengenali dan mengetahui berbagai persoalan masyarakat terbaru yakni dengan melakukan reses berkala dan membuat ruang-ruang diskusi di internal fraksi agar aspirasi yang telah tertampung dapat dirembukan bersama dan mencari cara agar terealisasikan. Hal diatas selaras ketika peneliti melakukan wawancara dengan anggota komisi 1 fraksi PKS DPRD Kota Pangkalpinang Rio Setiady yang mengatakan:

“Setiap awal bulan pasti memiliki agenda rapat fraksi membahas mengenai isu-isu yang lagi hangat, kemudian jika perlu diputuskan maka akan disepakati bersama serta dukungan dari system kaderisasi partai” (Wawancara 8 Agustus 2022).

Pernyataan diatas menginformasikan bahwa fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Pangkalpinang cenderung aktif dalam menyikapi dan melihat permasalahan yang muncul dimasyarakat. Setiap partai politik yang kader-kader nya duduk diparlemen biasanya memiliki cara tersendiri untuk turut membantu para kader-kader mereka yang duduk diparlemen saat ini. Partai PKS menjadi salah satu partai yang memberikan dukungan penuh kepada kader-kader mereka yang duduk diparlemen saat ini. Salah satunya adalah menjadikan sistem kaderisasi yang mereka gunakan menjadi salah satu media untuk menyerap aspirasi, usulan bahkan kritikan terhadap pemerintah atau kebijakan yang ada. Sistem kaderisasi yang mereka terapkan cenderung dapat memudahkan para kader mereka yang duduk diparlemen untuk menangkap aspirasi lebih cepat dibandingkan dengan anggota dewan dari partai-partai yang lain sehingga mereka dapat lebih cepat dalam merespon berbagai permasalahan ataupun isu-isu yang ada dibandingkan dengan anggota dewan yang lain sehingga tidak heran ketika adanya rapat paripurna dan beberapa rapat-rapat yang lain anggota dewan fraksi PKS dapat mengajukan usulan-usulan terbaru bahkan konsep kebijakan terbaru dari hasil reses dan penjangangan aspirasi yang mereka lakukan.

Tabel 1. Penguatan Kiprah Legislator di Parlemen Kota Pangkalpinang

No.	Kiprah Legislator	Bentuk-Bentuk Kiprah Legislator	Keterangan
1.	Penguatan Fungsi	1. Optimalisasi Komisi 2. Komunikator Aktif	Berpengaruh
2.	Teknik Penjangangan Aspirasi	1. Problem Solver 2. Reses Formal 3. Reses Nonformal	Sangat Berpengaruh
3.	Dukungan Partai	1. Penguatan Internal Fraksi 2. Optimalisasi UPA (Unit Pembinaan Anggota)	Sangat Berpengaruh

B. Faktor yang Mempengaruhi Kiprah Legislator PKS di Parlemen Kota Pangkalpinang

1. Strategi Realisasi Aspirasi

Strategi dalam menyampaikan aspirasi menjadi salah satu poin penting untuk meyakinkan forum agar aspirasi yang dibawa dan ingin diperjuangkan dapat diterima oleh anggota dewan yang lain. Proses penyampaian aspirasi ketika rapat paripurna digelar haruslah meyakinkan dan detail mulai dari mengapa aspirasi ini penting untuk direalisasikan serta tujuan dari implementasi yang disuarakan karena tidak jarang muncul pro dan kontra dari proses penyampaian aspirasi sehingga butuh perhatian lebih ketika menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi yang diusulkan. Selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Arnadi ketua Fraksi PKS Komisi 2 DPRD Kota Pangkalpinang yang mengatakan:

“Cara memperjuangkan aspirasi yang pro kontra diparlemen yakni dengan cara menghargai aspirasi yang disampaikan oleh anggota dewan yang lain dengan mendukung aspirasi-aspirasi mereka yang baik, in syaa allah aspirasi yang kita ajukan juga akan didukung, selain itu sebelum melakukan rapat umum, terlebih dahulu mencari goals dari aspirasi ini apa bagi masyarakat dan pemerintahan daerah sehingga hal itu bisa disampaikan dan jika memang hal itu baik akan mudah untuk direalisasikan” (Wawancara 18 Agustus 2022).

Pemaparan ketua Fraksi PKS Komisi 2 DPRD Kota Pangkalpinang tersebut memberikan gambaran bahwa setiap aspirasi yang disampaikan oleh para anggota DPRD harus didukung jika aspirasi tersebut memberikan dampak baik bagi perkembangan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang. Setiap aspirasi yang disampaikan tentunya harus jelas tujuan dan arah dari apa yang disampaikan karena tidak jarang ketika aspirasi tersebut disampaikan dan tidak didiskusikan didalam internal fraksi sebelum melakukan musyawaran terdapat beberapa kekeliruan dan aspirasi yang disampaikan tidak jelas arah dan tujuannya

sehingga aspirasi seperti ini tidak dapat direalisasikan dan membawa dampak kurang baik terhadap fraksi yang mengutarakan aspirasi tersebut.

2. Mengatasi Kendala

Beberapa aspirasi tidak jarang memiliki kendala untuk direalisasikan bahkan tidak menutup kemungkinan tidak teralisasi. Salah satu kendala aspirasi sulit untuk direalisasikan yakni permasalahan anggaran. Penyerapan aspirasi masyarakat kedalam anggaran terutama yang masuk kedalam anggaran tahunan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena sering kali anggaran menjadi suatu aspek yang krusial dalam mengimplementasikan setiap keinginan masyarakat. Anggaran yang disediakan oleh DPRD Kota Pangkalpinang dalam mengimplementasikan aspirasi sering kali memiliki masalah. Pertama, terkait dengan keterbatasan anggaran yang dikeluarkan dan anggaran yang dimiliki sehingga butuh teknik penganggaran yang baik karena jika tidak dianggarkan dengan baik maka anggaran yang ada akan mengalami kebobolan. Hal ini yang akan menyebabkan berbagai aspirasi yang diajukan masyarakat tidak masuk kedalam penganggaran. Kedua, terkait dengan kepentingan politik yang membuat *bergaining* tertentu dengan beberapa orang. Misalkan terdapatnya lobby yang dilakukan oleh anggota legislatif untuk menyetujui beberapa kegiatan tertentu di dapil-dapil yang mendukungnya ketika pemilu dilaksanakan dan hal ini akan menguntungkan bagi politisi legislatif tersebut. Ketiga, terkait dengan kualitas usulan karena sering kali terdapat jarak yang jauh antara kebutuhan dan keinginan dalam hal penganggaran pembangunan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ketua Fraksi PKS Komisi 2 DPRD Kota Pangkalpinang Arnadi yang menyebutkan:

“Kalau aspirasi yang kontra dimasyarakat biasanya terkait dengan lahan mengenai perizinan dari lahan yang akan dibangun seperti ada satu rt yang ingin membangun jalan akan tetapi ada satu orang yang tidak mau karena lahanya masuk kedalam proses pembangunan, maka akan dilakukan

pendekatan secara kekeluargaan dengan berbicara langsung dengan orang yang bersangkutan, akan tetapi jika masyarakat tetap menolak maka saya akan lepas tangan karena hak lahan tersebut adalah hak pribadi sehingga tidak boleh adanya pemaksaan” (Wawancara 18 Agustus 2022).

Pernyataan diatas menjadi salah satu bukti adanya perbedaan dari kebutuhan akan pembangunan yang dilakukan dengan keinginan masyarakat sehingga hal ini sering kali menjadi permasalahan untuk dilakukannya anggaran pembangunan di lokasi yang tidak diinginkan masyarakat akan tetapi strategis untuk pembangunan daerah. Selain dari permasalahan anggaran beberapa aspirasi tidak terealisasikan dan tidak adanya tindak lanjut karena proses penjarangan aspirasi ataupun proses reses yang dilakukan hanya sebatas formalitas. Pelaksanaan Reses atau pertemuan anggota dewan dengan konstituennya juga tercantum dalam Undang – Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 234 point (i) tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala serta pada point (j) yang berbunyi menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Hal ini menjadi patokan kuat bahwa setiap reses yang dilakukan oleh DPRD Kota Pangkalpinang harus ditindaklanjuti sehingga jika reses dilakukan hanya sebatas formalitas maka DPRD Kota Pangkalpinang telah melanggar amanah dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2014.

3. Evaluasi

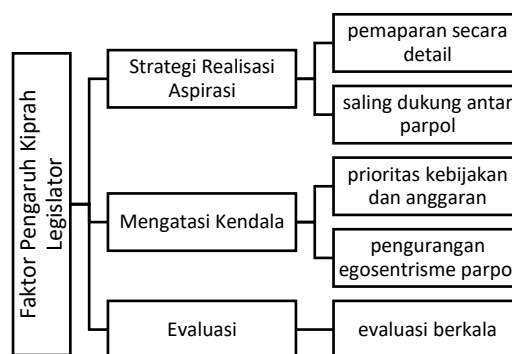
Disisi lain kiprah seorang legislator dapat juga didorong dengan adanya evaluasi yang dilakukan oleh partai politik terhadap kader-kader mereka yang duduk diparlemen saat ini. Seperti yang dilakukan oleh PKS yang melakukan evaluasi rutin terhadap kader-kader mereka di parlemen. Selaras dengan wawancara yang dilakukan

oleh peneliti dengan ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Pangkalpinang Muhamad yang mengatakan:

“Evaluasi itu tetap ada dan yang mengurusnya ada bidangnya di dpd ini dan yang mengurusnya dibidang hukum, ketenagakerjaan dan kebijakan public yang mengurus masalah anggota dewan ini, dan kita tidak mengontrol ketat mereka, kita memberikan kebebasan akan tetapi kebebasan itu kebebasan yang bertanggung jawab, akan tetapi yang krusial bisa langsung dikoordinasikan kekita sehingga kita bisa menyampaikan kemasyarakat karena keputusan final tetap disini juga dirapat dewan pimpinan daerah kalau ada masalah bahkan jika masalahnya terlalu berat bisa kita dropout, tapi alhamdulillah belum ada sejarahnya seperti itu dan evaluasi menjadi sarana kita untuk meningkatkan kinerja para anggota kita yang diparlemen” (Wawancara 12 September 2022).

Pernyataan ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Pangkalpinang tersebut membuktikan bahwa salah satu indikator dari eksisnya anggota dewan fraksi PKS dalam menanggapi dan menjalankan fungsinya diparlemen adalah dengan adanya evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh partai politik tanpa menekan dan membebankan para kader mereka diparlemen. Evaluasi ini bertujuan agar kader mereka yang ada diparlemen terus meningkatkan kinerja dan basis aspirasi yang ada dimasyarakat untuk diperjuangkan dan diaspirasikan ke forum DPRD. Tentunya sejauh ini kinerja menjadi aspek pendukung eksisnya fraksi PKS dalam menanggapi setiap permasalahan dan aspirasi yang muncul dengan harapan ketika evaluasi ini dilakukan secara berkala kinerja dan efektivitas dari anggota dewan fraksi PKS akan meningkat disetiap waktu.

Adapun faktor pengaruh kiprah legislator Partai Keadilan Sejahtera di parlemen Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Faktor pengaruh kiprah legislator PKS Kota Pangkalpinang

Sumber : Wawancara dan Observasi Peneliti Tahun 2022

Gambar diatas menerangkan bahwa pengaruh kiprah legislator Partai Keadilan Sejahtera dapat dikategorikan kedalam tiga faktor yakni faktor strategi realisasi aspirasi yang didalamnya terdapat pemaparan aspirasi secara detail serta adanya dukungan atau saling dukung dari setiap partai politik dalam upaya merealisasikan aspirasi yang diperjuangkan. Faktor kedua yakni upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam wujud melakukan prioritas kebijakan dan anggaran serta pengurangan egosentrisme partai politik dan faktor yang terakhir yakni melakukan evaluasi berkala dengan harapan dapat meningkatkan kinerja serta kreatifitas setiap anggota parlemen dalam membuat program yang menjamin kesejahteraan masyarakat.

C. Parlemen Kota Pangkalpinang

Ekonomic Et Societie karya Marx Weber menyatakan partai politik merupakan organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Partai politik menjadi kendaraan yang sangat penting untuk mendapatkan kekuasaan didalam pemerintahan terutama untuk menyalurkan gagasan serta idealisme dari masing-masing partai. Partai politik dituntut untuk memaksimalkan dan menjadi jembatan penghubung utama aspirasi yang diinginkan masyarakat dengan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintahan. Seiring perkembangan zaman partai politik diharuskan untuk melakukan berbagai penyesuaian dengan kultur masyarakat terutama masyarakat Kota Pangkalpinang.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada ketua Partai Keadilan Sejahtera Kota Pangkalpinang, Muhamad yang menyebutkan:

“Partai politik menjadi tempat bagi setiap masyarakat khususnya masyarakat Kota Pangkalpinang untuk berkumpul dan menyampaikan keinginan mereka, sehingga setiap warga negara mendapatkan hak yang sama yakni untuk menyampikan ide dan gagasan mereka ke pemerintahan” (Wawancara 12 September 2022).

Berdasarkan hal tersebut, partai politik menjadi ruang khusus bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan keinginan bahkan gagasan mereka didalam ruang-ruang publik seperti didalam parlemen. Setiap partai politik berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi di parlemen dengan melakukan berbagai cara mulai dari gerakan sosial media, meningkatkan kuantitas kader didalam partai bahkan berbagai tindakan sosial yang dilakukan oleh partai politik tidak luput disusupi oleh dalih-dalih pencitraan agar mendapatkan perhatian masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya kader-kader dari partai politik yang masuk dan lolos didalam pemilihan umum untuk menduduki kursi parlemen dapat menjalankan fungsi mereka sebagai lembaga legislatif dengan maksimal. Seperti yang terjadi didalam Partai Keadilan Sejahtera dimana mereka dituntut oleh konstituen untuk bekerja dan menyampaikan aspirasi secara optimal dan terarah agar tidak adanya penyelewengan kekuasaan dan lupa diri terhadap berbagai impian yang mereka tawarkan pada saat pemilihan umum.

Fungsi partai politik didalam parlemen menjadi bagian yang sangat penting untuk melihat sejauh mana partai dan kader mereka yang duduk diparlemen dapat eksis dan professional dengan tugas dan fungsi mereka dan hal ini juga akan dianalisis dengan menggunakan teori fungsi partai politik oleh Dalton dan Wattenberg (2000) dengan memfokuskan kedalam fungsi partai politik di pemerintahan yang terbagi kedalam 7 indikator yakni:

1. Menciptakan Mayoritas Pemerintahan

Pada indikator ini, Partai Keadilan Sejahtera terus melakukan peningkatan kualitas kader-kader mereka dan merancang berbagai cara agar

memenangkan serta meningkatkan jumlah kader-kader mereka yang duduk diparlemen saat ini. Jumlah kader yang duduk diparlemen sangat mempengaruhi besarnya kiprah yang didapatkan karena semakin banyak kader yang ada diparlemen maka akan semakin besar aspirasi yang disampaikan akan terealisasikan. Selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada muhamad selaku ketua Partai Keadilan Sejahtera Kota Pangkalpinang yang mengatakan:

“Kami terus meningkatkan kualitas para kader agar ketika mereka menjadi anggota dewan mereka bisa memberi manfaat yang besar sehingga masyarakat bisa menilai setiap anggota dewan dan partai politik yang terus memperjuangkan kesejahteraan mereka dan hal ini membawa dampak baik bagi partai politik menuju pemilu berikutnya” (Wawancara 12 September 2022).

Berdasarkan pernyataan diatas, Partai Keadilan Sejahtera melalui fraksi mereka di parlemen Kota Pangkalpinang terus mengoptimalkan kinerja dan fungsi mereka sebagai lembaga penyalur lidah rakyat. Karakteristik masyarakat yang cenderung melihat aksi nyata dibandingkan sekedar gagasan akan membawa dampak besar bagi partai-partai yang terus muncul dihadapan publik untuk meraih perolehan suara yang besar pada saat pemilu berlangsung. Hal ini yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan terbukti dari hasil perbandingan perolehan jumlah kursi di parlemen tahun 2014-2019 dan 2019-2024 bahwa Partai Keadilan Sejahtera mengalami peningkatan perolehan kursi dari periode sebelumnya sebanyak dua kursi dari satu kursi pada periode 2014-2019 menjadi tiga kursi pada periode 2019-2024.

2. Pengorganisasian Pemerintahan

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintahan No.16 Tahun 2010, DPRD memiliki fungsi legislasi yaitu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam kebijakan membentuk peraturan daerah, fungsi anggaran yaitu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam kebijakan yang menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan pemerintahan daerah dan fungsi pengawasan yaitu fungsi DPRD yang

diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan pemerintah daerah, terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan oleh Partai Keadila Sejahtera melalui fraksinya di DPRD Kota Pangkalpinang yang terdiri dari 3 orang yakni Arnadi, Rio Setiady dan Syahrumahon terbagi kedalam komisi yang berbeda-beda diantaranya Arnadi tergabung kedalam komisi 2, Rio Setiady komisi 1 dan Syahrumahon komisi 3. Selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Arnadi ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Pangkalpinang yang mengatakan:

“Kami menjalankan tugas dan fungsi kami secara maksimal agar fungsi kami sebagai DPRD seperti dalam undang-undang dapat berjalan dengan baik, karena kita paham betul apa saja tanggung jawab kita terhadap masyarakat” (Wawancara 18 Agustus 2022).

Berdasarkan pernyataan diatas fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota menjalankan fungsi dan tugas mereka secara optimal sesuai dengan amanah undang-undang serta konstitusi yang berlaku.

3. Implementasi Tuntutan Kebijakan

Adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditujukan untuk menarik aspirasi sampai ke akar-akarnya agar tidak adanya ketimpangan dan kesenjangan yang muncul dari kebijakan publik yang akan dikeluarkan. Partai Keadilan Sejahtera melakukan berbagai tindakan untuk mengumpulkan setiap aspirasi dari masyarakat dengan berbagai cara diantaranya melakukan reses yang dilakukan dengan dua cara yakni reses yang dilakukan secara formal dan reses yang dilakukan secara non formal. Hal ini selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan anggota dewan fraksi PKS Syahrumahon yang mengatakan :

“Masyarakat kita ini lebih suka diajak ngobrol diruang-ruang non formal seperti depan rumah, diwarung karena

mereka tidak harus berpakaian rapi, tidak harus menggunakan bahasa formal sehingga menurut mereka lebih nyaman seperti itu, dan terkadang ruang-ruang seperti itu lebih efektif bagi kita untuk melihat apa saja yang mereka inginkan dan apa saja yang harus diperbaiki dari kebijakan atau infrastruktur yang sudah ada” (Wawancara 16 Agustus 2022).

Berdasarkan pernyataan diatas fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Pangkalpinang melakukan berbagai cara agar aspirasi yang tidak tertampung dalam ruang-ruang formal dapat ditarik sehingga aspirasi yang dikumpulkan akan lebih optimal untuk didiskusikan pada rapat paripurna DPRD. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh partai lain yang hanya melakukan reses berkala seperti partai Golkar dan beberapa partai lainnya sehingga aspirasi yang didapatkan hanya melalui reses serta kunjungan yang dilakukan partai ke setiap dapil di Kota Pangkalpinang.

4. Mengorganisasikan Ketidaksepatan Oposisi

Dalam aspek pemerintahan keberadaan pihak oposisi menjadi hal yang wajar terutama didalam sistem demokrasi. Berbagai aspirasi yang dikumpulkan oleh setiap anggota dewan tidak lepas dari adanya pertentangan untuk merealisasikan aspirasi tersebut terutama perihal prioritas terkait aspirasi mana yang harus direalisasikan terlebih dahulu. Hal serupa terjadi di setiap rapat paripurna yang dilakukan oleh DPRD Kota Pangkalpinang ketika fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Raperda Mihol (Minuman beralkohol). Partai Keadilan Sejahtera menolak adanya raperda mihol dikarenakan bertentangan dengan syariat islam dan ideologi partai dan raperda akan membawa dampak buruk jika disahkan. Hal serupa seperti yang dikatakan oleh ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Arnadi yang mengatakan:

“rancangan peraturan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan adat pasti akan kami lawan, terutama raperda yang kami rasa membawa dampak buruk bagi masyarakat tentunya kami akan

berusaha untuk menolak hal itu” (Wawancara 18 Agustus 2022).

Berdasarkan pernyataan di atas Partai Keadilan Sejahtera berusaha untuk meyakinkan setiap anggota dewan yang berada di parlemen untuk menganalisis terlebih dahulu berbagai raperda yang memiliki dampak buruk untuk direalisasikan. Pengorganisasian oposisi menjadi salah satu cara agar berbagai aspirasi dengan prioritas dapat mensejahterakan masyarakat dan membawa dampak baik bagi masyarakat dapat didahulukan serta mencegah berbagai aspirasi dengan kemungkinan berdampak buruk.

5. Memastikan Tanggung Jawab Tindakan Pemerintah

Sebagai lembaga pemerintahan, pemerintah Kota Pangkalpinang seharusnya menjadi lembaga utama dalam upaya mensejahterakan masyarakat Kota Pangkalpinang, mulai dari kebutuhan bahkan tata kelola yang dijalankan oleh pemerintahan sehingga ketika terlihat sesuatu yang mengganjal akan mudah sekali terlihat oleh publik. Seperti APBD tahun 2023 yang mendapat kritikan langsung dari ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Pangkalpinang yang melayangkan 5 catatan khusus kepada pemerintahan Kota Pangkalpinang terkait penggunaan anggaran untuk skala prioritas pada tahun 2023. Hal serupa disampaikan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada arnadi ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang mengatakan:

“Saya juga mengkritisi beberapa kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif di Kota Pangkalpinang mulai dari anggaran, peraturan dan lain-lain, seperti permasalahan anggaran daerah yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara optimal dan tau mengenai skala prioritas atas anggaran tersebut, misalnya dengan jumlah anggaran segini hal apa yang harus dilakukan terlebih dahulu sehingga ada skala prioritas dari penggunaan anggaran tersebut” (Wawancara 18 Agustus 2022).

Berdasarkan pernyataan di atas arnadi selaku ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan kritikan terkait dengan pengelolaan skala prioritas APBD Tahun 2023 Kota Pangkalpinang sehingga adanya pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Tidak hanya itu, setiap anggota dewan harus bertanggung jawab terhadap berbagai kebijakan dan aturan yang mereka keluarkan karena setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Pangkalpinang akan berdampak luas terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sehingga pembahasan mengenai aturan yang akan dipatuhi oleh masyarakat harus diperbincangkan dan dipersiapkan secara serius. Sampai dengan saat ini, DPRD Kota Pangkalpinang terus aktif mengawal keinginan dan kebutuhan masyarakat agar munculnya stabilitas ekonomi dan pemerintahan yang menjadi faktor utama perkembangan masyarakat dan pemerintahan Kota Pangkalpinang.

6. Kontrol Administrasi Terhadap Pemerintahan

Pengontrolan administrasi menjadi salah satu hal yang penting untuk memastikan tidak adanya penyelewengan kekuasaan dan sistem di pemerintahan. Pengontrolan administrasi juga bertujuan agar adanya efektivitas dan efisiensi proses-proses administrasi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, dan transparan. Partai Keadilan Sejahtera menjadi salah satu partai yang berfokus terhadap pengontrolan efektivitas pelayan publik yakni dengan mengawasi jalannya sistem pemerintahan mulai dari penyerapan aspirasi dan sejauh mana aspirasi dapat direalisasikan. Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Rio Setiady anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Pangkalpinang yang mengatakan:

“kami selalu terbuka kepada siapapun masyarakat yang ingin mengajukan proposal, berdiskusi dengan kami bahkan ruangan kami ini setiap hari selalu ada saja masyarakat yang kesini, mulai dari memberikan saran, mengajukan proposal pembangunan, proposal perahu dan lain-lain sehingga

dengan ini kami harap masyarakat tidak perlu takut dan segan untuk datang ke DPRD dan tidak perlu takut kalau proposal mereka ditolak, karena kami selalu menerima proposal yang masuk dan mendiskusikannya pada saat rapat” (Wawancara 8 Agustus 2022).

Berdasarkan pernyataan diatas, DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat harus terbuka dan memudahkan masyarakat agar efektivitas pelayan publik dapat berjalan dengan baik dan isu yang berkembang dikalangan masyarakat kalau sulitnya mengajukan ke lembaga legislatif dapat dipecahkan karena dalam undang-undang salah satu tujuan adanya dewan perwakilan daerah adalah agar masyarakat lebih dekat dan efektif untuk menyuarakan saran dan kritikan mereka terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

7. Memperkuat Stabilitas Pemerintahan

Partai Keadilan Sejahtera melalui fraksinya di DPRD Kota Pangkalpinang ikut serta dalam mengontrol dan meningkatkan stabilitas di pemerintahan. Hal ini dibuktikan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Arnadi ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang mengatakan:

“Pemerintahan Kota Pangkalpinang harus kuat dalam menekan perekonomian masyarakat agar lebih stabil, selain itu kami DPRD juga harus menjalankan fungsi kami secara optimal agar peran kami sebagai penyambung aspirasi masyarakat dapat berjalan dengan optimal dan kami juga ikut dalam mengontrol alur pemerintahan baik di eksekutif maupun di dalam DPRD sendiri” (Wawancara 18 Agustus 2022).

Berdasarkan pernyataan diatas Partai Keadilan Sejahtera berharap agar setiap pemerintahan dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka secara optimal agar stabilitas pemerintahan di Kota Pangkalpinang baik eksekutif maupun legislatif dapat berjalan dengan baik. Lembaga pemerintahan menjadi aspek terpenting dalam menjaga stabilitas wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena lembaga pemerintahan yang bertugas membuat

kebijakan bahkan program yang membawa dampak besar bagi masyarakat. Selain itu, evaluasi dan pemantaun ulang kinerja dari masing-masing lembaga haruslah selalu dilakukan agar adanya peningkatan kinerja serta bahan pertimbangan untuk membentuk kebijakan dan program agar lebih pro rakyat dan membawa strategi-strategi baru untuk meningkatkan kiprah setiap legislator partai politik dalam menanggapi berbagai permasalahan di tengah-tengah masyarakat.

Adapun mengenai bentuk-bentuk fungsi partai politik yang dilakukan oleh legislator Partai Keadilan Sejahtera dalam menjalankan kiprahnya di parlemen Kota Pangkalpinang periode 2019-2024, peneliti mencoba merangkum dan menguraikan secara rinci kedalam bentuk tabel terkait dengan indikator fungsi partai politik yang dilakukan oleh legislator Partai Keadilan Sejahtera di parlemen yakni:



Gambar 2. Indikator fungsi partai politik didalam pemerintahan Kota Pangkalpinang
Sumber : Wawancara dan Observasi Peneliti Tahun 2022

Pada tabel diatas, dapat dianalisis berbagai indikator untuk melihat kiprah legislator Partai Keadilan Sejahtera melalui fungsi partai politik di parlemen Kota Pangkalpinang. Setiap indikator memiliki karakteristik berbeda yang akan menunjang legislator Partai Keadilan Sejahtera di dalam parlemen Kota Pangkalpinang.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kiprah legislator Partai Keadilan Sejahtera tidak terlepas dari penguatan fungsi partai politik di parlemen melalui tindakan yang dilakukan oleh para kader yang duduk di DPRD Kota Pangkalpinang saat ini.

Partai Keadilan Sejahtera melalui fraksinya melakukan pengoptimalan kiprah legislator di DPRD Kota Pangkalpinang dengan menguatkan fungsi di parlemen, yakni Partai

Keadilan Sejahtera menciptakan mayoritas pemerintahan. Partai Keadilan Sejahtera terus melakukan peningkatan kualitas kader-kadernya melalui perancangan berbagai cara agar kadernya dapat memenangkan pemilihan umum, di mana dampak dari kemenangan di pemilihan umum ini akan meningkatkan jumlah kader yang menduduki kursi parlemen. Hal ini dibuktikan oleh peningkatan perolehan kursi dari 2 kursi pada periode 2014 sampai 2019 menjadi 3 kursi pada 2019 sampai 2024. Penguatan fungsi di parlemen tidak hanya meningkatkan jumlah kursi melainkan menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga legislatif secara optimal. Partai Keadilan Sejahtera memiliki fraksi sendiri yang terdiri dari 3 orang yakni H. Arnadi, S.TP sebagai ketua fraksi di komisi 2, Syahrudahon sebagai wakil ketua fraksi di komisi 3, serta Rio Setiady, S.T sebagai anggota fraksi di komisi 1.

Partai Keadilan Sejahtera melakukan berbagai strategi untuk merealisasikan aspirasi yang menjadi faktor berpengaruh terhadap kiprah legislator, antara lain proses penyampaian aspirasi pada rapat paripurna haruslah meyakinkan audiens. Penyampaian aspirasi tersebut dilakukan secara mendetail dimulai dari alasan tentang nilai penting aspirasi untuk realisasi sampai tujuan dari implementasi dengan pertimbangan pro dan kontra.

Selain itu fraksi Partai Keadilan Sejahtera melakukan negosiasi terhadap beberapa partai agar aspirasi yang dibawa dapat terealisasi dengan menggunakan hubungan timbal balik yakni mendukung beberapa aspirasi yang membawa dampak baik dari beberapa partai lain sehingga besar kemungkinan partai tersebut akan mendukung aspirasi yang disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Upaya merealisasikan aspirasi tidak lepas dari berbagai kendala yang muncul Anggaran yang disediakan oleh DPRD Kota Pangkalpinang dalam mengimplementasikan aspirasi sering kali memiliki masalah, antara lain keterbatasan anggaran, kepentingan politik terkait penawaran dengan pihak tertentu, dan kualitas usulan yang berhubungan dengan kebutuhan dan keinginan. Peneliti memberikan masukan serta saran untuk peneliti selanjutnya agar lebih terfokus terhadap dampak implementasi yang dirasakan oleh masyarakat dari setiap program yang dilakukan oleh anggota parlemen sehingga akan terlihat indeks

keberhasilan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh DPRD.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian penelitian, khususnya dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kritik dan saran bagi peneliti.

V. DAFTAR PUSTAKA

- A. B. Barrul Fuad. 2000. *DPRD dalam Masa Transisi menuju Demokrasi*. Jurnal Administrasi Negara: Vol. 1. No. 1.
- Adianto dan Hasim As'ari. 2016. *Model Penerapan Aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Pekanbaru.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cora Elly Noviati. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/108628-ID-demokrasi-dan-sistem-pemerintahan.pdf> diakses tanggal 28 Maret 2022.
- Christian, Yulius. 2021. *Pemberdayaan Masyarakat Inovatif dalam Mendukung Kemajuan Daerah Perkotaan*. Jurnal Studi Inovasi, Vol. 1 No. 1 (2021): 52-61.
- Dalton, R.J. dan Wattenberg, M.P. 2000. *Partisan Change and Democratic Process*. Washington, DC: CQ Press.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), cet,ke-1.
- Kurniawan. 2014. *Peran Partai Keadilan Sejahtera dalam Pembangunan Politik Studi terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kehidupan Berdemokrasi di Kota Makassar*. Makassar.
- Littlejohn. 2009. *Teori Komunikasi, edisi 9*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial : Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J, 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mumu Mukhlisin. *SUARA KAMPUS .COM* Jatinangor, April 2002 Jawa Barat

- ibnusalam@lycos.com ASM.Romli, 2009).www.romeltea.com) diakses tanggal 28 Maret 2022.
- Nimmo, Daan. 2004. Komunikasi Politik (komunikator, pesan, dan media). Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartatie, 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Rahman, Bustami dan Ibrahim. 2009. *Kisi-kisi Praktis Menyusun Proposal Penelitian*. Pangkalpinang: UBB Press.
- Rohmah, Shoma Fajar. 2011. *Aktualisasi Visi Sejahtera Partai Keadilan Sejahtera DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus*. Semarang.
- Rush, Michael dan Phillip Althoff. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik diterjemahkan oleh Kartini Kartono*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saldi, Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Sastroadmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang; IKIP Semarang Press.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto. 2004. *Sistem Politik Indonesia*. Semarang.
- Sururi, A. (2019). *Inovasi Kebijakan Partisipasi Publik dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata (Studi pada Kawasan Ekowisata Situterate Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang)*. Jurnal Administrative Reform, 6(3), 110.
<https://doi.org/10.52239/jar.v6i3.1905>
- Suwanda, Dadang. 2017. *Peran Pengawasan DPRD*. Bandung:PT Remaja Rodakarya.
- Wasistiono, Sadu. 2009. *Meningatkan Kinerja DPRD*. Bandung:Fokusmedia.
- Widjaja, A.W. 1993. *Komunikasi : komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Yusuf, A. Muri, 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.




INDEKS AFILIASI

Universitas Bangka Belitung Bangka Belitung, Indonesia	1
MAN 3 Kota Banjarmasin Banjarmasin, Indonesia	14
Universitas Bangka Belitung Bangka Belitung, Indonesia	21
Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia	31
Universitas Bangka Belitung Bangka Belitung, Indonesia	43
Universitas Bangka Belitung Bangka Belitung, Indonesia	51



Inovbook Publications

 <https://www.inovbook.com>

 contact@inovbook.com